

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH
LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU
(SL-PTT) DI KABUPATEN NUNUKAN**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

N I R W A N A

NIM: 018399057

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Samarinda, September 2013

Yang Menyatakan



(Nirwana)
NIM.018399057

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten
Nunukan

Penyusun TAPM : Nirwana

NIM : 018399057

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Drs. HARDI WARSONO, MTP
NIP.19640827 199001 1 001

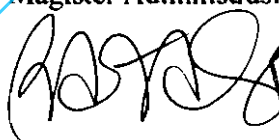
Pembimbing II,



Dr. SRI SEDIYANINGSIH, M.Si
NIP.19620131 198812 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik



FLORENTINA RATIH WULANDARI, S.Ip, M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana



SUCIATI, M.Sc, Ph.D
NIP.19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Nirwana
NIM : 018399057
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten
Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program
Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari /Tanggal : Sabtu / 14 September 2013
Waktu : 07.15 – 09.45

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Surachman Dimiyati, M.Ed, Ph.D

Penguji Ahli : Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA

Pembimbing I : Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP

Pembimbing II : Dr. Sri Sedianingsih, M.Si

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Nirwana
NIM : 018399057
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten
Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program
Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari /Tanggal : Sabtu / 14 September 2013
Waktu : 07.15 – 09.45

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Surachman Dimiyati, M.Ed, Ph.D

Penguji Ahli : Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA

Pembimbing I : Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP

Pembimbing II : Dr. Sri Sedianingsih, M.Si

ABSTRACT

The implementation of School of Integrated Crop Management Field (SL-PTT) in Nunukan Regency

Nirwana

Open University

Nirwana1977@yahoo.com

Keyword: Implementation, School of Integrated Crop Management Field (SL-PTT), Agriculture Development

The role of agriculture sector is mainly being one of the most important factors for the food availability and the welfare of farmers. Meanwhile, Nunukan regency is one of the borderlands which are becoming the target of agriculture sector development. Thus, one of the programs conducted by the government is the program of the school of Integrated Crop Management Field (SL-PTT). This program is conducted in almost all sub-district in Nunukan regency.

The first problem in this research is how the implementation of school of Integrated Crop Management Field (SL-PTT) in Nunukan Regency was conducted. The second problem was what factors which influence the implementation of school of integrated Crop Management Field (SL-PTT) in Nunukan Regency were.

The method used in this research was Qualitative Research Method with explanative research type. Data collection process was done by conducting in-depth interview technique, observation and documentation. Then, the determination technique was by applying purposive sample. On the other hand, the data analysis process was implementing by classifying and combining the data found. In term of validity, the data was passed through data source triangulation; therefore, the data finally presented was valid.

The result of this research shows that the achievement of SL-PTT implementation was supported by several factors. The first was related to the communication in which the implementation can be done effectively because of the clear purposes of regulation. Then, the second factors were concerning the resources, including human resource, equipment resource, and also finance resource. The next factor was regarding the disposition, it is in relation to the characters of implementers while succeeding the implementation SL-PTT. Lastly, bureaucracy structure factor was about the existence of Standard Operating Procedure (SOP) which was used as guidance whether the implementation of Integrated Crop Management Field is running and done as it should be or not, although the funding distribution was delayed.

ABSTRAK

Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan

Nirwana

Universitas Terbuka

Nirwana1977@yahoo.com

Kata Kunci : Implementasi, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), Pembangunan Pertanian.

Peranan sektor pertanian merupakan salah sektor penting pada ketersediaan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah perbatasan yang menjadi sasaran dalam pembangunan sektor pertanian. Salah satu program pemerintah adalah program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Program ini dilaksanakan hampir di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Nunukan.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan, sedangkan permasalahan kedua adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang dilakukan di Kabupaten Nunukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan, dengan menggunakan purposif sampel. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan data yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara data tersebut. Sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT didukung dengan berbagai faktor. Faktor pertama adalah komunikasi, dimana implementasi berjalan efektif karena adanya kejelasan tujuan kebijakan yang dikomunikasikan. Faktor kedua sumber daya, meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan dan sumberdaya pendanaan. Faktor ketiga disposisi adalah watak dan karakteristik para implementor untuk mensukseskan penyelenggaraan SL-PTT. Sementara faktor keempat struktur birokrasi yaitu adanya *standard operating procedures (SOP)* yang menjadi pedoman para implementor SL-PTT. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan sudah berjalan cukup baik dan sebagaimana mestinya, meskipun permasalahan pada faktor sumberdaya pendanaan mengalami keterlambatan pendistribusian dana bantuan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Public Administration Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2) Kepala UPBJJ-UT Samarinda selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- (3) Pembimbing I dan Pembimbing II (Dr. Hardi Warsono, MTP dan Dr. Sri Sedyaningsih, M.Si) yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (4) Kabid program Magister Administrasi Publik selaku penanggung jawab Program Magister Ilmu Administrasi;
- (5) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
- (6) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Nunukan, September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Istilah	vi
Daftar Bagan	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	9
B. Kerangka Berfikir	33
C. Defenisi Operasional	38
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	41
B. Instrumen Penelitian	41
C. Prosedur Pengumpulan Data	42
D. Metode Analisis Data	44
 BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	46
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	46
2. Gambaran Umum Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)	63
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	90
1. Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan	90
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan	120
 BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	150
B. Saran	150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu padi non hibrida yang disalurkan oleh pemerintah secara gratis kepada petani (kelompoktani) yang ditetapkan.

Kelompoktani (POKTAN) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Laboratorium Lapangan (LL) adalah kawasan / area yang terdapat dalam kawasan SL-PTT yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek penerapan teknologi yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompoktani / petani.

Pemandu Lapangan (PL) adalah Penyuluh Pertanian, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang telah mengikuti pelatihan SL-PTT.

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani Melalui perbaikan sistem /pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik lokasi. Komponen teknologi dasar PTT adalah teknologi yang dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi. Komponen teknologi pilihan adalah teknologi pilihan disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan.

Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.

Rencana Usahatani Kelompok (RUK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehampanan wilayah kelompoktani yang memuat uraian kebutuhan, jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan untuk pembelian saprodi.

Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) adalah suatu tempat Pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatannya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan.

DAFTAR BAGAN

			Halaman
Bagan	01	Tahap-Tahap dalam Implementasi Kebijakan	37
Bagan	02	Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan	38
Bagan	03	Skema Operasional SL-PTT	89
Bagan	04	Mekanisme Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul	98
Bagan	05	Mekanisme Pendistribusian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT	100
Bagan	06	Mekanisme Pencairan Dana Bantuan SL-PTT Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	103

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	01	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah Kegiatan SL-PTT di Kab. Nunukan Tahun 2009 - 2012	6
Gambar	02	Model Pemberdayaan Petani Melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu	70

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	01	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah Kegiatan SL-PTT di Kab. Nunukan Tahun 2009 - 2012
		5
Tabel	02	Penjaringan Data Berdasarkan Jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data
		44
Tabel	03	Data Luas Wilayah Kabupaten Nunukan
		46
Tabel	04	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Nunukan Tahun 2012
		48
Tabel	05	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya pada Tahun 2012
		49
Tabel	06	Luas Lahan Kabupaten Nunukan Tahun 2012
		51
Tabel	07	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah Tahun 2010 – 2011
		53
Tabel	08	Perkembangan luas panen, Produktivitas Padi Ladang Tahun 2010 – 2011
		53
Tabel	09	Perkembangan Luas panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija Tahun 2010 – 2011
		54
Tabel	10	Luas Panen sayuran, produktivitas dan produksi di Tahun 2011
		55
Tabel	11	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Buah – buahan Tahun 2010- 2011
		56
Tabel	12	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Biofarmaka Tahun 2012
		57
Tabel	13	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Pada Tahun 2012
		58
Tabel	14	Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Pada Tahun 2012
		60
Tabel	15	Data Kelembagaan Petani/Nelayan Pada Tahun 2012
		62
Tabel	16	Rekap Temuan Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan
		119
Tabel	17	Matrik Hubungan antara Faktor yang Berpengaruh dan Implementasi
		147

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	01	Pedoman Wawancara Penelitian
LAMPIRAN	02	Transkrip Hasil Wawancara

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian ditandai oleh pertumbuhan dan perubahan pada sektor pertanian. Dengan kata lain pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang signifikan sekaligus terjadinya perubahan masyarakat tani dari kurang baik menjadi lebih baik. Nampak bahwa peranan sektor pertanian sangat penting pada ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan pangan, dan penyumbang devisa negara melalui ekspor nonmigas dan lain sebagainya. Oleh karena itu wajar jika biaya pembangunan sektor pertanian ini senantiasa menempati tiga besar bila dibandingkan sektor pembangunan lainnya.

Salah satu bagian terpenting dari program pembangunan sektor pertanian adalah kelanjutan peningkatan implementasi pelaksanaan revitalisasi penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Target pembangunan pertanian adalah mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian :

- 1) Pencapaian swasembada pangan dan swasembada pangan berkelanjutan;
- 2) Peningkatan diversifikasi pangan;
- 3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;
- 4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha; meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;

mengentaskan kemiskinan khususnya di perdesaan, meningkatkan pendapatan masyarakat agribisnis serta melestarikan lingkungan hidup.

Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, handal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku utama pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lewat Rencana Kerja Pemerintah, pembangunan pertanian dilaksanakan melalui beberapa program diantaranya adalah Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara (Deptan, 2009).

Salah satu program di sektor pertanian sebagai upaya peningkatan produksi padi nasional guna memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, diimplementasikan oleh Kementerian Pertanian antara lain program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Program P2BN bertujuan meningkatkan produktivitas padi melalui penerapan inovasi teknologi. Sejalan perkembangan sains dan teknologi, Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan dan mengembangkan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) yang dapat meningkatkan produktivitas padi dan efisiensi input produksi. Dalam upaya pengembangan PTT skala nasional, Kementerian Pertanian telah meluncurkan program Sekolah Lapang (SL) PTT.

Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi merupakan salah satu program pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pertanian) untuk meningkatkan adopsi teknologi pertanian yang dianggap dapat meningkatkan produksi padi dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya populasi penduduk. Program ini merupakan forum pembelajaran bagi petani yang dilakukan secara langsung di lahan pertanian yang dikelola petani, dimana pada lokasi tersebut semua teknologi pertanian yang dihasilkan lembaga-lembaga penelitian diterapkan.

Teknologi pertanian dimaksud meliputi komponen dasar dan komponen pilihan. Komponen teknologi dasar (compulsory) adalah komponen teknologi yang dapat berlaku umum di wilayah yang luas, meliputi varietas unggul, bibit bermutu, pemupukan yang efisien serta pengendalian hama terpadu (PHT). Komponen pilihan teknologi pilihan, yaitu komponen teknologi spesifik lokasi yang mencakup pengelolaan tanaman, bibit muda (umur 14 hari), penggunaan pupuk organik, irigasi berselang, pupuk cair, penanganan panen dan pasca-panen (Suryana dkk, 2008).

Kunci keberhasilan dari PTT adalah adanya sinergi antara komponen teknologi sumberdaya alam dan kondisi sosial ekonomi. Indikator keberhasilan PTT yaitu rendahnya biaya produksi, penggunaan sumberdaya lahan yang efisien dan peningkatan pendapatan petani tanpa merusak lingkungan (Kartaamaja, 2000). Mengingat konsep PTT tersebut, maka pendekatan komponen teknologi yang dikembangkan di suatu wilayah disesuaikan dengan kondisi setempat. Sebagai contoh, penggunaan

benih varietas unggul yang sehat dengan vigor tinggi akan menghasilkan tanaman dengan distribusi akar yang lebih baik sehingga mampu menyerap air dan unsur hara pada lapisan tanah lebih dalam. Demikian pula dengan sistem pengairan intermiten akan memperbaiki efisiensi penggunaan air, aerasi tanah dan pertumbuhan akar.

Dalam Kegiatan SL-PTT terdapat satu unit Laboratorium Lapang (LL) sebagai tempat bagi petani atau anggota kelompok tani dapat melaksanakan seluruh tahapan SL-PTT pada tahap tersebut. Secara teknis komponen teknologi yang dapat dilaksanakan dalam SL-PTT meliputi : Varietas Unggul Baru (VUB), Benih Bermutu, Bibit Muda, Tanam Sistem Jajar Legowo, Pemupukan N berdasarkan BWD, Pemupukan P dan K berdasarkan PUTS, Penggunaan Pupuk Organik, Pengairan berselang, Pengendalian gulma secara terpadu, Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu (PHT), Panen beregu dan Penggunaan alat perontok (Deptan, 2008).

Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan di mulai sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Terdapat tujuh kecamatan sasaran SL-PTT. Laporan perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi padi sawah mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tertuang pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah Kegiatan SL-PTT di Kab. Nunukan Tahun 2009 - 2012.

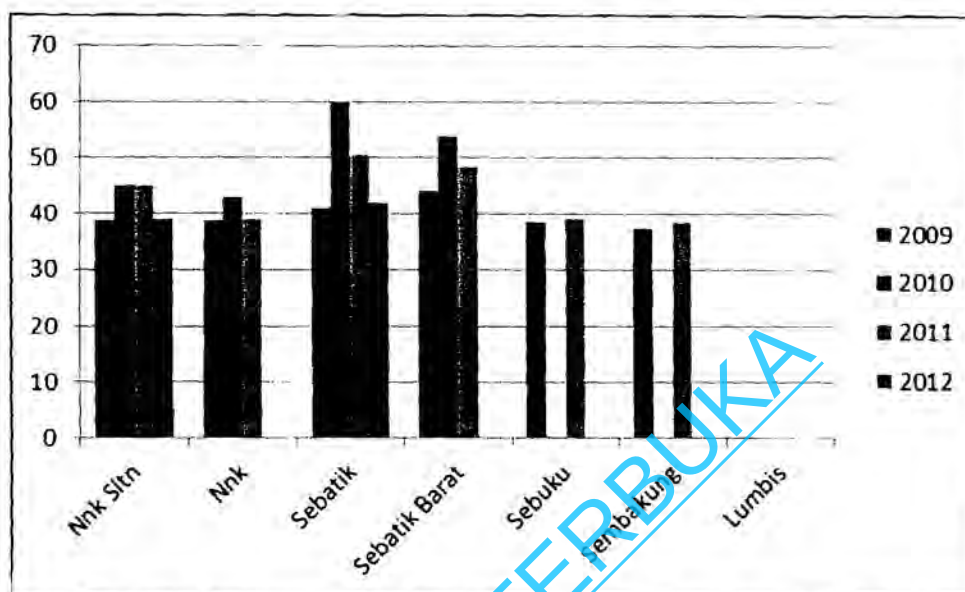
No	Kecamatan	Luas Panen (ha)				Produktivitas (Kw/Ha)				Produksi (Ton)			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1	Nnkan Selatan	630,5	198	227	191,7	38,87	45	45	39	2.450,6	891	1021,5	747,8
2	Nunukan	292	42	144	0	38,77	43	39	0	1.132,2	180,6	561,6	0
3	Sebatik	861	700	452	649	41,19	59,8	50,69	42	3.546,8	4,183	2291,2	2725,8
4	Sebatik Barat	717	459	341,5	0	44,10	53,8	48,5	0	3.161,9	2.467,9	1656,3	0
5	Sebuku	121,5	0	69	0	38,57	0	39,3	0	468,6	0	271,2	0
6	Sembakung	382	0	87,9	0	37,46	0	38,5	0	1.430,9	0	338,4	0
7	Lumbis	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
Jumlah		3004	1399	1321,4	840,7	39,82	50,4	43,48	40,5	12191	7722,5	6140,2	3473,6

Sumber : Data Dispersianak Kab. Nunukan

Data perkembangan produktivitas padi dari penyelenggaraan SL-PTT yang berkesinambungan datanya mulai tahun 2009 sampai tahun 2012 dari tujuh kecamatan hanya dua kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik. Untuk Kecamatan Nunukan, Sebatik Barat, Sebuku, Sembakung data luas panen di tahun 2012 belum terealisasi, karena di jadwalkan panen pada bulan januari sampai dengan februari 2013, sedangkan data luas panen untuk Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sebuku di tahun 2010 kosong disebabkan karena puso.

Berikut Gambar 1 Produktivitas Padi Sawah Kegiatan SL-PTT di Kabupaten Nunukan Tahun 2009 – 2012.

Gambar 1. Perkembangan Produktivitas Padi Sawah Kegiatan SL-PTT di Kabupaten Nunukan Tahun 2009 – 2012



Dari data tersebut terlihat bahwa produktivitas padi di Kabupaten Nunukan dari penyelenggaraan SL-PTT memperlihatkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2010, dengan produktivitas di tahun 2009 sebesar 39,82 ku/ha naik menjadi 50,4 ku/ha di tahun 2010. Dari tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami penurunan produktivitas, dengan produktivitas 43,48 ku/ha di tahun 2011. Terakhir di tahun 2012 kembali terjadi penurunan, dengan produktivitas sebesar 40,5 ku/ha. Meskipun demikian penurunan produktivitas tersebut di tahun 2012 masih lebih baik hasilnya jika dibandingkan dengan awal dilaksanakannya penyelenggaraan SL-PTT di tahun 2009 yaitu 39,82 ku/ha, selisih 0,68 ku/ha.

Diharapkan Kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) ini dapat diadopsi oleh petani, sebagai suatu usaha peningkatan hasil padi dan efisiensi sarana produksi dengan memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara bijak, dan

diharapkan nantinya dapat meningkatkan pendapatan petani. Dalam kurun waktu 4 tahun itu telah terjadi proses pembelajaran partisipatif dan riset bersama (collaborative research) yang dilakukan petani dengan fasilitator (pemandu). Selama kurun waktu itu sudah banyak kemajuan-kemajuan ditingkat petani yang dicapai. Berangkat dari kenyataan yang ada, bahwa dari penyelenggaraan SL-PTT selama 4 tahun, mengapa setelah peningkatan produktivitas di tahun 2009 – 2010, kemudian mengalami penurunan produktivitas ditahun 2010 sampai dengan tahun 2012?. Untuk itulah peneliti termotivasi untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan dan outputnya secara lebih mendalam.

Beberapa pertanyaan penting yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini ada dua. Pertama bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan. Sedangkan permasalahan kedua adalah Faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang dilakukan di Kabupaten Nunukan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dilakukan studi **Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Penyelenggaraan SL-PTT selama 4 tahun, di tahun 2009 – 2010 mengalami peningkatan produktivitas, kemudian mengalami penurunan

produktivitas ditahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Untuk itulah peneliti termotivasi untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan dan outputnya secara lebih mendalam.

2. Perlu diteliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengolahan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengolahan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis ;
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu administrasi publik khususnya ilmu implementasi kebijakan, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan.

- b. Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan implementasi kebijakan, khususnya yang terkait dengan implementasi penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan.
2. Manfaat Praktis ;
- a. Memberikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Nunukan mengenai implementasi penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) sehingga membantu didalam perumusan kebijakan yang lebih baik.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Dalam pembuatan sebuah kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Menurut Winarno (2007) ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan diantaranya, yakni:

- a. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- b. Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- c. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Berkaitan dengan ini, Dunn (2000) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan). Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (1990), ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda,

formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan,
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan

kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Tilaar dan Nugroho (2008) bahwa analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input yang penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan. Bahkan seterusnya program-program pendidikan yang telah diuji cobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan yang pada gilirannya akan lebih memperhalus atau mempertajam visi dan misi pendidikan.

Carl Friedrich (1969) pada buku Leo Agustino yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008) yang mengatakan bahwa:

"Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud".

James Anderson (1984) pada buku Leo Agustino yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut:

"Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan".

Menurut Leo Agustino dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008) ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.

- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur perundang-undangan. ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

- e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2. Konsep Implementasi

Pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Grindle (1980) sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup :

- a. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. derajat perubahan yang akan diinginkan
- d. kedudukan pembuat kebijakan
- e. siapa pelaksana program
- f. sumberdaya yang dikerahkan

Sedang konteks kebijakan mencakup :

- a. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- b. karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan. Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa ,yaitu:

"Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian".

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak

langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Sementara Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa:

“implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya”.

Model proses implementasi kebijakan :

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Karakteristik badan-badan pelaksana
- d. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik :
- e. Kecendrungan pelaksana (implementors)
- f. Kaitan antara komponen-komponen model
- g. Masalah kapasitas.

1) Teori-teori Implementasi Kebijakan

a) Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980)

dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- (2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

- (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan
- (6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- (2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

b) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut meter dan horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- (1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- (2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia(human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resource).
- (3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- (4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma,

dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

(5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

(6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

c) Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan weimer dan vining(1999) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

(1) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.

(2) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik atau geografis.

- (3) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber

informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- 1) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- 2) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu

menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- 3) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta

adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk

membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari

dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

4. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian kerakyatan merupakan salah satu alternative dalam rangka pemberdayaan petani menghadapi system otoda, yaitu pembangunan pertanian yang memihak kepada petani. Pembangunan pertanian kerakyatan tersebut, menggeser paradigma *farmer last-top down* menjadi *farmer first-bottom up*. Dalam kondisi tersebut, petani dapat

berperan aktif dalam setiap aspek kegiatan pertanian, serta menikmati hasilnya. Semula, petani bersifat pasif, menunggu petunjuk, menerima program, dan tidak memiliki posisi tawar yang tinggi.

Sementara itu penyuluh pertanian harus mampu berperan lebih sebagai komunikator atau penasihat/konsultan, fasilitator, bukan lagi hanya sebagai pengajar / educator, transfer teknologi, ataupun Pembina. Pembangunan pertanian kerakyatan merupakan jawaban bagi peningkatan kesejahteraan petani yang lebih baik.

Pendapat Mosher (1997) tentang syarat pembangunan pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan pertanian yang diusahakan pemerintah Republik Indonesia sejak awal masa kemerdekaan mensyaratkan :

- a. Adanya kejelasan tentang kebijakan pembangunan pertanian;
- b. Adanya penyuluhan pertanian yang berkelanjutan, untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian, serta memberdayakan masyarakat agar mampu dan mau berpartisipasi secara aktif;
- c. Adanya pasar permintaan hasil-hasil pertanian yang merangsang petani untuk memproduksi secara berkelanjutan;
- d. Tersedianya paket teknologi yang diperlukan untuk memproduksi sesuai dengan (permintaan) pasar;
- e. Tersedianya kredit bagi petani, baik utamanya berupa kredit produksi dan biaya hidup;

- f. Adanya kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan inovasi teknologi;
- g. Adanya pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembangunan pertanian, utamanya untuk pengairan dan pengangkutan (Totok Mardikanto, 2009).

Program adalah pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan yang disusun dalam bentuk dan sistematika yang teratur. Program dapat dihasilkan melalui proses perencanaan program yang diorganisasikan secara sadar dan terus menerus, untuk memilih alternatif yang terbaik dalam mencapai tujuan (Priyono, 2009).

Tingkat pendidikan petani sering disebut sebagai faktor rendahnya tingkat produktivitas usahatani. Tingkat pendidikan yang rendah maka petani akan lambat mengadopsi inovasi baru dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama. Sedangkan seseorang yang berpendidikan tinggi tergolong lebih cepat dalam mengadopsi inovasi baru (Soekartawi, 2002).

Petani yang mengusahakan luas lahan yang lebih tinggi akan lebih mudah merespon metode-metode penyuluhan pertanian karena mereka ingin memperoleh hasil-hasil pertanian yang lebih meningkat dari sebelumnya. Petani yang sudah lebih lama bertani memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada petani pemula, sehingga sudah dapat membuat perbandingan dalam mengambil keputusan terhadap anjuran penyuluh. Petani yang berusia lanjut berumur sekitar lebih dari 50 tahun biasanya fanatik terhadap tradisi dan sulit untuk diberikan pengertian-pengertian

yang dapat mengubah cara berfikir, cara bekerja dan cara hidupnya. Mereka ini bersikap apatis terhadap adanya teknologi baru (Kartasapoetra, 1991).

5. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)

Pilihan kebijakan teknologi yang utama di era reformasi ini adalah pengembangan teknologi dibidang agribisnis. Usulan pemerintah menjadikan agribisnis sebagai salah satu unggulan teknologi sangat tepat. Keunggulan komperatif Indonesia (seperti sumber daya alam yang melimpah, jumlah tenaga kerja yang besar, dan pasar yang besar) sebaiknya dijadikan basis untuk pengembangan teknologi sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia. Pengembangan teknologi dibidang agribisnis diharapkan dapat berperan dalam :

- a. Peningkatan produksi dan efisiensi.
- b. Meningkatkan teknologi baru yang tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Memberi nilai tambah (*value added*) produk akhir.
- d. Meningkatkan cadangan devisa (Sa'id dkk, 2001)

Metode SLPTT merupakan metode dari Departemen Pertanian (Deptan) dengan cara memberi pengajaran kepada para petani mengenai pengendalian hama terpadu, sekolah lapang iklim, dan teknologi budidaya. Petani diajarkan melakukan pertanian terpadu meliputi pemberian benih, pengendalian hama, penyediaan teknologi budidaya, dan pupuk secara terpadu (Mar, 2010).

Dalam upaya pengembangan PTT secara nasional, Departemen Pertanian (2009) meluncurkan metode Sekolah Lapang PTT. Panduan SLPTT padi ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan dalam pelaksanaan SLPTT padi dalam upaya peningkatan produksi beras di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
- b. Pedoman dalam koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan metode peningkatan produksi padi melalui SLPTT antara di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
- c. Acuan dalam penerapan komponen teknologi PTT padi oleh petani sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usahatani untuk mendukung upaya peningkatan produksi; dan
- d. Pedoman dalam peningkatan produktivitas, produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani padi

SLPTT akan melibatkan para petani yang terhimpun dalam kelompok tani dengan setiap kelompoknya mengelola lahan pertanian seluas 25 hektar. Dalam kegiatan tersebut para petani akan dapat saling bertukar ilmu tentang cara bercocok tanam yang baik sehingga dapat menuai hasil yang maksimal (Mar, 2010).

Dengan adanya metode SLPTT ini, diharapkan para petani mendapatkan ilmu yang sama mulai dari pemberian benih, pengendalian hama, penyediaan teknologi budidaya, dan pemberian pupuk. Dalam kegiatan SLPTT para petani akan dibimbing oleh para petugas penyuluh pertanian, diantaranya Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) sehingga dapat lebih menuntun petani untuk mempelajari tata cara pertanian dengan baik guna peningkatan produksi pertanian (Mar, 2010).

Metode yang dikembangkan dalam kegiatan itu model curah pendapat, wawancara dan diskusi di tingkat kelompok sekolah lapang. Kegiatan diskusi dilakukan bersamaan dengan acara pertemuan antar kelompok SLPTT yang dipusatkan di satu lokasi. Selain itu juga melakukan kunjungan ke lahan belajar SLPTT dan pertemuan antar pemandu (Mar, 2010).

Dalam tahun lima puluhan dan empat puluhan para pakar sosiologi pedesaan di Amerika banyak melakukan penelitian mengenai proses adopsi inovasi oleh para petani. Dalam proses adopsi dapat dibedakan lima tahap, sebagai berikut :

- a. Tahu, pertama kali mendapat ide, praktek baru, kekurangan rincian informasi
- b. Minat, mencari rincian informasi
- c. Evaluasi, menilai manfaat inovasi, dapatkah saya menggerakkannya
- d. Mencoba, mencoba menerapkan inovasi pada skala kecil
- e. Adopsi, menerapkan inovasi pada skala besar pada usaha taninya

Lima tahap proses adopsi ini bukan merupakan pola kaku yang pasti diikuti oleh petani, tetapi sekedar menunjukkan adanya lima urutan yang sering ditemukan baik oleh peneliti atau oleh petani (Adjid D, 2001).

Adopsi adalah keputusan yang diambil seorang untuk menerima motivasi dan menggunakannya dalam praktek usaha taninya. Keputusan untuk menerima inovasi merupakan perubahan perilaku yang meliputi kawasan pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang untuk mengetahui

adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerimanya (Adjid D, 2001).

Banyak penelitian dilakukan tentang hubungan antara indeks adopsi dan variasi ciri-ciri sosial individu. Variabel yang erat hubungannya dengan indeks adopsi kemudian diteliti di beberapa wilayah pertanian yang berbeda, baik di Negara maju maupun sedang berkembang yaitu pada pendidikan, pelayanan kesehatan dan perilaku konsumen (Van den Ban dan Hawkins H S, 1999).

Menurut Soekartawi (2002) adopsi teknologi baru adalah merupakan proses yang terjadi dari petani untuk menerapkan teknologi pada usahanya. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Tingkat pendidikan. pendidikan merupakan sarana belajar, dimana selanjutnya akan menanamkan pengertian yang menguntungkan menuju penggunaan praktek pertanian yang lebih modern. Mereka berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi
- b. Umur Petani, makin muda umur petani maka makin semangat untuk mengetahui hal baru, sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk cepat melakukan adopsi walaupun sebenarnya mereka masih belum berpengalaman soal adopsi tersebut
- c. Luas Pemilikan Lahan, petani yang memiliki lahan yang luas akan lebih mudah menerapkan inovasi daripada petani yang berlahan sempit, hal ini dikarenakan keefisienan penggunaan sarana produksi
- d. Pengalaman Bertani, petani yang sudah lebih lama berusaha tani akan lebih mudah menerapkan teknologi daripada petani pemula. Hal ini

dikarenakan pengalaman yang lebih banyak sehingga sudah dapat membuat perbandingan dalam mengambil keputusan

- e. Pendapatan petani padi sawah adalah selisih antara penerimaan dan total biaya dalam kegiatan usaha taninya

Namun Soekartawi dkk menekankan bahwa kecepatan petani yang memiliki lahan sempit untuk melakukan adopsi inovasi tentu akan berbeda bila dibandingkan dengan petani yang memiliki lahan yang luas, begitu pula halnya dengan petani yang baru belajar (pemula) dan petani yang sudah berpengalaman (biasanya orang-orang yang sudah tua) juga akan berbeda dalam hal kecepatan melakukan proses adopsi inovasi.

Pedoman Umum SLPTT (2011), Ada 2 jenis komponen PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) yang di terapkan dalam metode SLPTT, yaitu :

Komponen teknologi dasar:

- a. Varietas unggul baru, inbrida (non hebrida), atau hibrida
- b. Benih bermutu dan berlabel
- c. Pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami ke sawah atau dalam bentuk kompos
- d. Pengaturan populasi tanaman secara optimum
- e. Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah
- f. Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dengan pendekatan PHT (Pengendalian Hama Terpadu)

Komponen teknologi pilihan:

- a. Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam

- b. Penggunaan bibit muda (< 21 hari)
- c. Tanam bibit 1 – 3 batang per rumpun
- d. Pengairan secara efektif dan efisien
- e. Penyiangan dengan landak atau gasrok
- f. Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok

Pelaksanaan SL-PTT menggunakan sarana kelompok tani yang sudah terbentuk dan masih aktif. Kelompok tani yang dimaksud adalah kelompok tani yang dibentuk berdasarkan domisili atau hamparan, diusahakan yang lokasi lahan usahatannya masih dalam satu hamparan. Hal ini perlu untuk mempermudah interaksi antar anggota karena mereka saling mengenal satu sama lainnya dan tinggal saling berdekatan sehingga bila teknologi SL-PTT sudah diadopsi secara individu akan mudah ditiru petani lainnya (BPTP Kaltim, 2010).

Pengembangan model PTT haruslah didasarkan kepada masalah dan kendala yang ada di lokasi setempat yang dapat diketahui melalui penelaahan partisipatif dalam waktu singkat (BPTP Kaltim, 2010) :

- a. Langkah pertama pengembangan model PTT adalah Pemandu Lapangan (PL) bersama petani melakukan pengamatan dan menganalisa potensi lahan yang dimiliki, infrastruktur pendukung dan PTT yang spesifik lokasi. Melalui PRA keinginan dan harapan petani dapat diketahui, dari karakteristik lingkungan biofisik, kondisi sosial ekonomi, budaya petani setempat dan masyarakat sekitarnya dapat dipahami.
- b. Langkah kedua adalah penyusunan komponen teknologi yang sesuai

teknologi tersebut bersifat dinamis karena sesuai akan waktu yang mengalami perbaikan dan perubahan, sesuai dengan perkembangan inovasi dan masukan dari petani dan masyarakat setempat.

- c. Langkah ketiga adalah menerapkan teknologi utama di hamparan sawah. Sejalan dengan itu diperagakan komponen teknologi alternative pada luasan 1 ha dalam bentuk petak demonstrasi, sebagai sarana pelatihan petani dan petugas lapang. Komponen teknologi alternative ini dipersiapkan untuk mengganti atau mensubstitusi komponen teknologi yang kurang sesuai.

Sebelum melaksanakan tugas SL-PTT fasilitator/penyuluh dibekali pelatihan yang dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari pemandu lapang I, dilanjutkan pemandu lapang II dan terakhir pemandu lapang III.

- a. Pelatihan pemandu lapang I diselenggarakan oleh Pusat. Peserta pelatihan yaitu penyuluh pertanian, POPT ditingkat propinsi yang selanjutnya menjadi pelatih dalam pelatihan Pemandu Lapang II.
- b. Pelatihan Pemandu Lapang II diselenggarakan oleh provinsi, tempat pelatihan di provinsi atau tempat lain yang memungkinkan seperti balai latihan, UPT Departemen Pertanian.
- c. Pelatihan Pemandu Lapang III diselenggarakan oleh kabupaten, Peserta pelatihan adalah Penyuluh Pertanian, POPT ditingkat kecamatan/desa (Deptan, 2008).

Kegiatan penyuluhan pertanian merupakan salah satu dari sekian banyak variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku pada

petani dan perubahan yang terjadi menjadi tujuan akhir dari penyuluhan pertanian (Mardikanto, 1993).

Petani yang aktif atau sering melakukan kunjungan aktivitas penyuluhan akan semakin tanggap untuk dapat menerapkan suatu inovasi terhadap lahan pertaniannya (Soekartawi, 1986). Semakin tinggi frekuensi mengikuti penyuluhan maka keberhasilan penyuluhan pertanian yang disampaikan semakin tinggi pula. Frekuensi petani dalam mengikuti penyuluhan yang meningkat disebabkan karena penyampaian yang menarik dan tidak membosankan serta yang disampaikan benar benar bermanfaat bagi petani untuk usahanya (Hasyim, 2003).

Latar belakang sosial ekonomi dan budaya ataupun politik mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu inovasi diterima oleh sasaran seperti : umur, tingkat pendidikan, keberanian mengambil resiko, pola hubungan masyarakat dengan dunia luar dan sikap terhadap perubahan. Pemahaman sistem sosial budaya juga bermanfaat untuk mengetahui nilai hidup, norma sosial, serta pandangan hidup masyarakat yang sangat besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan oleh petani untuk mengadopsi suatu inovasi (Mosher, 1997).

Keberhasilan petani padi sawah tidak terlepas dari karakteristik sosial ekonomi petani dan tingkat adopsi petani tersebut. Satia Negara L (2000) menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Tingkat Adopsi dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya” ada 4 sudut pandang sosial ekonomi, yaitu :

- a. Tingkat pendidikan, pendidikan merupakan sarana belajar, dimana selanjutnya akan menanamkan pengertian yang menguntungkan menuju penggunaan praktek pertanian yang lebih modern. Mereka berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi.
- b. Umur Petani, makin muda umur petani maka makin semangat untuk mengetahui hal baru, sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk cepat melakukan adopsi walaupun sebenarnya mereka masih belum berpengalaman soal adopsi tersebut.
- c. Luas Pemilikan Lahan, petani yang memiliki lahan yang luas akan lebih mudah menerapkan inovasi daripada petani yang berlahan sempit, hal ini dikarenakan keefisienan penggunaan sarana produksi.
- d. Pengalaman Bertani (Lama Bertani), petani yang sudah lebih lama berusaha tani akan lebih mudah menerapkan teknologi daripada petani pemula. Hal ini dikarenakan pengalaman yang lebih banyak sehingga sudah dapat membuat perbandingan dalam mengambil keputusan.
- e. Frekuensi Mengikuti SLPTT adalah jumlah kehadiran petani padi sawah dalam mengikuti Sekolah Lapang PTT.
- f. Modal adalah nilai nominal yang digunakan petani untuk menjalankan kegiatan usaha taninya

B. Kerangka Berfikir

SLPTT (sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu) adalah sebuah metode dari Departemen Pertanian (Deptan) dengan cara memberi pengajaran kepada para petani mengenai pengendalian hama terpadu, sekolah lapang

iklim, dan teknologi budidaya. Petani diajarkan melakukan pertanian terpadu meliputi pemberian benih, pengendalian hama, penyediaan teknologi budidaya, dan pupuk secara terpadu.

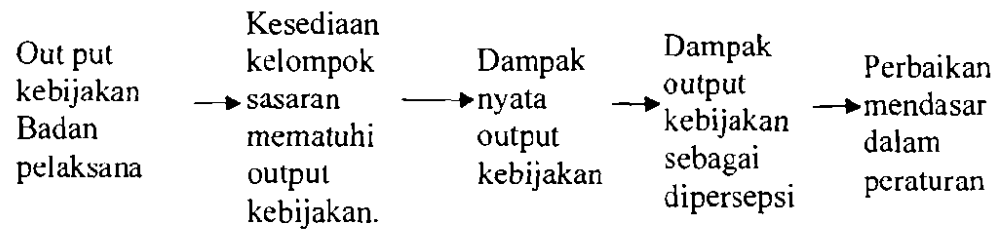
Tujuan utama dari metode ini adalah peningkatan sumber daya manusia petani dan mutu (kualitas) usaha taninya. Dalam metode ini dilakukan sekolah lapangan sebagai sebuah pendidikan informal bagi petani. Ada berbagai macam ukuran yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan keberhasilan metode ini. Salah satunya adalah intensitas petani untuk menghadiri kegiatan sekolah lapang ini.

Dalam rangka menunjang peningkatan produksi beras, Kementrian Pertanian melalui Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) diharapkan petani dapat mengaplikasikan teknologi dalam usahatannya secara benar sehingga dapat meningkatkan produksi padi petani.

Implementasi merupakan suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu, maka untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut diperlukan serangkaian aktivitas pelaksanaannya. Mengingat bahwa implementasi suatu program merupakan suatu hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan yang terjadi kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi-studi implemementasi.

Selanjutnya rangkaian proses implementasi kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian (Wahab, 2001) akan terlihat dalam Bagan 1 berikut :

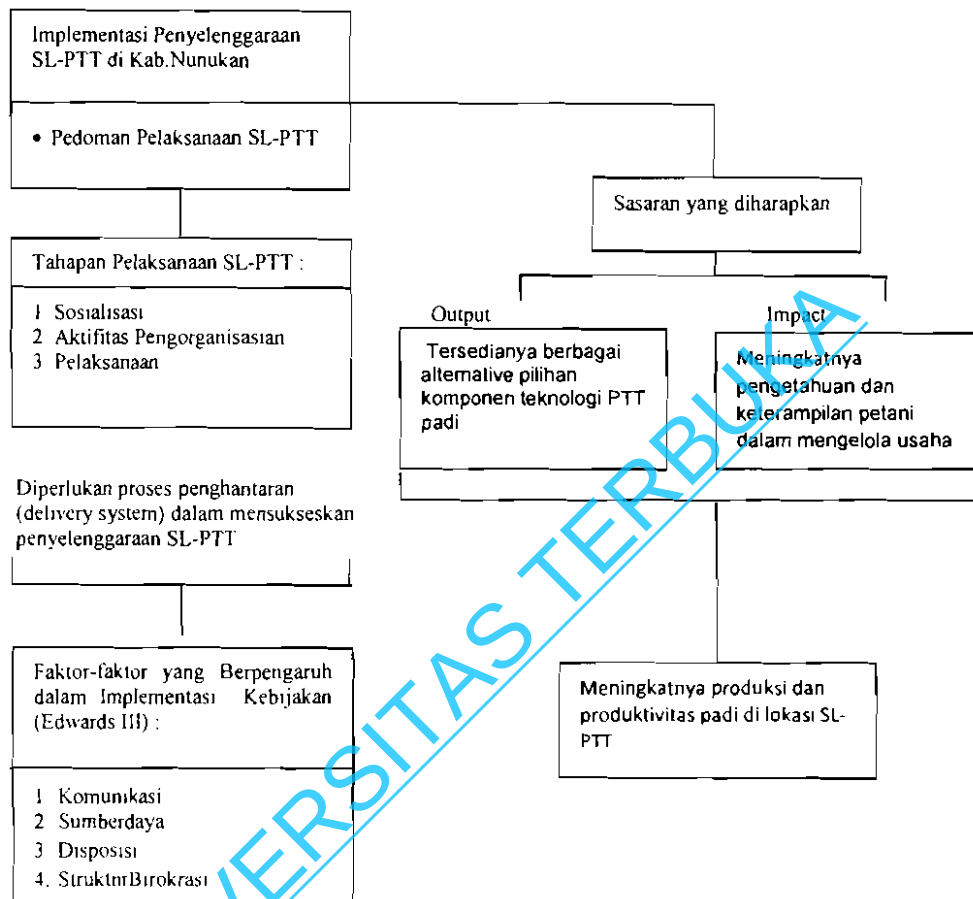
Bagan 1. Tahap-tahap dalam implementasi kebijakan.



Apabila Bagan di atas dikaitkan dengan kebijakan penyelenggaraan sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT), maka proses implementasi kebijakan di mulai dari output kebijakan pemerintah pusat berupa pedoman umum tentang sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT), kemudian menuju kepada ketersediaan kelompok sasaran (kelompok tani sasaran sekolah lapangan) untuk mematuhi ketentuan sesuai dengan pedoman umum tersebut. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan berupa terlaksananya sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT). Hasil pelaksanaan SL-PTT tersebut dibandingkan antara pedoman umum dengan realisasi pelaksanaan dilapangan, sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap keberhasilan tujuan kebijakan.

Model implementasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Bagan 2 berikut. Model ini dibangun sebagai kerangka penelitian dan analisis.

Bagan 2. Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Di Kabupaten Nunukan



C. Definisi Operasional

Dunn (2000) mengatakan bahwa definisi operasional memberikan makna bagi suatu variabel dengan merinci operasional (tindakan) apa yang disyaratkan untuk dilakukan agar dapat mengalami atau untuk mengukurnya.

Berawal dari pernyataan tersebut diatas, maka untuk dapat memudahkan pemahaman terhadap konsep dan operasionalisasi terutama menyangkut tentang indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian itu, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT

Implementasi penyelenggaraan SL-PTT adalah pelaksanaan tahap-tahap dari penyelenggaraan SL-PTT yang akan dilihat dari :

- a. Sosialisasi Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan adalah proses penyampaian informasi dari instansi teknis pelaksana SL-PTT yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan menyampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat kecamatan. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan bentuk penugasan dinas kepada pelaksana teknis di tingkat kecamatan.
- b. Aktivitas Pengorganisasian Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan di Kabupaten Nunukan
 - 1) Penyaluran bantuan program SL-PTT.
 - 2) Penentuan calon lokasi program SL-PTT.
 - 3) Perumusan Petunjuk Teknis pelaksanaan SL-PTT
- c. Pelaksanaan kegiatan program SL-PTT adalah proses pendampingan oleh pemandu lapang (PL) melalui pertemuan-pertemuan dan praktek lapangan untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai cara-cara bertani yang baik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Implementasi Kebijakan, peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Komunikasi, adalah kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.

- b. Sumber daya, dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi adalah watak/sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
- d. Struktur birokrasi, adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dengan pengukuran variabel (indikator) tersedianya pedoman pelaksanaan penyelenggaraan SL-PTT.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Mengacu pada tujuan penulisan ini yakni untuk menggambarkan proses Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan, maka Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif kualitatif. Penelitian eksplanatif kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antar suatu fenomena untuk variabel. Hubungan tersebut bisa berbentuk hubungan korelasional atau saling berhubungan, sumbangan atau kontribusi suatu variabel terhadap variabel lainnya (Irawan, 2011).

Selanjutnya menurut Irawan (2011), bahwa Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Penelitian Eksplanatif atau yang bersifat menerangkan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan kalau pengetahuan tentang masalahnya sudah cukup.

B. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pedoman wawancara, melakukan observasi (foto, rekaman suara, gambar) dan kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan informan (wawancara langsung, tertulis, rekaman, foto, gambar) berupa pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya berbentuk skala deskriptif.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk menghimpun data primer, melalui observasi langsung, wawancara dengan sumber informasi terpilih yang relevan dengan penelitian. Untuk data sekunder, diperoleh dari penelaahan dokumen seperti Pedoman Umum Pelaksanaan SL-PTT, peraturan perundang-undangan, buku-buku, arsip dan kliping yang berhubungan dengan penelitian seperti laporan perkembangan produktivitas padi dari penyelenggaraan SL-PTT, dan berbagai data yang relevan dengan penelitian.

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik yaitu :

1. Teknik Wawancara

Informan yang terdiri dari :

- a. Pihak Instansi terkait yaitu Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, yang membidangi tanaman pangan, selaku pelaksana dan penanggung jawab kegiatan penyelenggaraan SL-PTT pada tingkat Kabupaten.

- b. Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) / Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan (UPT BP3K) / Koordinator Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan, selaku koordinator dalam pelaksanaan pengawalan dan pendampingan terhadap program SL-PTT di tingkat Kecamatan,
 - c. Para pemandu lapang terdiri dari penyuluh lapangan, petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan petugas pengawas benih, selaku petugas pendampingan dalam penyelenggaraan SL-PTT di tingkat Desa.
 - d. Kelompok Tani peserta SL-PTT
2. Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang jumlah kelompok tani sasaran penyelenggaraan SL-PTT dilapangan, jumlah kelompok tani yang merealisasikan/ melaksanakan SL-PTT, dan jumlah kelompok tani yang belum/tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
 3. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data primer dan sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

Untuk lebih memperjelas dalam pengumpulan data, maka penjarangan data dilakukan sesuai dengan yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Penjaringan Data Berdasarkan jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Variabel dan indikator	Jenis data, metode pengumpulan data, sumber data		
	Primer		Sekunder
	Observasi	wawancara	Dokumentasi
A. Proses implementasi SLPTT, akan diukur dari : 1. Sosialisasi 2. Aktifitas Pengorganisasian 3. Pelaksanaan	Pengamatan secara langsung terhadap persoalan dan fenomena di lapangan.	Wawancara dengan PPTK, pihak kecamatan, pihak kelurahan, Pemandu Lapang dan petani sasaran program.	Peraturan, dokumen, arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian
B Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan . 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi		Wawancara dengan Dinas Pertanian, PPTK, PL, Petani	Dokumen, arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian

D. Metode Analisis Data

Sesuai dengan desain penelitian dan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang terkumpul dari lapangan, maka digunakan tehnik analisis eksplanatif kualitatif. Melalui tehnik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori yang sesuai.

Analisis data akan dilakukan secara deduktif, yaitu menganalisa dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus, atau penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang tidak diperiksa/diteliti dalam penelitian mengenai Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Wilayah

a. Keadaan Wilayah

Kabupaten Nunukan terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan yang masing masing mempunyai potensi wilayah yang berbeda. Perbedaan tersebut meliputi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, perbandingan luas daratan dan lautan serta yang lainnya.

Berdasarkan kondisi fisik dan alam, luas kabupaten Nunukan adalah 14.263,68 Km², terdiri dari luas daratan 158.807 Ha secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Luas Wilayah Kabupaten Nunukan

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Luas Total	Presentase
		Darat (Km)	Laut (Km)		
1.	Nunukan	22,999	471	1.586,77	11,19
2.	Nunukan Selatan	321,111	587	908,012	
3.	Sebatik Induk	17,222	97	104,42	0,73
4.	Sebatik Timur	15,333	86	101,01	
5.	Sebatik Tengah	9,444	0		
6.	Sebatik Utara	11,555	9		
7.	Sebatik Barat	29,919	254		
8.	Simenggaris	45,298	571		
9.	Sebuku	47,391	0	142,18	1,01
10.	Tulin Onsoi	47,692	0		
11.	Sembakung	175,6757	-	3.124,90	21,91
12.	Sembakung Atulai	28,5895			
13.	Lumbis	2.055,9099	0	2.055,90	14,41
14.	Lumbis Ogong	3.645,5011	0	3.645,50	25,56
15.	Krayan	1.837,5424	0	1.837,54	12,88
16.	Krayan Selatan	1.766,4631	0	1.766,46	12,31
		-	-	14.263,68	100

Sumber : BPS Nunukan Tahun 2012

b. Letak Geografis

Kabupaten Nunukan yang memiliki luas wilayah sekitar 14.247,50 Km² terletak di antara 11°52'30" sampai 11°84'54" Bujur timur 3°30'00" sampai 4°24'55" Lintang utara, dan dengan batas wilayah sebelah utara dengan Negara Bagian Sabah (Malaysia); sebelah timur dengan Laut Cina Selatan dan Selat Sulawesi; sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Malinau; sebelah barat dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia).

c. Wilayah Administratif

Sebagai kabupaten yang baru berusia 12 tahun, Kabupaten Nunukan sedang giatnya melakukan eksplorasi sumberdaya alam dan mengakselerasi pembangunan guna mengejar keteringgalannya dari daerah lain di Indonesia. Dalam hal ini dituntut adanya pemekaran wilayah kecamatan guna mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya warga yang ada di wilayah perbatasan antar negara, seperti di Lumbis, Sebatik dan Krayan.

Berikut pada Tabel 4 dibawah ini adalah luas masing – masing kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, berikut persentase luasan dibandingkan luas total Kabupaten Nunukan. Wilayah kecamatan yang baru mengalami pemekaran belum diperoleh datanya.

Tabel 4. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Nunukan Tahun 2012

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
			Ha	%
1	Nunukan	8	1.586,77	11,19
2	Nunukan Selatan	4	104,42	0,73
3	Sebatik Induk	4	142,18	1,01
4	Sebatik Timur	4		
5	Sebatik Tengah	4		
6	Sebatik Utara	4		
7	Sebatik Barat	4		
8	Simenggaris	4		
9	Sebuku	11	3.124,90	21,91
10	Tulin Onsoi	10		
11	Sembakung	9	2.055,90	14,41
12	Sembakung Atulai	11	3.645,50	25,56
13	Lumbis	42		
14	Lumbis Ogong	35	1.837,54	12,88
15	Krayan	65	1.766,46	12,31
16	Krayan Selatan	24		
	Jumlah	216	14.263,68	100

Sumber : BPS Nunukan Tahun 2012

d. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Nunukan dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang signifikan dimana pertumbuhan jumlah penduduk tersebut lebih menyolok di daerah pantai hal ini disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk tidak hanya karena kelahiran tetapi juga karena adanya migran dari luar kabupaten Nunukan ke Nunukan. Daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan penduduk sangat signifikan yaitu kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat dan Kecamatan Sebuku. Komposisi penduduk di beberapa kecamatan selanjutnya dapat di lihat pada Tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Pada Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Nunukan	1.586,77	53.591	33,79
2	Nunukan Selatan	104,42	20.283	194,24
3	Sebatik Induk	142,18	11.028	77,56
4	Sebatik Timur			
5	Sebatik Tengah			
6	Sebatik Utara			
7	Sebatik Barat			
8	Simenggaris			
9	Sebuku	3.124,90	11.781	3,76
10	Tulin Onsoi			
11	Sembakung	2.055,90	8.503	4,14
12	Sembakung Atulai			
13	Lumbis	3.645,50	9.380	2,57
14	Lumbis Ogong			
15	Krayan	1.837,54	8.538	4,59
16	Krayan Selatan	1.766,46	2.271	1,29
		14.263,68	125.585	8,80

Sumber : BPS Tahun 2012

Pada tahun 2011 sebelum terjadi pemekaran wilayah kecamatan Jumlah Penduduk terbanyak ada di Kecamatan Nunukan yaitu 53.591 jiwa, dan penduduk terendah ada di Kecamatan Krayan Selatan. Namun setelah pemekaran kecamatan terbanyak penduduknya tetap Nunukan dan kecamatan terkecil penduduknya adalah Lumbis Ogong.

e. Tanah dan Iklim

1) Tanah

Jenis – jenis tanah yang ada di Kecamatan Nunukan, menurut *Soil Taxonomi USDA* tergolong jenis ultisol, entisol, histosol, inceptisol dan millosol sedangkan menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor, terdiri dari jenis : podsolik, alluvial, orgasol, andosol dan rendzina.

Topografi Kabupaten Nunukan bervariasi dari landai, bergelombang, berbukit sampai curam, dengan ketinggian bervariasi dari 0 hingga 2390 mdpl. Dengan kondisi topografi demikian maka kemiringannya juga bervariasi antara 0 hingga 70 persen, yang sebagian besar daratan Kabupaten Nunukan terletak pada ketinggian diatas 20 dpl, kecuali Krayan sekitar diatas 973 dpl demikian juga sebagian wilayah Kecamatan Lumbis.

2) Iklim

Berdasarkan peta agroklimat L.R. Oldeman dan Muladi Tahun 1980 tipe iklim untuk Nunukan adalah tipe D, atau termasuk daerah beriklim tropis basah, dengan suhu lingkungan sekitar 23,3 hingga 31,8° C atau rata – rata maksimum 31,8° C dan minimum 23,3° C dengan kelembaban rata – rata berkisar antara 84 persen, tekanan udara 1.008,1 – 1.009,9 MBS.

3) Curah Hujan

Curah Hujan sangat mempengaruhi keadaan iklim suatu wilayah, produktivitas dari komoditas yang dibudidayakan dan pertumbuhan pada setiap tanaman maupun kehidupan lainnya. Data curah hujan sangat diperlukan terutama untuk menentukan tingkat kesesuaian komoditas yang akan dibudidayakan. Selanjutnya data curah hujan 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 5.

Jika dilihat dari data curah hujan selama 10 tahun terakhir maka terlihat bahwa pada bulan Mei – Juni dan Nopember – Desember cenderung intensitas curah hujan tinggi, oleh sebab itu pada periode ini

penanaman padi dimulai pada bulan Mei dan tanam periode kedua jatuh pada bulan Desember.

f. Keadaan Potensi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

1) Sumberdaya Lahan

Luas wilayah Kabupaten Nunukan 14.286,68 Ha, dengan lahan potensial 59.519 ha dan lahan fungsional 283.399 ha, lahan ini tersebar merata di seluruh kecamatan digambarkan pada Tabel 6 ;

Tabel 6. Luas Lahan Kabupaten Nunukan Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Lahan (hektar)
1	Nunukan	1.586,77
2	Nunukan Selatan	104,42
3	Sebatik Induk	142,18
4	Sebatik Timur	
5	Sebatik Tengah	
6	Sebatik Utara	
7	Sebatik Barat	
8	Simenggaris	
9	Sebuku	3.124,90
10	Tulid Onsoi	
11	Sembakung	2.055,90
12	Sembakung Atulai	
13	Lumbis	3.645,50
14	Lumbis Ogong	
15	Krayan	1.837,54
16	Krayan Selatan	1.766,46
		14.263,68

Sumber : BKPPPD, 2012.

2) Potensi dan Penggunaan Lahan

Dilihat secara visual dan beberapa informasi dari data keadaan lahan di Kabupaten Nunukan tingkat penggunaannya lebih cenderung meningkat dalam perkembangannya ke perkebunan, kemudian persawahan, perikanan dan peternakan. Sedangkan kehutanan saat ini

kondisinya sangat memprihatinkan karena terjadinya degradasi, baik karena faktor alam maupun ulah manusia (*human error*). Namun di wilayah Krayan Induk dan Krayan Selatan serta sebagian besar Kecamatan Lumbis Ogong kawasan hutan masih luas. Potensi lahan di Kabupaten Nunukan, sebagaimana daerah lain di Indonesia, dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, kehutanan dan areal pemukiman serta pemenuhan kebutuhan sosial lainnya.

g. Perkembangan Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultura

Peningkatan pemanfaatan sumberdaya lokal, pewilayahan komoditas pertanian dan peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi padi, palawija, dan hortikultura.

1) Padi

Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas padi di kabupaten Nunukan dalam tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari rata rata produktivitas 3,522 ton per hektar menjadi 4,531 ton per hektar. Namun perubahan dari produktivitas padi di kabupaten Nunukan variatif, tergantung keadaan iklim berikut sarana produksi pertanian di wilayah tersebut. Berikut pada Tabel 7 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah Tahun 2010 - 2011

Tabel 7. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah Tahun 2010 - 2011

No		Luas Panen		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	Nunukan	1.219	1.090	4.686	4.607	5.712	5.022
2	Nunukan Selatan						
3	Sebatik Induk	2.057	2.044	4.780	4.789	9.832	9.788
4	Sebatik Timur	-	-	-	-	-	-
5	Sebatik Tengah						
6	Sebatik Utara						
7	Sebatik Barat	200	284	4.022	4.219	804	1.181
8	Simenggaris						
9	Sebuku	499	384	8.682	4.222	1837	1.621
10	Tulid Onsoi						
11	Sembakung	230	120	3.942	4.122	907	495
12	Sembakung Atulai						
13	Lumbis	3.156	4.240	4.632	4.605	14.620	19.527
14	Lumbis Ogong						
15	Krayan	1.056	1.650	4.122	4.122	4.353	6.802
16	Krayan Selatan						
	Jumlah	8.417	9.812	4.522	4.551	38.605	44.436

Sumber : Dispertanak Nunukan, 2012.

Khususnya perkembangan padi ladang pada tahun 2011, untuk luas panen 2.385 ha dengan produktivitas terendah 2,243 ton/ha dan produktivitas tertinggi sekitar 3.69 ton/ha dengan produksi padi sekitar 3.691 ton GKP.

Tabel 8 Perkembangan luas panen, Produktivitas Padi Ladang Tahun 2010 - 2011.

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	Nunukan	75	142	23,35	24,48	175	348
2	Nunukan Selatan						
3	Sebatik Induk	82	82	22,45	24,56	184	201
4	Sebatik Timur	-	-	-	-	-	-
5	Sebatik Tengah						
6	Sebatik Utara						
7	Sebatik Barat	575	318	22,42	25,48	1.404	810
8	Simenggaris						
9	Sebuku	583	859	24,55	25,66	1.431	2.204
10	Tulid Onsoi						
11	Sembakung						
12	Sembakung Atulai						
13	Lumbis	1.025	53	24,65	23,15	2.527	123
14	Lumbis Ogong						
15	Krayan	45	2	23,15	23,15	104	5
16	Krayan Selatan						
	Jumlah	2.385	1.456	24,43	25,35	2.852	3.691

2) Palawija

Komoditas palawija adalah salah satu komoditas yang menunjang pendapatan petani di kabupaten Nunukan. Sebab selain dikonsumsi sendiri juga dikomersialkan sebagai salah satu komoditas dengan nilai ekonomi cukup tinggi. Namun karena para petani pembudidaya palawija tidak memiliki modal yang cukup maka nilai tambah dari hasil budidayanya belum tampak dengan baik. Meski demikian perkembangan beberapa komoditas palawija khusus jagung, kedelai, ketela, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau mengalami kenaikan dari tahun 2010.

Tabel. 9 Perkembangan Luas panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija Tahun 2010 - 2011

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	Ubikayu	604	678	2,033	2,042	1228	1.385
2	Jagung	1.244	911	13,595	13,600	16912	12.358
3	Ubijalar	192	267	8,857	8,9	1700	2.366
4	Kacang Tanah	191	201	1,024	1,086	196	209
5	Kacang Hijau	106	84	1,005	0,997	107	84
6	Kedelai	63	91	1,053	1,051	66	96
7	Sorgum	-	-	-	-	-	-
8	Gandum	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.400	2.232	27,567	28,00	20209	16.498

Sumber : BKPPPD, 2012

3) Sayuran

Ketersediaan sayuran di Kabupaten Nunukan sudah mencapai swasembada, khusus komoditas sayuran dataran rendah bahkan sudah mampu mengirim ke beberapa wilayah luar Nunukan seperti ke Tarakan atau Tawau yaitu lombok, timun dan paria. Namun untuk jenis sayuran dataran tinggi masih didatangkan dari Jawa dan

Sulawesi, hal ini karena kecamatan Nunukan tidak memiliki wilayah dataran tinggi yang secara khusus membudidayakannya.

Tabel 10. Luas Panen sayuran, produktivitas dan produksi di Tahun 2011

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	Bawang merah	13	3	7,78	1,78	101	535
2	Bawang putih	-	-	-	-	-	-
3	Bawang daun	65	51	8,22	2,77	534	8860
4	Buncis	131	96	15,22	152	1994	10309
5	Bayam	206	181	2,82	135	581,8	11583
6	Cabe besar	113	145	3,09	310	349,1	18309
7	Cabe rawit	135	143	4,34	257	585,7	2488
8	Kacang panjang	144	197	3,54	261	687,7	18070
9	Kangkung	196	169	10,87	273	2129,9	28948
10	Ketimun	166	147	13,04	261	2164,5	24020
11	Labusiam	59	52	25,22	51	1488	4500
12	Sawi	173	164	11,59	715	2605,3	18579
13	Seledri	-	-	-	-	-	-
14	Terong	147	105	10,84	-	1594	12773
15	Tomat	128	120	13,15	117	1683,8	10652
	Jumlah	1426	1573			176,25	192026

Sumber : BKPPPD, 2012

4) Buah – buahan

Perkembangan luas tanam komoditas buah – buahan mengalami kemajuan yang cukup signifikan, hal ini karena adanya bantuan pembudidayaan lewat dana APBN maupun APBD, seperti rambutan, mangga, durian, dan pisang. Namun dalam perkembangannya komoditas ini bersaing dengan keinginan masyarakat yang mau mengembangkan tanaman kelapa sawit, akibatnya seringkali terjadi hambatan di lapangan dalam hal pembudidayaan. Diantaranya untuk lahan yang kesesuaiannya tanaman buah – buahan dikonversi jadi lahan tanaman kelapa sawit

Tabel 11. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Buah – buahan
Tahun 2010- 2011

No	Komoditas	Luas Panen (Pohon)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	Durian	2068	9227	89	-	179	4103
2	Duku / Langsung	-	2103	-	-	-	1096
3	Pisang	721381	128651	16	-	8398	28335
4	Cempedak	-	-	-	-	-	-
5	Nangka	14483	22798	46	-	669	10314
6	Sukun	2246	3072	33	-	74	789
7	Rambutan	1653	6714	70	159	256	10711
8	Mangga	11816	18236	30	-	302	6157
9	Keprok/Siam	43208	18289	31	-	1313	8558
10	Jeruk Besar	809	637	52	231	41	1474
11	Manggis	22	-	32	-	1	-
12	Sirsak	1176	728	21	-	44	94
13	Semangka	-	56	-	17,169	-	9615
14	Melon	-	23	-	23,04	-	530
15	Nanas	146604	125175	2	-	282	3665
16	Pepaya	9477	10727	49	-	470	3544
17	Belewah	-	2	-	640	-	1280
	Jumlah	954943	346438	-	-	12029	90265

Sumber : BKPPPD, 2012

5) Biofarmaka dan Tanaman Hias

Tanaman obat – obatan dan tanaman hias dalam tahun 2010

mulai ada perubahan peningkatan hal ini ditandai adanya anemo

masyarakat dalam mencitai puspa pada pameran bulan Nopember

yang diadakan oleh pihak Bapedalda. Sedangkan tanaman obat –

obatan yang kita lihat semakin banyak masyarakat mengembangkan

di pekarangan sebagai tanaman obat dan gizi keluarga (toziga)

Tabel 12. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Biofarmaka Tahun 2012

No	Komoditas	Kabupaten Nunukan					
		Luas Panen (M ²)		Produktivitas (Kg/M ²)		Produksi (Kg)	
		2010 / 2011		2010 / 2011		2010 / 2011	
1	Jahe	77884	133.620	1,03	0,81	80,087	40,871
2	Temu Lawak	717	923	1,71	0,80	1,227	831
3	Lengkuas	7765	4.062	3,35	2,47	25.980	10.027
4	Kunyit	2603	4.330	16,7	0,50	4.351	2.161
5	Kencur	2237	1.931	0,75	0,41	1.687	793
6	Lempuyang	168	257	2,08	2,39	350	615
7	Temu ireng	466	728	1,09	0,83	507	607
8	Bangle	-	-	-	-	-	-
9	Kejibeling	511	1.012	0,24	0,40	123	401
10	Dringo	130	145	0,18	0,41	23	60
11	Kapulaga	482	920	2,00	0,38	964	345
12	Mengkudu	1067	54	15	28,24	16.005	1.525
13	Temu Kunci	415	805	0,81	0,41	338	350
14	Mahkota Dewa	-	-	-	-	-	-
15	Kejibeling	-	-	-	-	-	-
16	Kumis kucing	-	-	-	-	-	-
17	Binahong	-	-	-	-	-	-
18	Putrowali	-	-	-	-	-	-
19	Daun Dewa	-	-	-	-	-	-
20	Sambiloto	100	625	1,51	0,30	151	188
21	Kelor	-	-	-	-	-	-
Jumlah		94945	148.684	1,39	0,40	131,793	587.54

Sumber : BKPPD, 2013

h. Potensi Sumberdaya Perkebunan

Pengembangan produksi dan sarana prasarana perkebunan, diarahkan pada kemitraan dan deversifikasi perkebunan di wilayah khusus daerah perbatasan.

1) Luas Areal

Terdapat lima jenis komoditas utama perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Nunukan yaitu kelapa sawit, kakao, lada, kelapa, dan kopi. Rincian luas tanaman rakyat bidang perkebunan di Nunukan pada tahun 2010/2011 adalah 8.568 hektar, untuk pola PIR seluas 1.370,14 hektar, sedangkan pola PBS seluas 65.772,65 hektar.

2) Produksi

Perkembangan luas pertanaman komoditi perkebunan di Nunukan relatif mengalami stagnasi kecuali kelapa sawit yang mengalami perkembangan sangat pesat, hal ini karena ada keterlibatan pihak swasta yang mendukung program pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan dengan pola bagi hasil.

Tabel 13. Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Pada Tahun 2012

No	Komoditi	Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa	2.734,30	7.869,37
2	Kelapa Sawit	9.754,40	6134,25
3	Kopi	3.449,50	233,30
4	Kakao	13.034,00	18.095,00
5	Lada	209,00	22,00
6	Cengkeh	22,00	2,35
7	Kemiri	64,60	8,75
8	Kapuk	16,67	11,26
9	Kayu manis	4,00	1,50
10	Panili	77,75	9,75
11	Melino	18,30	2,79
12	Jambu mete	11,00	5,00
13	Pala	5,00	1,00
14	Aren	11,00	0,07
15	Tebu	87,00	13,50
16	Jahe		5.470,20
Jumlah			

Sumber : BKPPD, 2013

i. Potensi Sumberdaya Peternakan

Fokus pembangunan sub sektor peternakan adalah meningkatkan ketahanan pangan berbasis ternak sebagai penyedia kebutuhan protein hewani guna pencapaian swasembada daging. Dalam menunjang peningkatan produksi maupun produktivitas ini telah banyak upaya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan daerah melalui pengembangan ternak gaduh dan pelaksanaan inseminasi buatan pada ternak.

j. Keadaan Potensi Kelautan dan Perikanan

Wilayah kelautan Kabupaten Nunukan meliputi perairan di Selat Sulawesi hingga laut Cina Selatan, termasuk di dalamnya blok Ambalat, hingga perbatasan dengan perairan Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan dan Muara Sebuku dan Selat Sebatik.

Kegiatan budidaya yang dikembangkan saat ini adalah budidaya tiram yang di kembangkan di Selat Nunukan dan muara Sekapal serta budidaya rumput laut yang telah berkembang sejak pancawarsa belakangan ini. Untuk budidaya rumput laut telah mampu meningkatkan pendapatan petani/nelayan secara signifikan, meski harga ditingkat petani masih labih dan fluktuatif.

Unit kegiatan perikanan laut masih berkisar pada kegiatan penangkapan, baik yang tradisional maupun semi moderen, sedangkan teknik penangkapan moderen didominasi oleh pengusaha – pengusaha besar. Pada sektor budidaya ikut berkembang budidaya bandeng dan udang, demikian juga pembudayaan ikan air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel 14. Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Pada Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
		2011	2011
1	Nunukan	3.901,32	20,619.92
2	Nunukan Selatan	636,81	75,412.15
3	Sebatik Induk	176.69	12,966.51
4	Sebatik Timur		
5	Sebatik Tengah		
6	Sebatik Utara		
7	Sebatik Barat	274.85	11.526.29
8	Simenggaris		
9	Sebuku	28.90	14.40
10	Tulid Onsoi		
11	Sembakung	15.359,78	3,592.02
12	Sembakung Atulai		
13	Lumbis	6,62	
14	Lumbis Ogong		
15	Krayan	74,30	
16	Krayan Selatan		
	Jumlah		

Sumber : BKPPPD, 2013

k. Keadaan Potensi kehutanan

Hutan terluas di Kabupaten Nunukan berada di wilayah barat Lumbis, Krayan dan Krayan selatan. Wilayah tersebut masih memiliki kawasan hutan yang sangat luas, hampir separuh luas wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan luas kawasan hutan yang sedemikian hingga didalamnya terkandung potensi yang cukup besar diantaranya kayu, gaharu, rotan, damar, maupun hasil - hasil hutan non kayu lainnya.

Bahkan Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan telah menjadi daerah Taman Nasional Kayan Mentarang yang wilayahnya mulai dari hulu sungai Kayan (Long Pujungan) Kabupaten Malinau. Di dalam kawasan hutan lindung tersebut masih terdapat fauna maupun plasma

nutfah berbagai jenis tanaman yang patut mendapatkan perhatian untuk menjaga kelestariannya. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan WWF guna menjaga kelestarian kawasan tersebut, diantaranya melibatkan peran serta masyarakat adat setempat.

Data tahun 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa luas kawasan budidaya non kehutanan 475.490 hektar dan luas kawasan budidaya kehutanan adalah 453.890 hektar, kawasan hutan lindung sekitar 162.150 hektar sedangkan luas taman nasional 334.973 hektar, sehingga luas total kawasan hutan di Kabupaten Nunukan adalah 1.426.504 hektar.

I. Kelembagaan

1) Kelembagaan Petani

Kelembagaan petan/nelayan perlu dibina sebab melalui wadah lembaga tersebut akan mudah dilaksanakannya pembinaan dan penyuluhan baik oleh pemerintah yang akan memberikan arahan dan kontribusi mewujudkan SDM petani/nelayan yang handal maupun oleh petugas penyuluh yang akan mendampingi petani atau kelompok tani serta gabungan kelompok tani yang telah mampu berkembang serta memecahkan berbagai masalah yang ada di lingkup petani/nelayan anggotanya.

Dengan adanya pembinaan dan penyuluhan tersebut diharapkan kelak akan tumbuh kepemimpinan dalam masyarakat yang mampu tumbuh kesadaran dan kemampuan pada diri petani dan masyarakat luas sehingga menghasilkan kepemimpinan yang kelak diharapkan

mampu membawa pelaku utama dan pelaku usaha lebih meningkat pendapatan dan sejahtera dalam kemakmuran.

Tabel 15. Data Kelembagaan Petani/Nelayan Pada Tahun 2012

No	Kecamatan	Jenis Kelembagaan Petani/Nelayan		
		Poktan	Gapoktan	Jumlah
1	Nunukan	79	1	80
2	Nunukan Selatan	50	3	53
3	Sebatik	53	4	57
4	Sebatik Timur			
5	Sebatik Tengah			
6	Sebatik Utara			
7	Sebatik Barat	46	4	50
8	Simenggaris			
9	Sebuku			
10	Tulid Onsoi			
11	Sembakung	104	20	124
12	Sembakung Atulai			
13	Lumbis	53	19	72
14	Lumbis Ogong	20	8	28
15	Krayan	72	29	101
16	Krayan Selatan			
	Jumlah			

Sumber : BKPPPD, 2013

2) Kelembagaan Penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Nunukan dari 16 kecamatan baru memiliki 9 (sembilan) Balai Penyuluhan Pertanian yang tergabung ke 6 (enam) UPT, sehingga dalam satu UPT ada yang mengelola dua BPP atau dua kecamatan. Jumlah personil penyuluh di pada setiap BPP berbeda – beda sesuai dengan potensi wilayah dan ketersediaan PPL. Untuk satu kecamatan idealnya terdapat satu BPP atau UPT BP3K yang dipimpin seorang kepala UPT BP3K atau seorang koordinator BPP dan beberapa orang penyuluh ahli (sarjana) sebagai koordinator pokja pertanian,

Komposisi penyuluh di Kabupaten Nunukan meliputi penyuluh PNS 106 orang dan THL TBPP (PPL honorer) dari Kementerian Pertanian sebanyak 36 orang; distribusi tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821/SK-07/BKDD-III/VII/2012.

Menilik jumlah personil yang ada saat ini dibandingkan dengan jumlah desa atau kelurahan yang ada masih belum mencukupi, disatu sisi kondisi geografi wilayah Nunukan dan domisili desa – desanya dibandingkan dengan prasarana dan sarana yang ada masih sangat memprihatinkan. UPT BP3K yang ada belum memiliki kelengkapan prasarana dan sarana yang diperlukan, baik untuk mengelola lahan maupun untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

2. Gambaran Umum Penyelenggaraan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)

SL-PTT merupakan Sekolah Lapangan bagi petani dalam menerapkan berbagai teknologi usahatani melalui penggunaan input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi sehingga mampu menghasilkan produktivitas tinggi untuk menunjang peningkatan produksi secara berkelanjutan.

Dalam SL-PTT petani dapat belajar langsung di lapangan melalui pembelajaran dan penghayatan langsung (mengalami), mengungkapkan, menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan / mengalami kembali), menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam

Melalui penerapan SL-PTT petani akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia (varietas, tanah, air dan sarana produksi) secara terpadu dalam melakukan budidaya di lahan usahatannya berdasarkan kondisi spesifik lokasi sehingga petani menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahatannya dalam rangka peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah.

a. Prinsip-prinsip dalam Tahapan Penerapan SL-PTT

1) Prinsip-prinsip PTT

- a) Terpadu : PTT merupakan suatu pendekatan agar sumber daya tanaman, tanah dan air dapat dikelola dengan sebaikbaiknya secara terpadu.
- b) Sinergis : PTT memanfaatkan teknologi pertanian terbaik, dengan memperhatikan keterkaitan yang saling mendukung antar komponen teknologi.
- c) Spesifik lokasi : PTT memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik maupun sosial budaya dan ekonomi petani setempat.
- d) Partisipatif : berarti petani turut berperan serta dalam memilih dan menguji teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat dan kemampuan petani melalui proses pembelajaran dalam bentuk laboratorium lapangan.

b. Tahapan Penerapan PTT

- 1) Langkah pertama penerapan PTT adalah pemandu lapangan bersama petani melakukan Pemahaman Masalah dan Peluang (PMP) atau

Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP). Identifikasi masalah peningkatan hasil di wilayah setempat dan membahas peluang mengatasi masalah tersebut, berdasarkan cara pengelolaan tanaman, analisis iklim/curah hujan, kesuburan tanah, luas pemilikan lahan, lingkungan sosial ekonomi.

- 2) Langkah kedua adalah merakit berbagai komponen teknologi PTT berdasarkan kesepakatan kelompok untuk diterapkan di lahan usahatannya.
- 3) Langkah ketiga, penyusunan RUK berdasarkan kesepakatan kelompok.
- 4) Langkah keempat, penerapan PTT.
- 5) Langkah kelima, pengembangan PTT ke petani lainnya.

c. Komponen Teknologi Unggulan PTT Padi

Komponen teknologi dasar dan pilihan disesuaikan spesifik wilayah setempat yang paling tepat diterapkan. Komponen teknologi dasar terdiri dari :

- 1) Varietas unggul baru, inbrida, atau hibrida
- 2) Benih bermutu dan berlabel
- 3) Pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami kesawah atau dalam bentuk kompos
- 4) Pengaturan populasi tanaman secara optimum
- 5) Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah
- 6) Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dengan pendekatan PHT (Pengendalian Hama Terpadu)

Komponen teknologi pilihan terdiri dari :

- 1) Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam
- 2) Penggunaan bibit muda (< 21 hari)
- 3) Tanam bibit 1 – 3 batang per rumpun
- 4) Pengairan secara efektif dan efisien
- 5) Penyiangan dengan landak atau gasrok
- 6) Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok

d. Peran Komponen Teknologi PTT

Penggunaan benih varietas unggul bermutu akan menghasilkan daya perkecambahan yang tinggi dan seragam, tanaman yang sehat dengan perakaran yang baik, tanaman tumbuh lebih cepat, tahan terhadap hama dan penyakit, berpotensi hasil tinggi dan mutu hasil yang lebih baik.

Penanaman yang tepat waktu, serentak dan jumlah populasi yang optimal dapat menghindari serangan hama dan penyakit, menekan pertumbuhan gulma, terhindar dari kelebihan dan kekurangan air, memberikan pertumbuhan tanaman yang sehat dan seragam serta hasil yang tinggi.

Pemberian pupuk secara berimbang berdasarkan kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara tanah dengan prinsip tepat jumlah, jenis, cara, dan waktu aplikasi sesuai dengan jenis tanaman akan memberikan pertumbuhan yang baik dan meningkatkan kemampuan tanaman mencapai hasil tinggi.

Pemberian air pada tanaman secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah merupakan factor penting bagi pertumbuhan dan hasil tanaman yaitu air sebagai pelarut sekaligus pengangkut hara dari tanah ke bagian tanaman. Kebutuhan akan air disetiap stadia tanaman berbeda-beda, pemberian air secara tepat akan meningkatkan hasil dan menekan terjadinya stres pada tanaman yang diakibatkan karena kekurangan dan kelebihan air.

Perlindungan tanaman dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mengendalikan serangan OPT tanaman dengan meminimalkan kerusakan atau penurunan produksi akibat serangan OPT. Pengendalian dilakukan berdasarkan prinsip dan strategi Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Khususnya pengendalian dengan pestisida merupakan pilihan terakhir bila serangan OPT berada diatas ambang ekonomi. Penggunaan pestisida harus memperhatikan jenis, jumlah dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan resistensi atau resistensi OPT atau dampak lain yang merugikan lingkungan.

Penanganan panen dan pasca panen akan memberikan hasil yang optimal jika panen dilakukan pada umur dan cara yang tepat yaitu tanaman dipanen pada masak fisiologis berdasarkan umur tanaman, kadar air dan penampakan visual hasil sesuai dengan diskripsi varietas. Pemanenan dilakukan dengan system kelompok yang dilengkapi dengan peralatan dan mesin yang cocok sehingga menekan kehilangan hasil. Hasil panen dikemas dalam wadah dan disimpan ditempat

penyimpanan yang aman dari OPT dan merusak hasil lainnya sehingga mutu hasil tetap terjaga dan tidak tercecer.

e. Pemilihan Teknologi PTT

Komponen teknologi yang dipilih dan diterapkan oleh petani dalam melaksanakan SL-PTT adalah komponen teknologi PTT. Perakitan komponen teknologi budidaya dilakukan dengan cara penelusuran setiap alternatif komponen teknologi, jumlah yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi, maka antar komponen teknologi dan aspek lingkungan dapat disinergiskan. Pemilihan teknologi budidaya yang optimal dapat dilakukan dengan memaksimalkan komponen teknologi yang saling sinergis dan meminimalkan komponen teknologi yang saling antagonis (berlawanan) sehingga diperoleh teknik budidaya dalam pendekatan PTT yang spesifik lokasi.

Kombinasi komponen teknologi yang digunakan pada lokasi tertentu dapat berbeda dengan lokasi lainnya, karena beragamnya kondisi lingkungan pertanaman. Setiap teknologi dan kombinasi teknologi yang sedang dikembangkan pada suatu lokasi dapat berubah sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengalaman petani di lokasi setempat. Untuk menetapkan paket teknologi SL-PTT yang akan dilaksanakan di setiap unit agar dikonsultasikan dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di masing-masing wilayah.

f. Keuntungan Penerapan Teknologi PTT

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil usahatani

2) Efisiensi biaya usahatani dengan penggunaan teknologi yang tepat untuk masing-masing lokasi.

3) Kesehatan lingkungan tumbuh pertanaman dan lingkungan kehidupan secara keseluruhan akan terjaga.

g. Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)

1) Model Pemberdayaan Petani Melalui SL-PTT

Pelaksanaan SL-PTT menggunakan sarana kelompok tani yang sudah terbentuk dan masih aktif. Kelompok tani yang dimaksud adalah kelompok tani yang dibentuk berdasarkan domisili atau hamparan, diusahakan yang lokasi lahan usahatannya masih dalam satu hamparan. Hal ini perlu untuk mempermudah interaksi antar anggota karena mereka saling mengenal satu sama lainnya dan tinggal saling berdekatan sehingga bila teknologi SL-PTT sudah diadopsi secara individu akan mudah ditiru petani lainnya.

Pertanaman di areal SL-PTT padi non hibrida dan gogo ditargetkan mampu menaikkan produksi sebesar 0,5 – 1 ton/ha dan di areal LL dalam SL-PTT ditargetkan mampu menaikkan produksi sebesar 1 – 1,5 ton/ha,

Luas satu unit SL-PTT adalah berkisar antara 10 – 25 ha, satu unit LL seluas minimal 1 ha. Areal yang digunakan sebagai unit SL-PTT mendapat bantuan benih dan areal yang digunakan sebagai unit LL akan mendapat bantuan benih, pupuk Urea, NPK dan pupuk Organik. sebagaimana terlihat dalam Gambar 3 berikut ini :

Gambar 3. Model Pemberdayaan Petani melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu



Mengingat bantuan pemerintah hanya berupa benih yang berasal dari BLBU (PSO), terdiri dari padi non hibrida seluas ± 25 ha tiap kelompok SL-PTT dan saprodi untuk 1 ha pada LL SL-PTT, maka penyediaan saprodi lainnya agar ditanggung secara swadana oleh anggota kelompok atau berasal dari sumber lainnya.

Tiap unit SL-PTT terdiri dari petani peserta yang berasal dari satu kelompok tani yang sama. Dalam setiap unit SL-PTT perlu ditetapkan seorang ketua peserta yang bertugas mengkoordinasikan aktivitas anggota kelompok, seorang sekretaris yang bertugas sebagai pencatat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada setiap pertemuan dan seorang bendahara yang bertugas mengurus masalah yang berhubungan dengan keuangan.

Untuk menjamin kelangsungan dinamika kelompok dalam kelas SL-PTT, perlu diusahakan paling tidak satu orang dari kelompok tani sebagai motivator yang mampu memberikan respon

yang cepat terhadap inovasi dan mampu mendorong anggota kelompok lainnya dapat memberikan respon yang sama.

Peserta SL-PTT akan mengadakan pengamatan bersama-sama di petak percontohan / Laboratorium Lapangan, mendiskripsikan dan membahas temuan-temuan lapangan. Pemandu Lapangan berperan sebagai fasilitator untuk mengarahkan jalannya diskusi kelompok.

Peserta SL-PTT wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi yang sesuai spesifik lokasi mulai dari pengolahan tanah, budidaya, penanganan panen dan pasca panen. Pada setiap tahapan pelaksanaan, petani peserta diharapkan melakukan serangkaian kegiatan yang sudah direncanakan dan dijadwalkan, baik dipetak LL maupun dilahan usaha taninya.

Pendampingan Kegiatan SL-PTT oleh Pemandu Lapangan (PP, POPT, PBT) dan Peneliti, Pemandu Lapangan berperan sebagai :

- a) Pemandu yang paham terhadap permasalahan, kebutuhan dan kekuatan yang ada di lapangan dan desa.
- b) Dinamisator proses latihan SL-PTT sehingga menimbulkan ketertarikan dan lebih menghidupkan latihan.
- c) Motivator yang kaya akan pengalaman dalam berolah tanam dan dapat membantu membangkitkan kepercayaan diri para peserta SL-PTT

- d) Konsultan bagi petani peserta SL-PTT untuk mempermudah menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan usahatani setelah kegiatan SLPTT selesai.

2) Penentuan Calon Lokasi dan Calon Petani / Kelompok tani SL-PTT

Pemilihan penempatan lokasi SL-PTT dengan prioritas luasan areal memenuhi syarat, produktivitasnya masih berpotensi untuk ditingkatkan dan petaninya responsif terhadap teknologi. Pemilihan letak petak LL yang berada didalam areal SL-PTT terpilih dengan prioritas pertimbangan terletak dibagian pinggir areal SL-PTT sehingga berbatasan langsung dengan areal diluar SL-PTT diharapkan penerapan teknologi SL-PTT mudah dilihat dan ditiru oleh petani diluar SL-PTT.

a) Penentuan Calon Lokasi

- (1) Lokasi dapat berupa persawahan yang beririgasi, sawah tadah hujan, lahan kering dan pasang surut yang produktivitasnya masih dapat ditingkatkan.
- (2) Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas dari bencana kekeringan, banjir dan sengketa.
- (3) Unit SL-PTT, diusahakan agar berada dalam satu hamparan yang strategis dan mudah dijangkau petani serta dipasang papan pelaksanaan SL/LL.
- (4) Letak Laboratorium Lapangan (LL) seluas minimal 1 ha, ditempat yang sering dilewati petani sehingga mudah dijangkau dan dilihat oleh petani sekitarnya.

b) Penentuan Calon Petani / Kelompok tani SL-PTT

- (1) Kelompok tani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah yang berdekatan.
- (2) Petani yang dipilih adalah petani aktif yang memiliki lahan ataupun penggarap/penyewa dan mau menerima teknologi baru.
- (3) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT.
- (4) Kelompok tani SL-PTT ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan / yang membidangi tanaman pangan Kabupaten / Kota.
- (5) Unit SL-PTT, diusahakan agar berada dalam satu hamparan yang strategis dan mudah dijangkau petani serta dipasang papan pelaksanaan SL/LL.
- (6) Letak Laboratorium Lapangan (LL) seluas minimal 1 ha, ditempat yang sering dilewati petani sehingga mudah dijangkau dan dilihat oleh petani sekitarnya.

c) Ketentuan Pelaksana SL-PTT

Ketentuan pelaksana SL-PTT sebagai berikut :

- (1) Lokasi SL-PTT diusahakan berada pada satu hamparan, mempunyai potensi peningkatan produktivitas dan anggota kelompok taninya responsif terhadap penerapan teknologi.
- (2) Luas satu unit SL-PTT padi non hibrida adalah + 25 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha.

- (3) Luas satu unit SL-PTT padi hibrida adalah + 10 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha.
- (4) Luas satu unit SL-PTT padi gogo adalah + 25 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha, namun jika keadaan tidak memungkinkan untuk SL-PTT padi gogo luasan satu unit SL 25 Ha dapat ditempatkan dalam beberapa lokasi minimal @ 5 Ha, serta unit LL ditempatkan pada lokasi yang paling strategis.
- (5) Luas satu unit SL-PTT jagung hibrida adalah + 15 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha.
- (6) Luas satu unit SL-PTT Kedelai adalah + 10 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha.
- (7) Luas satu unit SL-PTT kacang tanah adalah $\pm$ 10 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas 1 ha.
- (8) Luas satu unit SL-PTT diatas (poin 2 s/d 7) dapat disesuaikan pada kondisi luasan setempat, dengan ketentuan :
 - (a) Luasan setiap unit SL-PTT bisa bervariasi disesuaikan dengan kondisi setempat namun Total luasan dan unit SL-PTT tidak boleh kurang dari yang dibiayai.
 - (b) Total Luasan dan unit SL-PTT bisa lebih dari yang dibiayai. Kelebihan luasan ataupun unit SL-PTT ditanggung anggaran lain ataupun swadana petani.
 - (c) Luas areal LL bisa lebih dari 1 ha apabila dananya masih memungkinkan tetapi tidak boleh kurang dari 1 ha.

(9) Peserta tiap unit SL-PTT idealnya terdiri dari 15 – 25 petani yang berasal dari satu kelompok tani yang sama, namun jumlah peserta dapat disesuaikan dengan luas pemilikan lahan serta situasi dan kondisi setempat.

(10) Memiliki Pemandu Lapangan.

d) Persyaratan Kelompok tani pelaksana SL-PTT

(1) Kelompok tani tersebut masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

(2) Telah menyusun Rencana Usaha Kelompok

(3) Kelompok tani penerima bantuan SL-PTT ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota.

(4) Kelompok tani peserta SL-PTT diutamakan yang belum pernah menerima bantuan SL-PTT tahun anggaran 2009 atau bantuan dari BLBU tahun 2009.

(5) Memiliki rekening yang masih berlaku / masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/ Bank Daerah) yang terdekat dan bagi Kelompok Tani yang belum memiliki, harus membuka rekening di bank.

(6) Rekening bank dapat berupa rekening bank setiap kelompok tani ataupun rekening bank gabungan kelompok tani (gapoktan). Jika menggunakan rekening gapoktan mekanisme pengaturan antar kelompok tani dan jumlah kelompok yang digabung rekeningnya ditentukan dan disesuaikan dengan

kondisi kabupaten setempat serta diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(7) Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan SL-PTT sesuai peruntukannya dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya.

(8) Bersedia menambah biaya pembelian benih unggul bersertifikat bilamana bantuan benih yang tersedia tidak mencukupi.

(9) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT.

e) Jumlah Bantuan SL-PTT

Jumlah bantuan benih yang diberikan kepada petani pelaksana SL-PTT termasuk areal Laboratorium Lapangan (LL) 1 ha, yaitu padi non Hibrida sebesar 25 kg/ha, dan untuk areal LL mendapat bantuan untuk pembelian pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik dan atau yang lain-lain.

f) Sumber Bantuan SL-PTT

(1) Bantuan benih untuk SL-PTT tahun 2012 melalui satu sumber yaitu BLBU dari PSO (Public Service Obligation)/dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero)

(2) Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi bantuan benih BLBU SL-PTT 2012 didalam DIPA TP tahun 2012, hanya dialokasikan dana untuk pembelian saprodi LL diluar benih

atau tidak termasuk benih, pertemuan kelompok, dan pelatihan pemandu lapang.

g) Mekanisme Pelaksanaan SL-PTT

(1) Persiapan SL-PTT

- (a) Pertemuan persiapan dengan tokoh formal dan informal serta petani calon peserta sebelum pelaksanaan SL-PTT untuk membahas : analisis masalah, analisis tujuan, rencana kerja peningkatan produktivitas padi.
- (b) Menetapkan langkah-langkah yang menyangkut tujuan, hasil diharapkan dan metode pembelajaran SL-PTT yang dilakukan bersama sebagai suatu kesepakatan.
- (c) Membuat jadwal pertemuan SL-PTT minimal dua mingguan dengan menentukan tempat, hari dan waktu serta materi pertemuan secara bersama-sama.
- (d) Menentukan 1 (satu) hari sebagai “hari lapang petani” untuk memasyarakatkan dan mendeseminasikan penerapan teknologi budidaya melalui SL-PTT kepada kelompok tani dan petani sekitarnya.
- (e) Menentukan letak petak LL yang diusahakan di tempat yang paling strategis yaitu dibagian pinggir areal SLPTT sehingga berbatasan langsung dengan areal diluar SL-PTT dan berada didekat jalan / lintasan sehingga penerapan teknologi mudah dilihat dan ditiru oleh petani diluar SL-PTT.

- (f) Menyiapkan pengelolaan usahatani di petak LL secara bersama-sama sesuai dengan tahapan budidaya masing-masing komoditi dengan harapan dapat diterapkan di usahatannya masing – masing.

(2) Mengorganisasikan Kelas SL-PTT

Kegiatan pengorganisasian kelas SL-PTT dimaksudkan untuk membentuk organisasi kelompok petani peserta SLPTT dengan langkah-langkah sbb :

- (a) Memilih satu orang petani sebagai ketua kelas SL-PTT yang berfungsi sebagai motivator sekaligus bertugas mengkoordinasikan kegiatan di kelas SL-PTT.
- (b) Memilih satu orang petani sebagai sekretaris kelas SLPTT yang berfungsi sebagai pencatat kegiatan – kegiatan di kelas SL-PTT.
- (c) Memilih satu orang petani sebagai bendahara kelas SLPTT yang bertugas mengurus masalah yang berkaitan dengan keuangan kelompok.
- (d) Mewajibkan semua peserta kelas SL-PTT untuk mengadakan pengamatan bersama-sama dan membahas temuan Lapangan sesuai dengan topik-topik pengajaran dalam SL-PTT.

(3) Menerapkan Metode Belajar Orang Dewasa

Kegiatan belajar dalam SL-PTT dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) Peserta SL-PTT memilih materi sesuai dengan kebutuhan teknologi spesifik lokasi.
- (2) Memacu peserta untuk berperan aktif dalam berdiskusi kelompok ataupun kegiatan lain dalam SL-PTT.
- (3) Proses belajar melalui pengalaman, dimulai dengan penghayatan langsung (pengamatan langsung), diikuti dengan pengungkapan pengalaman, pengkajian hasil dan pengambilan kesimpulan.
- (4) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan
 Kegiatan suasana belajar yang menyenangkan dalam SL-PTT ditujukan untuk mengembalikan perhatian peserta pada proses belajar yang sedang berlangsung dalam SL-PTT dengan langkah-langkah antara lain :
 - (a) Meminta beberapa peserta menceritakan pengalaman-pengalaman yang lucu / berkesan dalam hidupnya.
 - (b) Pemandu Lapangan dapat menceritakan humor-humor segar sehingga suasana belajar menjadi hidup kembali.
- (5) Menghidupkan dinamika kelompok
 Kegiatan dinamika kelompok dalam SL-PTT ditujukan untuk menjadikan peserta saling mengenal ciri dan sifat masing-masing sehingga dapat akrab satu dengan yang lainnya dalam SL-PTT dengan langkah-langkah sbb :
 - (a) Melakukan permainan - permainan yang dapat menciptakan keakraban dan memberikan pengalaman bagi

peserta dalam tampil didepan forum ataupun didepan banyak orang.

- (b) Melakukan olahraga bersama baik yang bersifat tim ataupun individual yang mampu menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan.

(6) Monitoring dan evaluasi oleh Pemandu Lapangan

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam SL-PTT ditujukan untuk mengikuti, mengetahui kemajuan, pencapaian tujuan ataupun sasaran serta memberikan umpan balik upaya-upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam SL-PTT dengan langkah-langkah antara lain :

- (a) Menilai tingkat partisipasi peserta pada setiap periode maupun selama periode kegiatan dari tingkat kehadiran maupun pencapaian materi.
- (b) Membandingkan ketepatan penerapan teknologi oleh peserta antara petunjuk dengan praktek Lapangan dalam LL.
- (c) Membandingkan perkembangan tingkat pemahaman dan ketrampilan peserta sebelum dengan sesudah mengikuti kegiatan.
- (d) Menyusun pertanyaan berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan Lapangan yang berkaitan dengan penerapan teknologi budidaya.

- (e) Pertanyaan diberikan secara tertulis atau lisan kepada peserta sebelum dan sesudah melakukan kegiatan.

(7) Membuat pelaporan oleh Pemandu Lapangan

Kegiatan pelaporan dalam SL-PTT ditujukan untuk memberikan laporan hasil kegiatan selama pelaksanaan SL-PTT dengan langkah – langkah antara lain :

- (a) Merekap kehadiran peserta selama pelaksanaan SL-PTT.
- (b) Mencatat topik-topik yang menarik perhatian peserta.
- (c) Mencatat kesulitan-kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SL-PTT meliputi metode, bahan, pengorganisasian peserta, waktu, administrasi dll.
- (d) Menilai daya serap peserta terhadap materi yang telah disampaikan dalam pelaksanaan SL-PTT.
- (e) Memberikan saran perbaikan dari segi metode, bahan, pengorganisasian peserta, waktu, administrasi dll.
- (f) Mencatat hasil-hasil kegiatan pelaksanaan SL-PTT khususnya dalam petak LL,
- (g) Mengisi form laporan sebagaimana terlihat pada Lampiran 5. yang tersedia dalam buku Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT).

(8) Pertemuan – Pertemuan Kelompok SL-PTT

Pertemuan-pertemuan dalam SL-PTT diharapkan 8 kali pertemuan, oleh karena itu perlu dijadwalkan secara periodik

dengan waktu pertemuan dirundingkan bersama petani peserta sehingga dapat dihadiri dan tidak mengganggu / merugikan waktu petani.

Pertemuan kelompok dilakukan oleh pelaksana SL-PTT, tempat pertemuan dilokasi pelaksana SL-PTT. Peserta pertemuan adalah petani peserta dipandu oleh Pemandu Lapangan. Dalam Pertemuan kelompok ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu : 1). Materi pertemuan dan 2). Kegiatan Lapangan.

(1) Materi pertemuan kelompok antara lain :

- (a) Teknik pengolahan tanah yang disesuaikan dengan tipologi lahan dan komoditi yang akan ditanam.
- (b) Penanaman dengan memilih benih atau bibit yang baik, jarak tanam yang tepat, jumlah benih/bibit per lubang yang sesuai.
- (c) Pemupukan dengan memperhatikan daya dukung tanah, keadaan tanaman, tepat jenis dan dosis yang spesifik lokasi, tepat waktu pemberian didasarkan pada fase pertumbuhan tanaman dan sifat pupuk, tepat cara yaitu dengan cara menyebar dan membenamkannya ke lapisan reduksi dan pemberian setelah dilakukannya penyiangan gulma.
- (d) Pengelolaan air didasarkan pada kebutuhan tanaman akan air, cara dan waktu yang tepat, ketersediaan sumber air dan jumlah air yang tersedia.

(e) Pengendalian OPT didasarkan pada prinsip PHT dengan melakukan tindakan pencegahan dan mengembangkan musuh alami yang terdapat di alam itu sendiri serta aplikasi kimiawi secara bijaksana bila serangan sudah di atas ambang pengendalian.

(f) Penanganan panen dan pasca panen dilakukan dengan cara yang tepat dan benar yaitu dengan mempertimbangkan kemasakan biji (masak fisiologis), ketepatan dalam penggunaan alat panen, pengemasan, pengangkutan dan penyimpanan sehingga mampu mengurangi kehilangan dan kerusakan hasil.

(g) Mendiskusikan pemecahan masalah yang ada serta langkah – langkah yang diambil selanjutnya dll.

(2) Kegiatan Lapangan

Kegiatan lapangan didampingi oleh Pemandu Lapangan antara lain :

(a) Kerja Lapangan

Kelompoktani peserta SL-PTT melakukan kerja lapangan di lokasi SL-PTT misalnya melakukan pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT dan gulma, pemanenan dll.

(b) Pengamatan Agroekosistem

Kelompoktani peserta SL-PTT melakukan pengamatan agroekosistem di lokasi SL-PTT antara lain pertumbuhan

tanaman, kecukupan air, kecukupan hara tanah, serangan

OPT, gulma dll.

- (c) Menggambar dan mempresentasikan kondisi Agroekosistem Kelompoknya peserta SL-PTT menggambar dan mempresentasikan kondisi Agroekosistem di lokasi SLPTT pada saat itu misalnya menggambar jumlah anakan per rumpun, jarak tanam, gulma dan hama yang ada, dll.

- (d) Diskusi Kelompok

Diskusi dimaksudkan untuk mengkaji hasil kerja lapangan, pengamatan pertanian, gambaran pertanian dll sehingga dapat disimpulkan kondisi pertanian pada saat itu sebagai dasar untuk menentukan langkah pengelolaan pertanian selanjutnya.

- (e) Topik khusus

Topik khusus dalam diskusi dipilih berdasarkan permasalahan pokok setempat yang dihadapi pada saat itu misalnya serangan OPT mengapa dan bagaimana mengatasinya dll.

- (f) Mempraktekan kegiatan SL-PTT pada lahan usahatannya Peserta SL-PTT diharapkan dapat langsung mempraktekan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dalam mengikuti SL-PTT pada lahan usahatannya.

h) Pengorganisasian dan Operasional SL-PTT

(1) Pengorganisasian SL-PTT

Pengorganisasian pelaksanaan SL-PTT bisa terkoordinasi dan terpadu mulai dari kelompok tani, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat maka dibentuk tim pembina tingkat pusat, tim Pembina dan tim teknis tingkat provinsi, tim pelaksana dan tim teknis tingkat kabupaten/kota.

Tim pembina tingkat pusat, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Tim pembina tingkat provinsi dan tim teknis tingkat provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang bersangkutan. Sedangkan tim pelaksana tingkat kabupaten/kota dan tim teknis tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Tim pembina dan tim teknis tingkat provinsi serta tim pelaksana dan tim teknis tingkat kabupaten melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan SLPTT di Pos Simpul Koordinasi (POSKO) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota sampai tingkat provinsi.

(a) Tim Pembina Tingkat Pusat

Tim Pembina Tingkat Pusat beranggotakan pejabat Eselon I terkait lingkup Departemen Pertanian dengan tugas antara lain

- (a.1) Penyusunan pedoman umum.
- (a.2) Sosialisasi SL-PTT.
- (a.3) Pengawasan penyaluran bantuan.
- (a.4) Pembinaan teknis budidaya dan administrasi.
- (a.5) Koordinasi dengan instansi terkait.
- (a.6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLPTT serta membantu pemecahan masalah yang dihadapi.

(b) Tim Pembina Tingkat Provinsi

Tim Pembina Tingkat Provinsi keanggotaannya dapat melibatkan berbagai Dinas/Badan, UPT, Instansi terkait lainnya serta perguruan tinggi, LSM dan sebagainya, dengan tugas antara lain :

- (b.1) Menetapkan kabupaten/kota pelaksana.
- (b.2) Menyusun petunjuk pelaksanaan.
- (b.3) Melakukan sosialisasi dan koordinasi ke Kabupaten pelaksana.
- (b.4) Melakukan pengawasan penyaluran bantuan.
- (b.5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (b.6) Melakukan pemantauan dan pengendalian serta membantu pemecahan masalah dilapangan.
- (b.7) Menyusun laporan pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Tim pembina tingkat provinsi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Teknis tingkat provinsi yang anggotanya antara lain adalah PL I, Peneliti dan unsur Dinas/Badan, UPT, Instansi terkait lainnya. Tugas tim teknis kabupaten/kota ditetapkan oleh tim Pembina tingkat provinsi.

(c) Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota keanggotaannya dapat melibatkan berbagai Dinas/Badan, UPT, Instansi terkait lainnya serta perguruan tinggi, LSM dan sebagainya, dengan tugas antara lain :

- (c.1) Sosialisasi program kepada petugas dan kelompok tani.
- (c.2) Menyusun petunjuk teknis.
- (c.3) Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelompok tani beserta RDKK dan RUK.
- (c.4) Mengusulkan kelompok tani yang memenuhi syarat untuk ditetapkan mendapat bantuan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (c.5) Melakukan pengawasan pengadaan/penyaluran bantuan.
- (c.6) Pembinaan/bimbingan kepada kelompok tani.
- (c.7) Monitoring dan evaluasi.
- (c.8) Menyusun laporan pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi.

Tim Pelaksana tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota yang anggotanya antara lain adalah PL II dan unsur-unsur BPP, KCD, UPT, dan Instansi terkait lainnya. Tugas tim teknis kabupaten/kota ditetapkan oleh tim pelaksana tingkat kabupaten/kota.

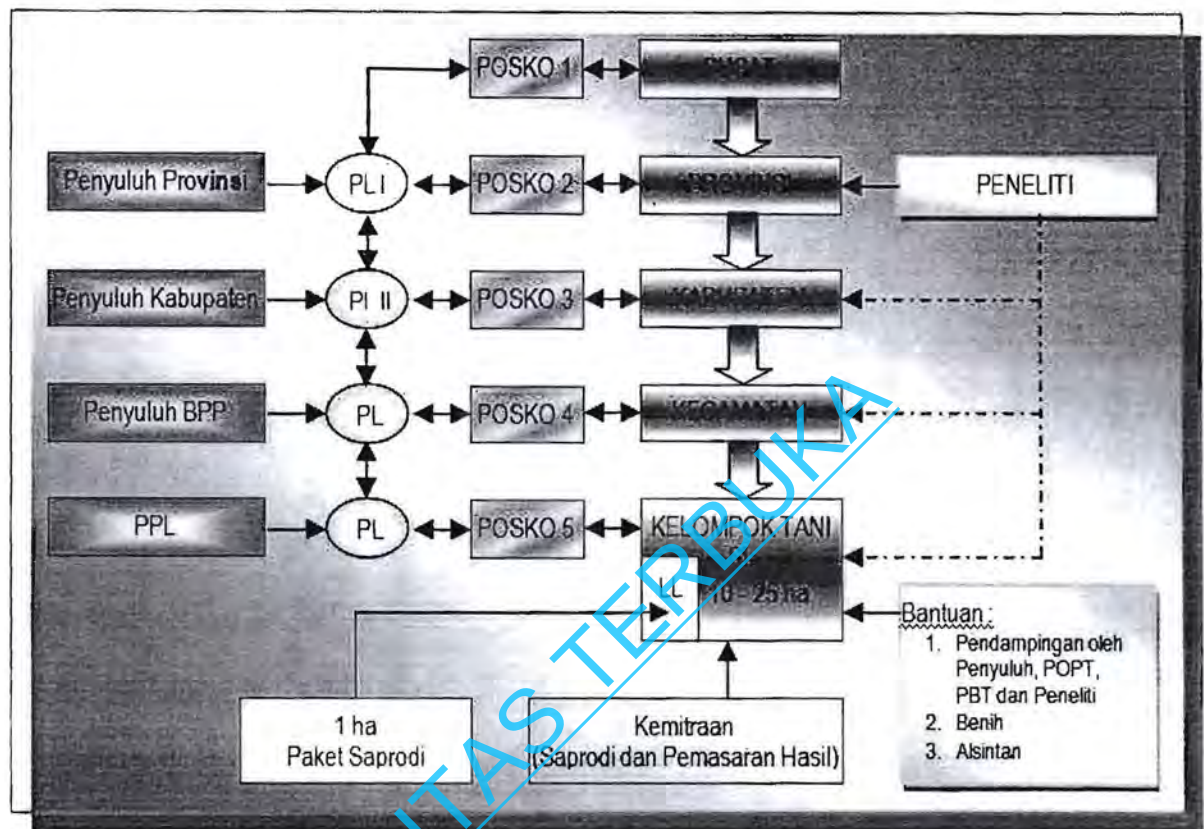
(2) Operasionalisasi SL-PTT

Penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT tingkat pusat adalah Direktur Jenderal Tanaman pangan, operasional pelaksanaan tingkat nasional SL-PTT Padi adalah Direktur Budidaya Serealia berkedudukan di POSKO I.

Penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT di tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, operasional pelaksanaan SL-PTT ditingkat provinsi adalah Kepala Sub Dinas yang membidangi produksi tanaman pangan berkedudukan di POSKO II.

Operasional SL-PTT dilakukan secara lengkap sebagaimana terlihat pada Bagan 3 dibawah ini :

Bagan 3. Skema Operasional SL-PTT



Penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, operasional pelaksanaan SLPTT ditingkat kabupaten/kota adalah Kepala Sub Dinas / Kepala Bidang yang membidangi produksi tanaman pangan berkedudukan di POSKO III. Penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT di tingkat kecamatan adalah KCD sedangkan penanggung jawab teknis di setiap kecamatan adalah koordinator penyuluh / Kepala BPP setempat dan di tingkat desa/unit SL-PTT adalah Pemandu Lapangan / Penyuluh Pertanian dibantu POPT dan PBT tingkat kecamatan / desa. Dalam melaksanakan kegiatan PL berkedudukan di POSKO IV / V (kecamatan / desa).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan

Pembahasan proses implementasi kebijakan penyelenggaraan sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT) di Kabupaen Nunukan meliputi tahap: sosialisasi program SL-PTT, Aktifitas pengorganisasian implementasi program SL-PTT, dan pelaksanaan kegiatan program SL-PTT yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Sosialisasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan

Keberhasilan dalam implementasi program SL-PTT yang ada di Kabupaten Nunukan, diperoleh dengan melakukan beberapa proses implementasi. Salah satu proses awal yang menentukan proses keberhasilan dan keberlangsungan implementasi program SL-PTT adalah proses sosialisasi. Keberhasilan pada proses sosialisasi dapat memberikan pemahaman baik pada petugas ataupun dari kelompok sasaran mengenai program SL-PTT. Dengan adanya pemahaman jelas dari petugas, maka petugas dapat memberikan informasi tersebut kepada kelompok sasaran. Ketika kelompok sasaran ini menerima informasi dari para petugas akan membentuk persepsi dan tindakan dari kelompok sasaran tersebut mendukung atau menolaknya.

Kegiatan Sosialisasi dalam Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan untuk memberikan informasi tentang program SL-PTT kepada petugas

pelaksana dan kelompok tani yang akan dilibatkan dalam program SL-PTT di Kabupaten Nunukan. Hal ini juga diutarakan oleh bapak Subandi yang menyebutkan bahwa :

“Setelah diinformasikan dari pemerintah pusat, kita menyampaikannya kepada masing-masing kecamatan yang mempunyai potensi tanaman pangan untuk program SL-PTT padi. Jadi ditingkat kecamatan juga akan memiliki kelompok-kelompok tani sebagai pelaksana, seperti itu” (wawancara dengan bapak subandi tanggal 29 Maret 2013).

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa proses sosialisasi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan adalah penyampaian oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat Kecamatan. Informasi tersebut digunakan oleh UPT sebagai pertimbangan untuk menentukan lokasi dan kelompok tani yang digunakan sebagai pelaksana program SL-PTT.

Sosialisasi yang ditujukan untuk kelompok tani, disampaikan oleh UPT di tingkat kecamatan. Sebelum UPT tersebut melakukan sosialisasi, terlebih dahulu memahami mana saja lokasi yang tepat untuk dilibatkan sebagai pelaksana program SL-PTT. Hal ini diutarakan oleh bapak Herman mengenai proses sosialisasi sebagai berikut :

“Ya., pertama kita harus meninjau terlebih dahulu, dimana saja yang sesuai persyaratan dengan program SL-PTT. Setelah itu kita menginformasikan mengenai program SL-PTT melalui pendekatan kepada kelompok tani, setelah diberikan sosialisasi kemudian ditawarkan kepada kelompok tani tentang kesediaan mereka untuk melaksanakan program SL-PTT. Dengan adanya pendekatan terlebih dahulu, maka kebanyakan respon kelompok tani kebanyakan bersedia untuk dijadikan unit SL-PTT.” (Wawancara dengan Herman dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Dari pernyataan tersebut dapat digambarkan bahwa dalam mensosialisasikan program SL-PTT kepada kelompok tani, terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Pertama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yang merupakan sumber informasi, terlebih dahulu menyampaikannya kepada pelaksana teknis yang ada di kecamatan yaitu UPT. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan bentuk penugasan dinas kepada pelaksana teknis di tingkat kecamatan.

Tahap kedua yaitu UPT melibatkan petugas lapangan melakukan peninjauan di daerah masing-masing. Dengan bersumber dengan pada informasi mengenai persyaratan-persyaratan SL-PTT, para petugas lapangan menentukan kelompok-kelompok sasaran program, yaitu kelompok tani yang memenuhi syarat. Setelah petugas lapangan mengetahui kelompok tani mana saja yang sesuai dengan program SL-PTT, petugas lapangan menginformasikan program SL-PTT ini kepada kelompok tani tersebut dengan melakukan pendekatan dan penyuluhan di tingkat desa. Sosialisasi dengan metode ini, dapat menimbulkan respon yang positif dari petani. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan mereka untuk berperan aktif sebagai unit SL-PTT. Dengan adanya kesediaan kelompok tani tersebut dapat dilihat bahwa proses sosialisasi dalam program SL-PTT memberikan rasa ketertarikan pada kelompok tani.

b. Aktifitas Pengorganisasian Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan

Aktifitas pengorganisasian program merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil apa yang menjadi tujuan dan sasaran program. Berikut penyajian tentang aktifitas pengorganisasian program SL-PTT di Kabupaten Nunukan.

1) Penyaluran bantuan program SL-PTT di Kabupaten Nunukan

Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan program SL-PTT adalah peralatan-peralatan yang berhubungan dengan proses produksi tanaman pangan. Peralatan-peralatan tersebut diantaranya adalah lahan sawah, bibit unggul, saprodi dan peralatan pendukung produksi pertanian. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh Joko Sutomo sebagai staf bidang pertanian tanaman pangan, beliau mengatakan bahwa ;

“Secara umum program ini merupakan pengenalan dan pembelajaran kepada para petani tentang PTT (pengelolaan tanaman terpadu), jadi kebutuhannya itu adalah peralatan pertanian seperti lahan yang akan digunakan untuk menanam, bibit yang akan ditanam, pupuk, pestisida dan peralatan lainnya.” (wawancara dengan bapak Joko Sutomo dilakukan pada tanggal 1 April 2013).

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh ibu herni yang merupakan pemandu lapangan, beliau menyatakan bahwa ;

“Peralatan yang dibutuhkan itu yaa untuk kebutuhan bertani seperti benih, pupuk, obat tanaman dan lain sebagainya. Kalau SL-PTT itu benihnya harus bersertifikat, pupuk yang digunakan harus berkualitas, lahan pertaniannya harus berpotensi untuk meningkatkan produktifitas.” (wawancara dengan ibu herni dilakukan pada tanggal 1 April 2013)

Begitu pula pernyataan yang diutarakan oleh ibu Nunung Apriyani, beliau menyebutkan bahwa ;

“sebenarnya kebutuhannya itu sama dengan penanaman biasa, hanya saja SL-PTT ini membutuhkan kualitas yang baik dari penanaman biasa. Jadi bibitnya harus baik, pupuknya juga harus bagus, pokoknya semuanya harus berkualitas baik.” (wawancara dilakukan dengan ibu nunung apriyani pada tanggal 2 april 2013)

Ditunjang dengan pernyataan dari bapak ramli yang menyebutkan bahwa ;

“Yang beda itu caranya bu, jadi kalau kebutuhannya SL-PTT itu ya sama kayak menanam biasanya, hanya saja lebih menekankan kepada kualitasnya, bibit yang bermutu dan terdaftar. Kalau bentuknya ya sama seperti bibit, pupuk dan sebagainya itulah..” (wawancara dilakukan dengan bapak Ramli pada tanggal 02 April 2013)

Dari pernyataan diatas memberikan suatu kesamaan mengenai peralatan yang dibutuhkan, yaitu peralatan untuk bertanam. Akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan SL-PTT, kebutuhannya dalam kualitas dari peralatan tersebut. Kualitas dari peralatan yang digunakan telah ditentukan terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan merumuskannya pada petunjuk teknis pelaksanaan program SL-PTT. Berikutnya pernyataan Bapak Sidik Agus Setiyono sebagai ketua sub bidang tanaman pangan di dinas pertanian Kabupaten Nunukan ;

“dalam menentukan saprodi yang akan digunakan untuk program SL-PTT ini, harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari pusat. Disana sudah ditentukan spesifikasi padi yang layak digunakan dalam program SL-PTT itu harus memiliki kualitas yang seperti apa...” (wawancara dilakukan dengan bapak sidik agus setiyono dilakukan pada tanggal 03 April 2013)

Hal serupa juga diutarakan oleh bapak Marthen sebagai staf bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, beliau berpendapat bahwa ;

“untuk melaksanakan segala kegiatan yang akan dilakukan, kita selalu mengacu pada petunjuk pelaksanaan dari pusat, termasuk dalam pengadaan peralatan. Didalam prosedur telah ditetapkan peralatan seperti apa saja yang digunakan dalam SL-PTT (wawancara dengan bapak Marthen dilakukan pada tanggal 03 April 2013)

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengadaan ataupun penggunaan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan SL-PTT disesuaikan dengan persyaratan yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan. Didalam pedoman pelaksanaan ditentukan spesifikasi benih yang digunakan. Program SL-PTT padi di Kabupaten Nunukan adalah benih padi non hibrida, dengan spesifikasi sebagai berikut ;

“khusus untuk pembelian benih perlu memperhatikan spesifikasi teknis benih padi non hibrida yaitu :

- a) Bersertifikat dan merupakan varietas unggul nasional yang telah dilepas dan diminati petani
- b) Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80 %
- c) Kadar air maksimal 13 %
- d) Benih murni minimum 98 %
- e) Kotoran benih maksimum 2 %
- f) Campuran Varietas Lain (CVL) maksimum 0,2 %
- g) Benih dikemas dan telah di beri sertifikasi oleh BPSB-TPH atau perusahaan BUMN/Swasta yang telah mendapat sertifikat dari lembaga sertifikasi system mutu benih tanaman pangan dan hortikultura (LSSMBTPH).”

(Arsip Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan)

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa program SL-PTT yang merupakan program pengajaran tentang PTT, maka peralatan yang dibutuhkan adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk

ada persyaratan tertentu. Benih tersebut harus memiliki spesifikasi-spesifikasi yang telah ditentukan pada pedoman pelaksanaan, benih yang ditentukan yaitu benih padi non hibrida.

Secara umum pengadaan benih telah disediakan oleh pemerintah pusat melalui PT Pertani dan PT Sang Hyang Sri (SHS). PT Pertani dan PT Sang Hyang Sri merupakan BUMN yang memenangkan tender sebagai penyalur benih ke kelompok tani. Sementara Dinas Petanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, dalam penyaluran benih ke kelompok tani ini, berperan sebagai pengambil keputusan untuk menetapkan kelompok tani yang mendapatkan bantuan benih. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Sidik Agus Setiyono, beliau berpendapat bahwa ;

“sarana penunjang untuk benih unggul itu sudah ditangani oleh pemegang tender rekanan diantaranya itu PT PERTANI dan SHS. Kita hanya menetapkan kelompok tani yang berhak untuk mendapatkan bantuan benih, dari rekapitulasi yang diajukan oleh tim teknis di kecamatan.” (wawancara dengan Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2013)

Sementara pernyataan yang disampaikan oleh bapak Larahuna selaku kepala unit pelaksana teknis (UPT) tingkat kecamatan menyebutkan bahwa ;

“sebenarnya yaa bukan kita yang menentukan kelompok mana yang mendapatkan bantuan benih tapi yaa dari Kelompok Taninya sendiri. Jadi Kelompok Tani itu mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan benih. Melalui pertimbangan dari pendampingnya, BPP/UPT menentukan Kelompok yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Setelah diketahui siapa saja yang layak untuk menerima dan berapa kebutuhannya, baru UPT mereka mereka keseluruhan kebutuhan di Kecamatan dan diserahkan kepada Dinas, agar

petani tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan benih padi” (Wawancara dilakukan dengan Bapak Larahuna, tanggal 01 April 2013)

Bapak Asri azis sebagai pemandu lapangan mengutarakan sebagai berikut ;

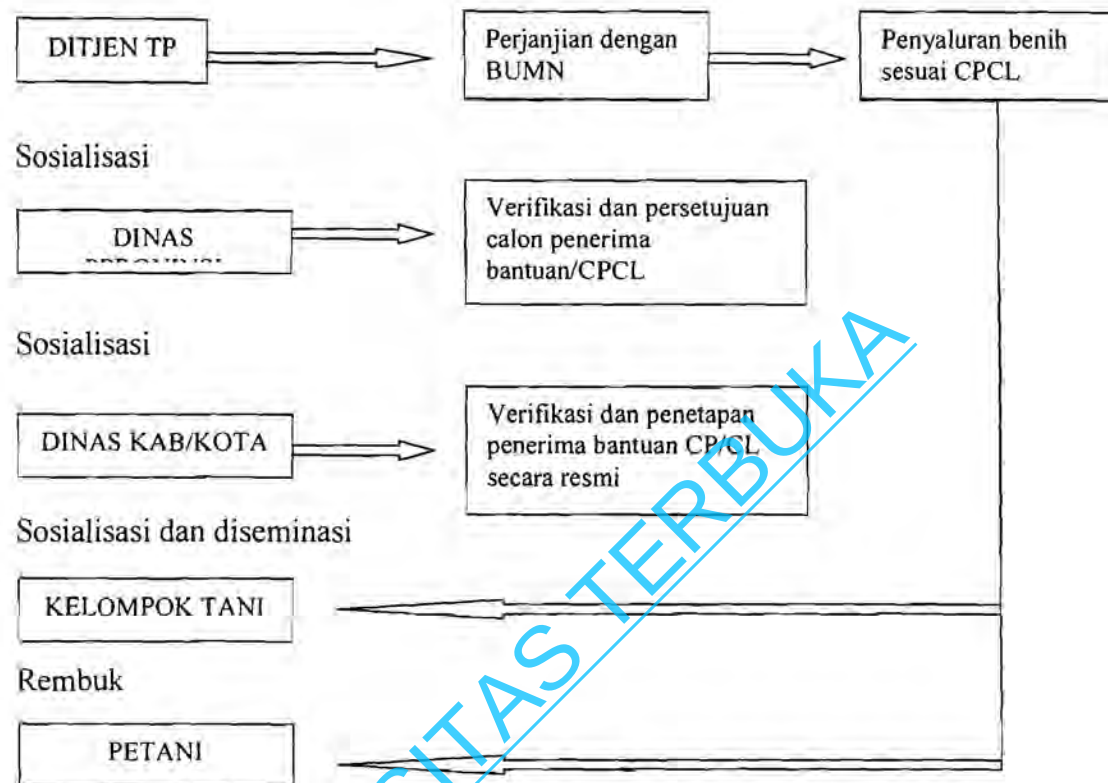
“Pertama itu ya petani mengusulkan kepada petugas untuk bantuan benih, beserta jumlahnya. Setelah itu mendapatkan persetujuan dengan petugas di Kecamatan, kemudian ditetapkan oleh Dinas sebagai kelompok yang berhak mendapatkan bantuan. Setelah bantuan itu turun kepada kelompok tani mengambil bantuan tersebut dengan menandatangani pernyataan kalau bantuan sudah disalurkan.” (Wawancara dengan asri azis dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

Berikut pernyataan yang diutarakan oleh bapak Andi Nurung ;

“Atas kesepakatan dari anggota kelompok kita, dalam pertemuan kelompok baru kita mengajukan bantuan benih kepada UPT, Kalau UPT meng-acc ya kita dapat, tapi kalau tidak ya tidak dapat bu...” (wawancara dengan bapak Andi Nurung dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa penyalur bantuan bibit unggul dalam program SL-PTT adalah PT PERTANI dan SHS. Untuk menentukan kelompok tani yang mendapatkan bantuan, Dinas menetapkan atas dasar rekapitulasi kebutuhan benih di tiap kecamatan. Dalam menentukan kebutuhan benih di tingkat kecamatan, UPT melakukan rekapitulasi dari pengajuan yang dilakukan oleh kelompok tani dengan menyebutkan berapa benih yang dibutuhkan. Untuk melengkapi data mengenai proses pendistribusian benih unggul dapat dilihat dari gambar 5 yang menggambarkan mekanisme penetapan kelompok tani penerima bantuan langsung benih unggul (BLBU) sebagai berikut ;

Gambar 5. Mekanisme Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul



Sumber ; Data sekunder

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa dinas kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, merupakan pengambil keputusan untuk menetapkan kelompok tani yang berhak untuk mendapatkan bantuan dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sementara penetapan mengenai benih unggul telah ditetapkan melalui proses perundingan atau pertemuan petani dikelompok taninya. Dalam hal ini UPT dan pemandu lapangan berperan untuk melaksanakan tugas-tugas dari Dinas Pertanian untuk memverifikasi kelompok tani yang mendapatkan bantuan benih unggul.

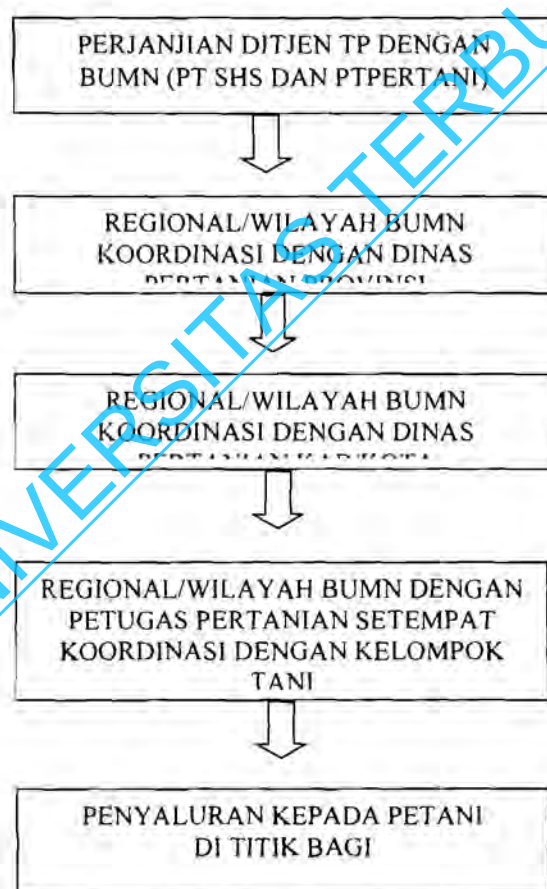
Untuk melaksanakan pendistribusian BLBU, dilakukan langsung oleh PT PERTANI dan SHS didasarkan atas koordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur. Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam hal rekapitulasi data kelompok tani (CPCL) yang akan mendapatkan BLBU. Dengan dasar CPCL itulah PT PERTANI dan SHS melaksanakan pendistribusian ke kelompok tani. Hal ini sesuai dengan apa yang utarakan bapak Subandi selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, beliau menyebutkan bahwa ;

“kalau di Kalimantan Timur pendistriusian ini dilakukan oleh PT SHS. Dalam tahap ini kita hanya mediator, kita menyalurkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh PT SHS yaitu tentang data-data kelompok tani yang berhak memperoleh BLBU. Data tersebut berbentuk rekapitulasi, CPCL itu bu. Lal... CPCL tersebut diserahkan ke Dinas Pertanian Propinsi. Dari Dinas Pertanian Propinsi inilah kemudian CPCL diserahkan ke cabang PT SHS Kalimantan Timur. Dan kemudian PT SHS Kalimantan Timur tersebut menyalurkan bantuan kepada kelompok tani.” (wawancara dengan bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pendistribusian BLBU di Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Nunukan adalah PT SHS didasarkan atas rekapitulasi data kelompok tani penerima BLBU atau sering disebut CPCL (calon petani calon lokasi). CPCL ini disusun oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang kemudian diberikan kepada Dinas Pertanian Propinsi. Dinas pertanian propinsi inilah yang kemudian berkoordinasi dengan cabang PT SHS yang ada di Kalimantan Timur untuk melakukan pendistribusian

SHS Kalimantan Timur berbentuk penyerahan CPCL yang disusun oleh Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaen Nunukan. Untuk lebih memahami proses pendistribusian BLBU, berikut Bagan 5 yang menjelaskan tentang mekanisme pendistribusian bantuan langsung benih unggul (BLBU) SL-PTT.

Bagan 5. Mekanisme Pendistribusian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT



Sumber ; Data Sekunder

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa proses pendistribusian BLBU SL-PTT baik dari penyediaan sampai pada penyaluran kepada kelompok tani dilakukan oleh PT PERTANI dan PT SHS. Sementara

penyediaan data kelompok tani yang menerima BLBU. Dari gambar dan pendapat diatas maka dapat dilihat pendistribusian BLBU di Kabupaten Nunukan diawali dengan pemetaan kelompok tani, yaitu memverifikasi kelompok tani yang akan mendapatkan bantuan. Dalam proses verifikasi ini, lembaga yang memiliki peran utama adalah lembaga-lembaga di tingkat kabupaten yang meliputi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan sebagai penanggung jawab dan UPT ditingkat kecamatan sebagai pelaksana teknis.

Setelah didapat data-data kelompok tani yang berhak mendapatkan bantuan BLBU maka ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupate nunukan. Keputusan tersebut berbentuk rekapitulasi data kelompok tani (CPCL) yang akan mendapatkan BLBU. CPCL tersebut disahkan oleh Dinas Pertanian Propinsi sebagai kelompok tani penerima BLBU yang kemudian diserahkan kepada PT SHS.

Dengan CPCL dari Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur, PT SHS menyediakan BLBU dan mendistribusikannya ke kelompok tani. Secara tekhnis pendistribusiannyadilakukan oleh cabang PT SHS Kalimantan Timur. Sebelum melakukan pendistribusian cabang PT SHS berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan untuk melakukan pengecekan ulang CPCL. Setelah dilakukan pengecekanulang barulah PT SHS mendistribusikan ke kelompok tani dengan dibantu Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan (UPT BP3K) yang berada di tingkat kecamatan.

Selain bantuan benih, pemerintah pusat juga menyediakan bantuan modal. Bantuan modal yang disediakan berbentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Metode yang digunakan untuk menyalurkan BLM, dilakukan melalui transfer di tabungan kelompok tani. Bank yang digunakan dalam proses ini adalah Bank BRI. Berikut pernyataan dari bapak Joko Sutomo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SL-PTT ;

“setelah proses persetujuan bantuan selesai, dana BLM di kirim melalui rekening Bank BRI milik kelompok tani. Dana yang telah dikirim digunakan untuk membeli kebutuhan petani sesuai dengan apa yang ada di Rencana Usaha Kelompok (RUK).” (wawancara dilakukan dengan Bapak Joko Sutomo pada tanggal 01 April 2013)

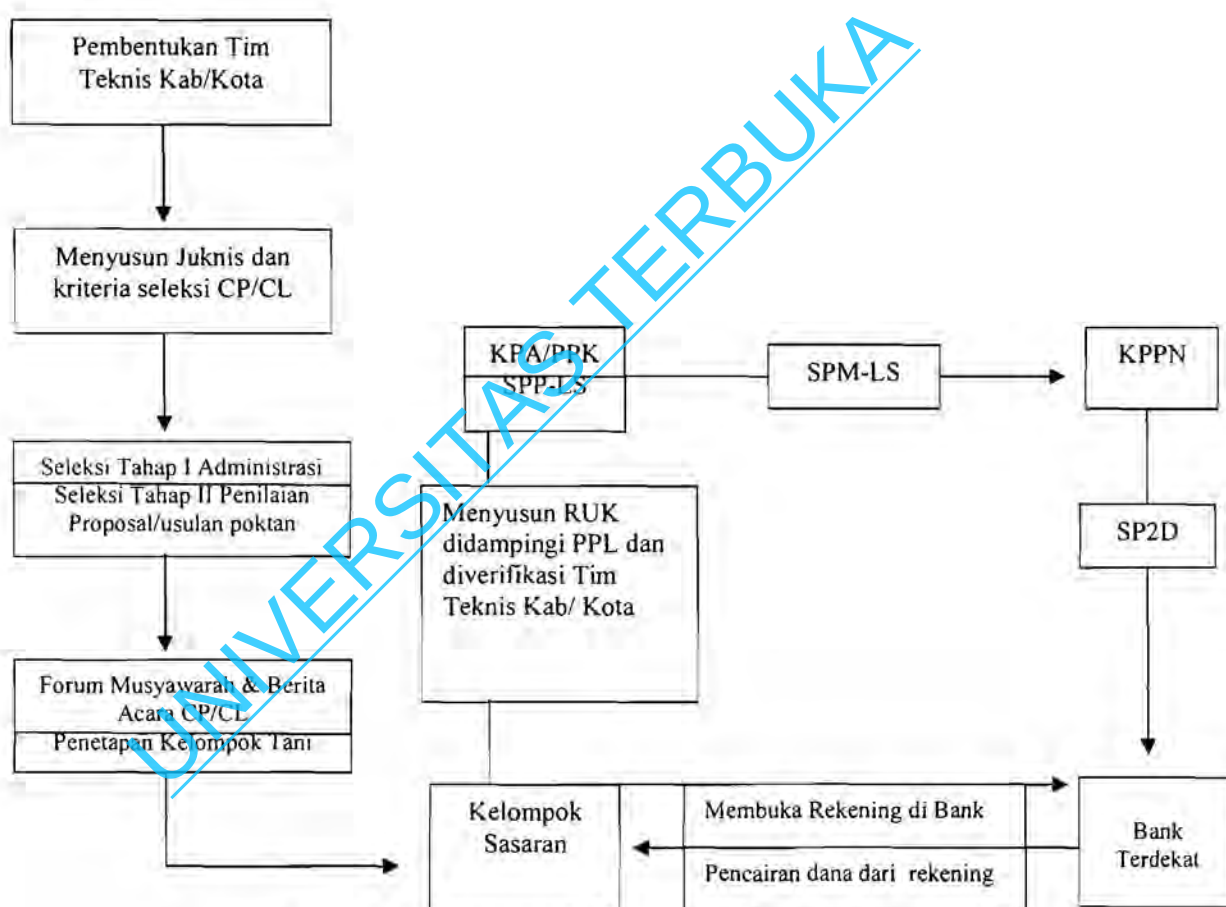
Selanjutnya adalah pernyataan dari Bapak Senong sebagai ketua dari salah satu kelompok tani yang menjadi unit SL-PTT, beliau menyebutkan bahwa ;

“setelah kelompok kita diputuskan sebagai unit SL-PTT, kita didaftarkan di rekening Bank BRI atas nama kelompok. Dari rekening inilah bantuan yang kita dapatkan dikirim. Saat bantuan itu turun kita selalu diberi tahu oleh para penyuluh, setelah itu kita membelanjakannya sesuai dengan apa yang kita catat di RUK.” (wawancara dilakukan dengan Bapak senong, pada tanggal 29 Maret 2013)

Dari pernyataan tersebut dapat diamati bahwa bantuan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan SL-PTT berasal dari pemerintah pusat. Bentuk bantuan yang diberikan adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Bantuan yang diberikan disalurkan kepada kelompok tani melalui Bank BRI atas nama kelompok tani.

Setelah kelompok tani menerima BLM, petani dibantu dengan petugas melakukan pembelanjaan kebutuhan saprodi sesuai dengan RUK. Berikut bagan 6 tentang mekanisme pencairan dana bantuan SL-PTT pola BLM sebagai berikut :

Bagan 6. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan SL-PTT Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)



Sumber ; Data Sekunder

Dari gambar tersebut dapat lebih memperjelas tentang mekanisme pencairan dana SL-PTT dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Seperti halnya pada bantuan benih unggul, penentuan penerima BLM program SL-PTT di tetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Salah satu syarat utama dalam

penentuan penerima bantuan BLM adalah RUK yang disusun oleh anggota kelompok tani dengan dibantu oleh pemandu lapangan. Dalam proses pencairannya dana BLM disalurkan melalui rekening kelompok tani di Bank BRI.

Dalam implementasi program pendampingan SL-PTT di Kabupaten Nunukan, penyaluran dana BLM masih sering menjadi kendala pelaksanaan program. Permasalahan keterlambatan tersebut adalah kelambatan pemerintah pusat untuk menyalurkan BLM kepada kelompok tani dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Subandi, beliau menyebutkan sebagai berikut ;

“permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi program SL-PTT di Kabupaten Nunukan ini adalah permasalahan tentang keterlambatan bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada para petani. Padahal segala sesuatunya termasuk persyaratan sudah dipersiapkan sedini mungkin, tapi biasanya memang selalu terlambat turunnya.” (wawancara dengan Bapak subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa permasalahan tentang penyaluran bantuan bukan terletak pada mekanismenya yang rumit akan tetapi lebih kepada ketanggapan pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana BLM kepada kelompok tani. Dengan adanya keterlambatan ini sering mempengaruhi pelaksanaan SL-PTT.

2) Penentuan Calon Lokasi Program SL-PTT Kabupaten Nunukan

Selain kebutuhan peralatan, dalam kegiatan program SL-PTT juga membutuhkan lahan dan kelompok tani yang digunakan sebagai unit SL-PTT atau pelaksana kegiatan program SL-PTT. Menetapkan lahan yang

digunakan untuk kegiatan program SL-PTT dan kelompok tani sebagai unit SL-PTT merupakan satu rangkaian. Yang digunakan sebagai pertimbangan memverifikasi kelompok tani salah satu syaratnya adalah lahan yang dimiliki. Seperti kata Bapak Abdul Wahid, beliau menyebutkan sebagai berikut ;

“Verifikasi kelompok tani itu ya kita meninjau kelompok-kelompok tani dengan menjalin hubungan secara intens untuk menilai kemampuannya, kemampuan yang artinya adalah memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, yaitu kelompok tani yang ada pengurusnya dan organisasinya berjalan, memiliki area sawah yang sesuai dengan ketentuan, dan memiliki kemauan untuk mengikuti setiap kegiatan SL-PTT.” (wawancara dilakukan dengan Bapak Abdul Wahid pada tanggal 04 April 2013)

Pendapat tentang verifikasi kelompok tani, juga diutarakan oleh Heru Wihartopo sebagai koordinator jabatan fungsional, beliau menyebutkan bahwa ;

“pertama kali hal yang kita lakukan untuk memilih kelompok tani, kita tinjau dulu kelompok tani yang ada di daerah kita, disana kita menilai kelompok tani mana yang benar-benar layak untuk dijadikan unit SL-PTT. Melihat layak atau tidaknya itu dilihat dari lahan pertaniannya, keorganisasiannya dan kesediaannya dalam melaksanakan kegiatan SL-PTT.” (wawancara dilakukan dengan Bapak Heru wihartopo pada tanggal 04 April 2013)

Dari beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk menetapkan kelompok tani sebagai unit SL-PTT dan menetapkan lahan yang digunakan untuk kegiatan SL-PTT merupakan suatu rangkaian. Dalam hal ini agar kelompok tani ditetapkan sebagai unit SL-PTT harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada petunjuk teknis pelaksanaan, yang salah satu syaratnya adalah luas lahan yang dimiliki kelompok tersebut. Untuk memperjelas pendapat tersebut berikut akan

ditampilkan data tentang syarat kelompok tani sebagai unit SL-PTT dan syarat lahan yang digunakan.

“persyaratan kelompok tani unit SL-PTT adalah sebagai berikut :

1. Kelompok tani tersebut masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu ketua, sekretaris dan bendahara
2. Telah menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK)
3. Kelompok Tani penerima bantuan SL-PTT ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.
4. Kelompok tani peserta SL-PTT diutamakan yang belum pernah menerima bantuan SL-PTT tahun sebelumnya.
5. Memiliki rekening yang masih berlaku /masih aktif di BRI dan bagi kelompok tani yang belum memiliki, harus membuka rekening di BRI.
6. Rekening Bank dapat berupa rekening Bank setiap kelompok tani ataupun rekening Bank Gabungan kelompok tani (Gapoktan).
7. Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan SL-PTT sesuai peruntukannya dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai penggunaannya.
8. Bersedia menambah biaya pembelian benih unggul bersertifikat bilamana dana bantuan pembelian benih yang tersedia tidak mencukupi.
9. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT

Ketentuan lokasi SL-PTT sebagai berikut :

1. Lokasi SL-PTT diusahakan berada pada satu hamparan, mempunyai potensi peningkatan produktivitas dan anggota kelompok taninya responsive terhadap penerapan teknologi.
2. Luas satu unit SL-PTT padi non hibrida adalah ± 25 Ha yang didalamnya terdapat satu unit Laboratorium Lapang (LL) seluas minimal 1 Ha
3. Luas satu unit SL-PTT dapat disesuaikan pada kondisi luasan setempat, namun total luasan dan total jumlah SL-PTT tidak boleh kurang dari yang dibiayai.
4. Total luasan dan total jumlah SL-PTT bisa lebih dari yang dibiayai. Kelebihan luasan ataupun jumlah SL-PTT ditanggung anggaran lain ataupun swadaya petani.
5. Luas areal LL bisa lebih dari 1 ha apabila dananya masih memungkinkan, tetapi tidak boleh kurang dari 1 ha.
6. Peserta tiap unit SL-PTT idealnya terdiri dari 15 – 25 orang petani yang berasal dari 1 kelompok tani yang sama, namun jumlah peserta dapat disesuaikan dengan luas pemilikan lahan serta situasi dan kondisi.
7. Memiliki pemandu lapangan.”

(arsip Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan ; Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program
SL-PTT di Kabupaten Nunukan)

Dari data-data diatas dapat dilihat bahwa untuk memilih atau menentukan kelompok tani sebagai unit SL-PTT, terlebih dahulu diamati kondisi kelompok taninya. Pengamatan kondisi kelompok tani meliputi ; struktur organisasi, manajemen usaha dan loyalitas terhadap kegiatan-kegiatan program. Berhubungan dengan ketentuan lokasi maka, pengamatan atas kelayakan kelompok tani yang akan digunakan sebagai unit SL-PTT juga dilakukan dengan melihat luas lahan yang dimiliki kelompok tani. Luas lahan yang dimiliki kelompok tani kurang lebih 10 ha yang digunakan sebagi unit SL-PTT, sementara yang digunakan untuk laboratorium lapangan (LL) kurang lebih 1 ha.

Selain lahan pertanian, data diatas juga menyebutkan bahwa kelompok tani harus memiliki rencana usaha kelompok (RUK). Untuk merumuskan RUK, kelompok tani dengan pendampingan oleh petugas lapangan untuk merumuskan suatu rencana usaha kelompok yang sesuai dengan tujuan dari program SL-PTT. Hal-hal yang dirumuskan dalam rencana usaha kelompok meliputi, tujuan yang akan dicapai, kegiatan-kegiatan yang akan diadakan serta kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok tani dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan dalam memverifikasi kelompok tani dan rencana usaha kelompok adalah petugas lapangan, sementara UPT dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan hanya sebagai

fasilitator dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ramli, beliau menyebutkan bahwa ;

“rencana usaha kelompok itu kan, catatan kebutuhan-kebutuhan petani dan pencapaian perkembangan usahanya, jadi untuk menentukan rencana usaha tani itu kita lihat apa yang ingin dicapai, terus cara-caranya bagaimana, kebutuhannya apa. Dari situ kita bisa melihat apakah rencana usaha kelompok tersebut telah sesuai atau tidak dengan kebutuhan SL-PTT ini.” (wawancara dilakukan dengan Bapak Ramli tanggal 2 April 2013)

Hal serupa juga diutarakan dengan Bapak Heru Wihartopo, dalam pernyataannya beliau menyebutkan bahwa ;

“verifikasi rencana usaha kelompok tani adalah pengecekan apa saja yang telah dirumuskan oleh kelompok tani mengenai jangka panjang usahanya, dalam hal ini kita sebagai pemandu lapangan, kita hanya sebagai fasilitatornya. Dengan adanya forum-forum kelompok tani, kita diskusi dengan mereka untuk merumuskan secara bersama rencana usaha kelompok tani tersebut.” (wawancara dilakukan dengan Bapak Heru Wihartopo pada tanggal 4 April 2013)

Selanjutnya Bapak Marthen mengutarakan bahwa ;

“untuk merumuskan RUK itu dibantu sama pemandu lapangan, setelah RUK itu jadi, diajukan oleh petugas lapangan ke kepala UPT. Jika UPT meng-acc maka RUK itu disetujui dan bantuan akan turun.” (wawancara dilakukan dengan Bapak Marthen pada tanggal 3 April 2013)

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan RUK, kelompok tani membentuk suatu forum yang difasilitasi oleh pemandu lapangan. Dalam forum tersebut anggota kelompok tani membahas tentang capaian-capaian usaha mereka, yang meliputi kebutuhan-kebutuhan petani dan capaian perkembangan usahanya. Sementara untuk tujuan SL-PTT yaitu peningkatan produktifitas, petani dibimbing oleh pemandu lapangan untuk

merancang tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dari hasil perumusan RUK ini akan menjadi RUK kelompok tani dan kemudian digunakan untuk pengajuan kelompok tani inti SL-PTT. Agar RUK yang telah disusun ini diakui maka diperlukan pengesahan dari UPT di daerah kelompok tani tersebut.

Setelah proses verifikasi tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah UPT mengajukan usulan kelompok tani untuk program SL-PTT ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Untuk memutuskan kelompok tani sebagai unit SL-PTT, Dinas pertanian menggunakan usulan dari UPT tentang kelompok-kelompok tani yang memang memenuhi syarat. Dari rekomendasi UPT kemudian ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan sebagai kelompok tani pelaksana SL-PTT atau sering disebut unit SL-PTT. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Subandi, sebagai berikut ;

“yang mengusulkan kelompok tani itu ya UPT, karena yang mengetahui kelompok tani di daerah kan UPT, jadi UPT memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi yang telah dilakukan petugas lapangan, baru kita akan mempertimbangkan kelayakan kelompok tani. Jika memang kelompok tani tersebut telah memenuhi syarat maka akan diputuskan sebagai unit SL-PTT yang disahkan dengan surat keputusan kepala dinas.” (wawancara dengan Bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Begitu pula pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Sidik Agus Setiyono, beliau menyatakan sebagai berikut ;

“setelah sudah diperiksa dan koreksi baru akan ditetapkan sebagai calon pelaksana dengan SK kepala dinas. Dalam pelaksanaan SL-PTT itu ada dana yang dialokasikan ke kelompok tani dan sarana produksi penunjang kegiatan, maka petani yang ditetapkan secara otomatis mendapatkan bantuan dari program SL-PTT. “

(wawancara dengan Bapak Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2013)

Dari pernyataan tersebut secara garis besar menunjukkan bahwa penetapan kelompok tani unit SL-PTT dilakukan dengan Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Untuk proses dari penetapan tersebut, yang pertama adalah verifikasi kelompok tani dan lahan SL-PTT, dalam hal ini ketentuan mengenai syarat yang harus dimiliki untuk kelompok tani sebagai calon unit SL-PTT harus sesuai apa yang tertera dalam pedoman pelaksanaan teknis program SL-PTT Kabupaten Nunukan. Verifikasi ini dilakukan oleh pemandu lapang dan pengamatan kelompok tani yang dilakukan melalui pendekatan terlebih dahulu dan hasil yang diperoleh pada proses verifikasi adalah data-data tentang kelompok tani yang layak untuk dijadikan unit SL-PTT. Data-data tentang kelompok tani tersebut, melalui tembusan kepala UPT direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan untuk ditetapkan sebagai kelompok tani unit SL-PTT. Setelah mendapatkan rekomendasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan mengoreksi data-data tersebut, dan setelah itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan menetapkan kelompok tani sebagai unit SL-PTT kepada kelompok tani yang memang memenuhi syarat.

3) Perumusan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program SL-PTT di Kabupaten Nunukan

Selain peralatan, pendanaan dan unit SL-PTT, kebutuhan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan program SL-PTT adalah prosedur pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan. Petunjuk teknis pelaksanaan program SL-PTT merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh pelaksana untuk melaksanakan program SL-PTT. Didalam petunjuk teknis tersebut berisikan tentang acuan pelaksanaan, koordinasi antar aktor yang terlibat dalam implementasi program SL-PTT.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan di tingkat Kabupaten Nunukan disusun oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dengan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan di tingkat pusat. Agar petunjuk teknis di Kabupaten Nunukan sesuai dengan kondisi di lapangan, pada saat perumusan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan melibatkan tim teknis yang ada di kecamatan. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Subandi, beliau menyebutkan bahwa ;

“Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan sebagai penanggung jawab ditingkat kabupaten, memiliki kewajiban untuk merumuskan petunjuk teknis bagi teman-teman yang ada di kecamatan. Dalam perumusannya kita juga melibatkan mereka dalam tim penyusun petunjuk teknis. Agar petunjuk teknis yang ditetapkan nanti sesuai dengankondisi dilapangan, kan yang tau lapangan mereka, jadi mereka ya harus dilibatkan.” (wawancara dengan Bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Hal serupa juga diutarakan oleh Bapak Joko Sutomo, beliau

“petunjuk teknis pelaksanaan itu yang bikin ya tim perumus. Lah tim perumus itu terdiri dari perwakilan dinas dan UPT. Setelah dirumuskan dan ditetapkan baru disosialisasikan kepada UPT-UPT. Gitu gambarannya bu.” (wawancara dengan Bapak Joko Sutomo dilakukan pada tanggal 1 April 2013)

Selanjutnya juga terdapat pendapat lain dari Bapak Sidik Agus Setiyono, beliau menyebutkan bahwa ;

“proses pembuatan petunjuk teknis yaitu dari propinsi menurunkan ke kita sebagai pelaksana di tingkat kabupaten, dari situ lalu kita olah saja, sehingga juknis yang turun ke kecamatan itu tidak jauh berbeda dan tidak menyimpang.” (wawancara dengan Bapak Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2013)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pada proses perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program SL-PTT di Kabupaten Nunukan dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Dalam perumusan tersebut Dinas Pertanian membentuk tim perumusan. Tim tersebut terdiri dari perwakilan UPT dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dengan komposisi tersebut maka petunjuk teknis pelaksanaan yang dihasilkan adalah interpretasi dan pedoman pelaksanaan pemerintah pusat yang sesuai dengan kondisi lingkungan sehingga petunjuk teknis dapat lebih mudah dipahami oleh pelaksana teknis di tingkat kecamatan atau desa/unit SL-PTT.

c. Pelaksanaan Kegiatan Program SL-PTT di Kabupaten Nunukan

Pelaksanaan kegiatan program SL-PTT merupakan wujud dari implementasi program SL-PTT. Dalam proses ini kelompok tani akan diberikan materi-materi tentang teknologi pengelolaan tanaman terpadu

(PTT) dengan metode-metode yang mudah dipahami oleh petani baik

dalam penyampaian kelas ataupun keterlibatannya secara langsung dalam praktek lapangan. Pelaksanaan kegiatan program SL-PTT ditujukan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memahami kondisi lingkungannya dan kajian tentang agroekosistem sehingga petani dapat menerapkannya di lahan yang mereka miliki. Dalam proses pelaksanaan kegiatan program SL-PTT, pemandu lapangan memiliki peran penting, dalam hal ini adalah pengajar dari PTT. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ismail sebagai kepala UPT di kecamatan, yang menyebutkan bahwa ;

“kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah kegiatan pendampingan, jadi pemandu lapangan disana memberikan pemahaman kepada petani tentang cara-cara bertani yang terbaik, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Metode yang digunakan adalah melalui pertemuan-pertemuan dan praktek lapangan.” (wawancara dengan Bapak Ismail dilakukan pada tanggal 30 Maret 2013)

Pendapat lain diutarakan oleh Bapak Heru Wihartopo, beliau menyebutkan bahwa ;

“untuk program pemerintah yang jenisnya SL-PTT ini memang cukup relevan terhadap petani tentang pengetahuan perkembangan masalahnya, dengan sekolah lapangan ini petani menjadi lebih dekat dengan Pembina/PPLnya, dan petani dapat lebih tau detail jenis apa, macam apa hama yang akan menyerang tanaman sehingga dengan system SL-PTT ini akan mendekatkan petani dengan pemandu lapangan selanjutnya petani lebih mudah bertanya, lebih mudah paham dengan petunjuk-petunjuk yang dipaparkan oleh petugas lapangan.” (wawancara dengan Bapak Heru Wihartopo dilakukan pada tanggal 4 April 2013)

Berikutnya adalah pendapat dari Bapak Tulus Arif Widodo, yang menyebutkan bahwa;

“dalam kegiatan SL-PTT, bahwa kita sebagai pemandu bertugas untuk menyampaikan kepada petani mengenai apa saja yang terdapat dalam SL-PTT, jadi kita mengajarkan dan mengenalkan

kepada mereka tentang teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT).” (wawancara dengan Bapak Tulus dilakukan pada tanggal 1 April 2013)

Pernyataan selanjutnya diutarakan oleh Bapak azri azis sebagai pemandu lapangan, beliau menyebutkan bahwa ;

“pada program SL-PTT itu kita sebagai pemandu lapangan memberikan pemahaman kepada petani mengenai agroekosistem, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan juga manajemen usaha melalui temu lapangan ataupun pertemuan kursus tani.” (wawancara dengan Bapak Azri Azis dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat secara umum bahwa pelaksanaan kegiatan program SL-PTT adalah kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai teknologi PTT. Metode yang digunakan adalah pendampingan, dalam hal ini pemandu lapangan memberikan pendampingan kepada petani untuk melakukan pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Materi yang diberikan kepada petani, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh petani.

Pertama kali kegiatan yang dilakukan dalam program SL-PTT adalah kegiatan pertemuan ditingkat kelompok tani. Pertemuan ini dilakukan untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan petani disertai penjadwalannya. Dalam hal ini disebutkan oleh Bapak Larahuna, sebagai berikut ;

“yang pertama kelompok tani dan pemandu lapang mengadakan pertemuan, dalam pertemuan ini dilakukan penggalian masalah, apa permasalahan yang ada di kelompok itu yang paling utama. Didalam pertemuan tersebut ada kesepakatan mengenai permasalahan dan metode yang digunakan untuk peningkatan produktivitas, misalnya penggunaan pupuk organik, itu nanti yang tertuang dalam Rencana Usaha Kelompok.” (wawancara dengan Bapak Larahuna dilakukan pada tanggal 1 April 2013)

Selanjutnya adalah pendapat dari Ibu Herni, dalam hal ini beliau menyebutkan bahwa ;

“langkah pertama itu melakukan pertemuan dengan petani, dalam pertemuan tersebut kita dan petani menyusun RUK. Setelah itu kita merumuskan langkah-langkah dan membuat jadual kegiatan. Setelah tersusun jadual-jadualnya baru kita melakukan kegiatan yang telah disusun tadi. Jadi kegiatan antar kelompok ya tidak sama, kan setiap masalah dikelompok juga berbeda. Yang jelas ada kegiatan pokoknya yang harus dijadualkan yaitu pemberian materi penyuluhan dan kegiatan lapangan. Kurang lebih seperti itu.” (wawancara dengan Ibu Herni dilakukan pada tanggal 1 April 2013)

Hal serupa juga diutarakan oleh Ibu Nunung Apriyani, beliau menyebutkan bahwa ;

“pertama pertemuan dilakukan untuk membahas permasalahan utama petani dan penyusunan RUK, untuk pertemuan berikutnya adalah pertemuan rutin. Pertemuan rutin ini dilakukan untuk memberikan materi kepada petani, materi-materinya sudah dijadualkan sebelumnya. Sementara praktek lapangan dilakukan secara bersama yaitu pemandu lapangan dan kelompok tani melakukan cara bertani sesuai dengan materi-materi yang diajarkan.” (wawancara dengan Ibu Herni dilakukan pada tanggal 1 April 2013)

Pernyataan selanjutnya adalah dari Ibu Sri Wahyuni, beliau menyatakan sebagai berikut ;

“pertama kali itu kita mengadakan pertemuan antar kelompok dan juga diikuti oleh pemandu lapang, dalam pertemuan itu kita membahas masalah-masalah dalam usaha pertanian kita, setelah itu kita merumuskan jangka panjang usaha kita dan merencanakan untuk meningkatkan produktivitas. Dari pertemuan itu baru menghasilkan jadual kegiatan. Kalau bentuk kegiatannya kayak belajar bersama.” (wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni dilakukan pada tanggal 3 April 2013)

Pernyataan selanjutnya adalah pernyataan dari Bapak Arif selaku kelompok tani pelaksana unit SL-PTT, beliau menyebutkan sebagai berikut ;

“setelah kita ditetapkan sebagai unit SL-PTT, yang dilakukan pertama kali itu pertemuan antar anggota kelompok tani dengan pemandu lapangan yang mendampingi di kelompok. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai masalah-masalah dalam usaha tani kita, terutama padi sawah, setelah dibahas kemudian dicari jalan keluar dari masalah tersebut, sekaligus merancang usaha ke depan.” (wawancara dengan Bapak Arif dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa, kegiatan-kegiatan yang akan diterapkan di kelompok tani didasarkan atas kondisi masing-masing kelompok. Hal ini ditunjukkan dengan perumusan kegiatan program SL-PTT yang akan dilakukan dengan didasarkan atas permasalahan kelompok tani dan capaian usaha termasuk capaian SL-PTT. Jika kita lihat proses yang dilakukan untuk merancang kegiatan, yaitu pertama masalah analisa masalah kelompok tani, merumuskan rancangan kerja kelompok, penentuan teknologi PTT yang digunakan dan penetapan jadwal kegiatan.

Seperti halnya yang telah dibahas diatas bahwa untuk membentuk kemampuan petani, salah satu materi yang digunakan adalah materi mengenai agroekosistem pada petani, selain pemberian materi kelas juga akan dilakukan praktek lapangan. dalam hal ini adalah pengamatan agroekosistem di Laboratorium Lapangan (LL). Pernyataan yang memberikan gambaran tentang proses penyampaian materi mengenai agroekosistem, adalah pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Ramli, dalam hal ini, beliau menyebutkan bahwa ;

“ untuk memberikan pengetahuan mengenai agroekosistem, yang kita lakukan adalah memberikan materi dengan mengadakan pertemuan. Untuk tempat pertemuan ini disesuaikan dengan kegiatan petani, ya biasanya di saung sawah atau rumah petani. Dari pertemuan tersebut petani akan diajak untuk langsung untuk

mempraktekkan di Laboratorium Lapangan (LL) yang telah ditetapkan bersama. Dalam laboratorium itulah petani melakukan pengamatan mengenai kondisi air, pertumbuhan tanaman, gangguan-gangguan tanaman, dan banyak yang lain bu. Pengamatan tersebut lalu dicatat oleh petani dan kemudian digunakan sebagai diskusi antar petani.” (wawancara dilakukan dengan Bapak ramli pada tanggal 2 April tahun 2013)

Hal serupa juga diutarakan oleh Bapak Andika Dwi Purwanto, beliau menyebutkan bahwa ;

“pada dasarnya kegiatan SL-PTT ini kan kegiatan penyampaian kepada kelompok tani mengenai agroekosistem. Yang pertama ya kita melakukan pengajaran kepada petani dengan metode pembelajaran orang dewasa dan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah. Selain materi penyuluhan juga dilakukan praktek lapangan di sawah di lahan Laboratorium Lapangan (LL). Dalam praktek lapangan itulah petani akan mempraktekkan apa yang telah di dapat melalui pemberian materi oleh petugas lapangan.” (wawancara dilakukan oleh Bapak Andhika Dwi Purwanto dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

Pernyataan selanjutnya adalah pernyataan dari Bapak Ruslan, beliau menyebutkan sebagai berikut ;

“pertama kita dikenalkan dengan teknologi agroekosistem. Teknologi agroekosistem itu teknologi yang digunakan untuk melakukan penanaman yang sesuai dan lebih efektif. Materi tentang agroekosistem ini meliputi ; kondisi cuaca, keadaan air, populasi hama dan musuh alaminya, tingkat kerusakan tanaman, tingkat kesuburan padi dengan pengukuran menggunakan Bagan Warna Daun (BWD), jumlah anakan dan tinggi tanaman, pemupukan, cara pembenihan dan lain-lain. Dari situ kita bisa memahami metode penanaman yang lebih efektif. Setelah kita diberikan pemahaman tersebut, kita bersama dengan pemandu lapangan melakukan praktek lapangan. Dalam praktek lapangan ini kita melakukan kegiatan pertanian mulai dari pengolahan, penanaman, pengamatan hama sampai pemanenan, bahkan cara menyimpan hasil panen. Dalam prakteklapang ini secara rutin kita mencatat perkembangannya dan kita diskusikan dengan anggota kelompok. Kalau ada masalah misalnya ada hama ya kita catat seperti apa serangan hama itu, apa jenis hamanya dan indikasinya apa saja. Dari situ kita diskusikan dengan kelompok untuk membahas teknik pemberantasan hama yang paling baik.” (wawancara dilakukan dengan bapak Ruslan pada tanggal 4 April tahun 2013)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat tentang kegiatan SL-PTT yang dilakukan di Kabupaten Nunukan. Dalam kegiatan ini petani dibentuk agar lebih terampil dan memiliki pengetahuan teknologi tanam yang sesuai dengan kondisi lingkungan dalam hal ini adalah agroekosistem sehingga petani akan dapat menentukan langkah-langkah yang tepat bagi lahannya sendiri. Cara penyampaian yang dilakukan oleh pemandu dengan pengajaran orang dewasa yaitu pengajaran dilakukan dengan bahasa daerah, waktu dan tempatnya dilakukan oleh petani, melakukan diskusi dua arah dan langsung melakukan praktek langsung di lapangan.

Hal inilah kemudian yang mempermudah penyaluran informasi dari penyuluh kepada petani tentang PTT. Selain itu petani selalu diajarkan tentang penyelesaian masalah secara mandiri dengan melakukan diskusi hasil dari pengamatan, dengan kegiatan seperti ini petani akan dibiasakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dengan melakukan diskusi kelompok tani tersebut.

Rekap temuan dari implementasi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel 16 sebagai berikut :

Tabel 16. Rekap Temuan Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan

No	Aspek Implementasi	Panduan	Pelaksanaan	Hambatan dan Solusi
A.	Implementasi SL-PTT			
	1. Sosialisasi	Sosialisasi oleh Dispertanak ke petugas tingkat kecamatan (UPT)	Sosialisasi oleh Dispertanak ke petugas tingkat kecamatan (UPT)	Dilaksanakan
	2. Aktivitas Pengorganisasian	a. Penyaluran bantuan SL-PTT; benih, pupuk, pestisida b. Penentuan calon lokasi oleh petugas di kecamatan/desa c. Perumusan Petunjuk Teknis oleh Dispertanak	a. Penyaluran bantuan SL-PTT; benih, pupuk, pestisida b. Penentuan calon lokasi oleh petugas di kecamatan/desa c. Perumusan Petunjuk Teknis oleh Dispertanak	a. Jadwal penyaluran benih yang lambat b. dilaksanakan c. Dilaksanakan
	3. Pelaksanaan Kegiatan	Sekolah lapangan oleh pemandu lapangan	Sekolah lapangan oleh pemandu lapangan	Dilaksanakan

Secara umum implementasi penyelenggaraan sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu di Kabupaten Nunukan berjalan dengan lancar sesuai petunjuk pelaksanaan dari pusat, meskipun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya di tingkat kabupaten yaitu jadwal penyaluran benih yang lambat oleh rekanan dari pusat. Sebaiknya penyaluran benih dilaksanakan pada awal tahun setelah proses seleksi CPCL di tingkat Kabupaten diterima Dinas Pertanian Propinsi, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan SL-PTT di tingkat Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal musim tanam petani.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan

Setelah memberikan gambaran mengenai implementasi program SL-PTT di Kabupaten Nunukan, dimana secara hasil yang dicapai implementasi tersebut cukup berhasil. Untuk lebih memberikan pemahaman lebih tentang implementasi Program SL-PTT dan menambah

nilai dari penelitian ini maka, maka akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SL-PTT di Kabupaten Nunukan.

Untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SL-PTT, penelitian ini menggunakan model yang dirumuskan oleh Edwards III. Dalam model tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

a. Faktor komunikasi

Faktor yang pertama adalah komunikasi, dimana implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu antara pejabat pelaksana teknis kegiatan SL-PTT ditingkat kabupaten dengan para pelaksana di tingkat kecamatan dan desa.

Institusi pelaksana kebijakan dituntut untuk menciptakan situasi yang kondusif dan menjamin adanya respon yang memandai guna memungkinkan keluwesan, dukungan dan umpan balik selama implementasi, sementara pada saat yang sama tetap menguasai

adanya control yang memadai atas distribusi sumber-sumber yang dipergunakan untuk mencipkan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan itu.

Seperti halnya yang telah digambarkan di atas bahwa sebelum melakukan kegiatan pelaksanaan, petugas pelaksana terlebih dahulu untuk diberikan pelatihan dan penjelasan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan. Dalam hal ini maka para pelaksana teknis diupayakan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan memaksimalkan kemampuan-kemampuan pelaksana teknis ataupun Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan untuk mencari dukungan dan pengawasan pada proses pengorganisasian program SL-PTT.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencari dukungan adalah dengan melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan dengan para petugas pelaksana yaitu UPT, penyuluh pendamping dan kelompok tani pelaksana SL-PTT. Dengan melakukan pertemuan dan komunikasi yang baik tentang pengorganisasian program SL-PTT, maka diharapkan hasil implementasi program tersebut dapat memuaskan. Dengan komunikasi yang baik tersebut maka pemerintah pusat atau para petugas pelaksana di tingkat kabupaten dan kecamatan akan merasa puas sehingga mereka akan mendukung pelaksanaan program SL-PTT.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Subandi, beliau menyebutkan bahwa;

“dukungan-dukungan dari para pemerintah itu sangat penting dalam implementasi program SL-PTT, dengan adanya dukungan itu maka program pendampingan SL-PTT ini masih tetap terselenggara masalahnya kan program ini berasal dari mereka juga. Selama ini yang kita lakukan adalah menunjukkan kepada mereka bahwa sanya di Kabupaten Nunukan ini memang memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi kita menunjukkan hasil dari kinerja kita kepada mereka mengenai keberhasilan yang kita capai seperti peningkatan produksi dan produktifitas saat ini, dan mengenai hal ini kita selalu mengkomunikasikan dengan pelaksana ditingkat kecamatan dan desa maupun pemerintahan provinsi.”(Wawancara dengan Bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Sementara pernyataan dari Bapak Sidik Agus Setiyono, adalah sebagai berikut;

“ya kita tunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait baik itu pemerintah atau kelompok tani bahwa program ini memang sangat bermanfaat dan apa yang kita lakukan menuai hasil yang sangat memuaskan. Jadi yang kita lakukan menginformasikan kepada mereka tentang perkembangan implementasi program SL-PTT yang kita lakukan, melalui evaluasi, penyerahan laporan dan pertemuan-pertemuan. Kalau sampai sekarang dukungan baik dari pemerintah atau dari kelompok tani tetap besar bu, kalau gak ada dukungan dari mereka-mereka ya program ini gak bisa dilanjutkan.”(Wawancara dilakukan dengan Bapak Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2013)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaksana program SL-PTT untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam hal ini kegiatan-kegiatannya meliputi pertemuan-pertemua, rapat evaluasi dan penyerahan laporan-laporan tertulis. Dengan tindakan-tindakan tersebut, maka pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah pusat,UPT, penyuluh pendamping dan kelompok tani memberikan dukungan terhadap implementasi program yang dilakukan oleh pelaksana di Kabupaten Nunukan.

Sementara tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengontrol proses implementasi program SL-PTT, dilakukan melalui pemantauan langsung, pertemuan dan komunikasi mengenai implementasi program SL-PTT. Seperti halnya yang diutarakan oleh Bapak Subandi, beliau mengatakan bahwa;

“sebagai penanggung jawab pelaksana, jelas tugas utama kita itu ya pengawasan. Untuk melakukan pengawasan ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu kita langsung turun kepada unit-unit SL-PTT. Dengan begitu kita bisa melihat apa kendala disana, bagaimana pelaksananya disana. Selain itu kita juga melakukan berkomunikasi melalui pertemuan-pertemuan kepada pelaksana dan kelompok tani.”(Wawancara dengan Bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Berikutnya adalah pernyataan dari Bapak Sidik Agus Setiyono, beliau menyebutkan bahwa,

“yang pasti kita melakukan pemantauan, dari hasil pemantauan itu kita catat lalu kita lihat apa saja masalahnya, kendalanya apa saja dan perkembangannya bagaimana. Dari catatan-catatan tersebut kita bisa melihat dan merumuskan strategi kedepan.(Wawancara dilakukan dengan Bapak Sidik Agus Setiyono pada tanggal 3 April 2013)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut maka dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana untuk mengawasi berjalannya implementasi program SL-PTT, yaitu dengan melakukan pemantauan langsung ke kelompok-kelompok tani, selain itu, pelaksana juga melakukan komunikasi-komunikasi mengenai bagaimana perkembangan program SL-PTT saat ini. Dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat memahami kondisi dan permasalahan dalam Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT, dengan pemahaman tersebut pelaksana

program merumuskan strategi atau langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan.

Dilihat dari uraian di atas maka faktor komunikasi sangat berperan dan dapat mendorong keberhasilan implementasi penyelenggaraan SL-PTT. Hal ini karena dengan jalinan komunikasi yang baik, maka para pelaksana mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait dalam implementasi ini. Selain itu dengan komunikasi yang dilakukan selama ini, para pelaksana atau lembaga-lembaga pelaksana dapat mengetahui perkembangan dan permasalahan implementasi sehingga dapat dirumuskan strategi implementasi kedepan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk implementasi kebijakan. Sumberdaya ini meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan dan sumberdaya pendanaan. Agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dan mampu mencapai tujuan dari kebijakan, maka sumberdaya yang digunakan dalam implementasi harus tetap terpenuhi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Dalam penyelenggaraan SL-PTT, sumberdaya yang dibutuhkan dapat berupa sumberdaya alam yaitu lahan pertanian, sumberdaya peralatan yaitu alat-alat pertanian, sumberdaya pendanaan dan sumberdaya manusia dalam hal ini adalah kelompok tani pelaksana SL-PTT dan petugas pelaksana. Agar implementasi penyelenggaraan SL-PTT dapat terlaksana dengan baik, maka sumber-sumber tersebut harus tetap tersedia dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Dalam uraian tentang pengorganisasian implementasi telah digambarkan mengenai sumberdaya yang digunakan dalam implementasi penyelenggaraan SL-PTT. Dari gambaran diatas diperoleh suatu fenomena bahwa penyediaan sumberdaya lahan pertanian dan sumberdaya manusia, dalam hal ini adalah kelompok tani pelaksana SL-PTT, merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena ketersediaan sumberdaya lahan pertanian terpenuhi dengan adanya kelompok tani yang dilibatkan dalam implementasi program SL-PTT. Dalam hal ini komitmen kelompok tani pelaksana SL-PTT sangat penting dalam penyediaan kedua sumberdaya tersebut. Secara umum kelompok tani SL-PTT memiliki komitmen yang cukup tinggi. Tingginya komitmen kelompok tani tersebut dipengaruhi oleh hasil yang didapat oleh kelompok tani dengan mengikuti kegiatan SL-PTT, seperti halnya yang diutarakan oleh Bapak Paweruddin, beliau menyebutkan bahwa :

“alasan saya untuk tetap mengikti program ini ya... karena ada manfaatnya bu, dengan mengikuti program ini saya memperoleh pengetahuan yang menurut saya itu sangat penting. Ya dengan pengetahuan itu banyak hal yang bisa saya peroleh, seperti peningkatan produksi, efesiensi usaha pertanian, dan banyak yang lain.” (wawancara dengan bapak paweruddin dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

Pernyataan lainnya adalah pernyataan dari Bapak Andi Jumadil, beliau menyebutkan bahwa;

“ya pertama memang saya mengikuti ini karena diajak oleh petugas PPL, tetapi setelah saya menjalaninya, ternyata banyak keuntungan yang saya peroleh. Dengan mengikuti ini saya jadi mengetahui tentang agroekosistem dan banyak lagi, lagian saya juga tidak ada ruginya mengikuti kegiatan ini, ya kan bu..” (Wawancara dengan bpk andi jumadil dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa komitmen yang timbul dari kelompok tani diperoleh oleh manfaat dan hasil yang mereka dapatkan. Dengan adanya komitmen dari kelompok tani pelaksana SL-PTT, maka sumber daya kelompok tani yang dibutuhkan dalam implementasi program SL-PTT akan tetap terpenuhi. Sementara syarat untuk menjadi kelompok tani pelaksana salah satunya adalah kesediaan lahan yang dimiliki untuk digunakan kegiatan SL-PTT, maka terpenuhinya sumber daya kelompok tersebut memberikan pengaruh pada terpenuhinya sumber daya lahan.

Untuk sumber daya dana dan sumber daya peralatan, ketersediannya dipenuhi oleh pemerintah pusat. Selama implementasi dilakukan, permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan keterlambatan pendistribusian dana bantuan, keterlambatan pendistribusian tersebut mempengaruhi keberlangsungan kegiatan implementasi. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Ibu Herni, beliau menyebutkan bahwa;

“secara teknis pelaksanaan program SL-PTT ini bagus bu, tetapi ada tapinya, seringkali waktu yang kita jadwalkan itu dalam pelaksanaanya tidak pas. Tidak pasnya itu, semisal pada bulan april yang sudah dijadwalkan untuk menanam, karena memang pada saat itu adalah musim tanam, tetapi bantuan dari pemerintah pusat datangnya setelah musim tanam, jadi ya kita agak kesulitan. Untung saja dalam hal ini petani dapat mengerti jadi kita bersama petani berusaha mencari jalan keluarnya yaitu melakukan pinjaman kepada perusahaan saprodi agar tetap bisa menanam pada bulan April.”(Wawancara dengan Ibu Herni dilakukan pada tanggal 1 April 2013)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh dari

keterlambatan dana yang disalurkan mempengaruhi keberlangsungan

kegiatan pemanenan. Akan tetapi permasalahan tersebut dapat teratasi dengan adanya usaha dari penyuluh dan kelompok tani untuk tetap memenuhinya dengan melakukan pinjaman ke tokoh saprodi. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen dan rasa tanggung jawab dari sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan program SL-PTT.

Berikut adalah kepentingan dari UPT dan penyuluh yang terpengaruh dalam implementasi program SL-PTT di Kabupaten Nunukan. Gambaran mengenai hal ini diutarakan oleh Bapak Ismail, beliau menyebutkan bahwa ;

“dengan adanya program SL-PTT ini, tugas UPT sebagai tim teknis Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan yang tugasnya lebih banyak dibidang penyuluhan sangat dibantu dengan adanya program SL-PTT ini, saat dilaksanakannya program SL-PTT ini, kita lebih mudah untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok tani.” (wawancara dengan Bapak Ismail dilakukan pada tanggal 30 Maret 2013)

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Bapak Heru Wihartopo, dalam pernyataannya beliau menyebutkan bahwa ;

“dengan adanya program SL-PTT ini kita diberikan fasilitas untuk pendekatan kepada petani, sehingga kita mudah untuk menjalankan tugas sebagai penyuluh.” (wawancara dengan Bapak Heru Wihartopo dilakukan pada tanggal 4 April 2013)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kepentingan UPT dan penyuluh yang termuat dalam program SL-PTT ini adalah kemudahan dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang didapat dari program SL-PTT, maka UPT dapat melakukan pendekatan dengan mudah kepada kelompok-kelompok tani.

Dan kepentingan yang terakhir adalah kepentingan dari perusahaan pertanian, dalam hal ini digambarkan oleh Ibu Reski sebagai pemilik Kios Agromina, beliau menyebutkan bahwa ;

“bagi para pengusaha, program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah peluang. Setiap program pasti kan membutuhkan peralatan-peralatan, lah kalau kita dapat tender atau bagian dari pengadaannya kan keuntungan bisnis bu. Termasuk pada program SL-PTT ini, ketika ada jalinan kerjasama antara saya sebagai pengusaha saprodi dengan kelompok tani dan pelaksana, maka saya mendapat keuntungan karena penjualan saya meningkat juga bu.” (wawancara dengan Ibu Reski dilakukan pada tanggal 4 April 2013)

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa kepentingan pengusaha yang dipengaruhi oleh program SL-PTT di Kabupaten Nunukan adalah kepentingan bisnis mereka sebagai pengusaha pertanian. Dalam hal ini mereka mendapatkan peningkatan penjualan dan berdampak positif bagi usahanya.

Dari berbagai kepentingan yang terpengaruh tersebut, secara keseluruhan memberikan dampak positif atau keuntungan. Dengan adanya dampak tersebut, menciptakan partisipasi dari kelompok-kelompok yang kepentingannya terpengaruh dalam implementasi program SL-PTT ini diperoleh dari beberapa sektor yaitu sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan adanya dukungan secara luas maka program SL-PTT ini dapat dilakukan dengan partisipatif dan berkelanjutan.

Letak pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan dapat mempengaruhi efektifitas dari implementasi kebijakan. Ketepatan dalam menentukan letak pengambilan keputusan tergantung pada jenis atau

bentuk kebijakan. Jika memang bentuk kebijakan yang diimplementasikan lebih bersifat pada intruksi atau bersifat memaksa, maka letak pengambilan keputusan akan lebih efektif jika digunakan system *top down* akan tetapi ketika kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang bersifat loyalitas atau kemauan maka implementasi kebijakan lebih efektif ketika dilakukan dengan sistem *bottom up*.

Dalam implementasi program SL-PTT, letak pengambilan keputusan terdapat pada dua system yaitu *top down* dan system *bottom up*. Sistem *top down* dalam implementasi program SL-PTT di Kabupaten Nunukan. Program SL-PTT dalam hal ini segala keputusan mengenai persiapan implementasi diputuskan terpusat. Gambaran tersebut ditunjukkan pada uraian diatas. Seperti halnya pada proses penetapan penerima bantuan dan penetapan kelompok tani, dimana seluruh keputusan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang kemudian disetujui oleh Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi pada proses Pelaksanaan kegiatan, letak pengambilan keputusan menggunakan sistem *bottom up* yaitu segala keputusan mengenai kegiatan SL-PTT dilakukan di tingkat kelompok tani atau unit SL-PTT. Sementara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan hanya sebagai fasilitator dari kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Sidik Agus Setiyono, beliau menyebutkan bahwa;

“segala kegiatan mengenai implementasi program SL-PTT ini dilakukan di tingkat wilayah, begitu pula dalam memutuskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Jadi kelompok tani sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu untuk bermusyawarah

dengan pemandu lapangannya untuk menentukan kegiatan-kegiatan apa”(Wawancara dengan Bapak Sidik dilakukan pada tanggal 3 April 2013)

Hal serupa juga diutarakan oleh Bapak Subandi, beliau menyebutkan sebagai berikut;

“keputusan-keputusan dalam kegiatan SL-PTT itu semuanya tergantung pada kesepakatan kelompok tani. Misalnya saja ketika ada masalah seperti keterlambatan bantuan itu, ya langkah yang diambil itu berdasarkan keputusan dari kelompok tani dan pemađu. Disitu kita saling bertukar pikiran dan kita mengambil langkah untuk meminta pinjaman terlebih dahulu kepada perusahaan saprodi.” (Wawancara dengan Bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pengambilan keputusan dalam program SL-PTT terbagi menjadi dua sistem, yang pertama system keputusan terpusat dalam hal ini pembuat keputusan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan atau pemerintah pusat (*top down*) yang diterapkan pada proses pengorganisasi implementasi program SL-PTT. Kedua adalah sistem *bottom up* yaitu sistem keputusan yang dilakukan secara musyawarah ditingkat unit SL-PTT, yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan. Pada kenyataannya proses *bottom up* yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan implementasi program SL-PTT memberikan pengaruh pada ketanggapan pelaksana. Ketika terjadi permasalahan baik permasalahan tersebut berasal dari lingkungan sekitar atau dari kelemahan pemerintah pusat, melalui metode ini permasalahan dapat teratasi. Hal ini ditunjukkan dengan keputusan mengenai cara mengatasi permasalahan dalam keterlambatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dalam tahap pengadministrasian suatu program seringkali melibatkan banyak aktor-aktor dalam menentukan alokasi-alokasi sumber-sumber publik dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam pengadministrasian program memberikan peluang kepada para aktor tersebut untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya di dalam suatu program. Lingkungan implementasi dalam program pendampingan SL-PTT adalah daya tanggap dari para pelaksana teknis dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumberdaya-sumberdaya program SL-PTT di Kabupaten Nunukan. Lingkungan implementasi ini sangat berpengaruh pada implementasi karena berhubungan dengan alokasi dan distribusi sumberdaya.

Masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tidak terlepas dari kepentingannya di dalam program tersebut, dan masing-masing mungkin berusaha untuk mencapai dengan cara mengajukan tuntutan dalam prosedur alokasi sumber. Dalam hal ini

kekuasaan, kepentingan dan strategis dari aktor yang terlibat memberikan pengaruh dalam implementasi kebijakan. Untuk mengidentifikasi kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat dapat dilihat dari hasil akhir diantaranya adalah apa yang diperoleh.

Dalam implementasi program pendampingan SL-PTT aktor-aktor yang terlibat didalam proses pengorganisasian implementasi kebijakan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah (UPT BP3K) Kabupaten Nunukan, serta pemandu lapangan. Maka dalam hal ini identifikasi mengenai kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat mencakup lembaga-lembaga tersebut.

Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan merupakan institusi atau lembaga yang memiliki kekuasaan dalam memutuskan segala sesuatu hal ini identifikasi mengenai kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat mencakup lembaga-lembaga tersebut.

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nunukan merupakan institusi atau lembaga yang memiliki kekuasaan dalam memutuskan segala sesuatu mengenai pengalokasian dan pendistribusian sumberdaya. Sementara kepentingan dari Dinas Pertanian terhadap program ini adalah peningkatan hasil produksi pertanian, dengan adanya peningkatan tersebut maka pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian telah

dinilai berhasil. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Subandi, beliau menyebutkan sebagai berikut;

“....peningkatan produksi itu yang paling utama, dengan adanya peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Nunukan, maka pembangunan-pembangunan yang kita lakukan selama ini ada hasilnya dan dapat dinilai bahwa pembangunan yang kita lakukan dinilai baik (Wawancara dengan bapak subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Sementara untuk strategi yang dilakukan agar kepentingan tersebut terlaksana, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan melakukan peninjauan langsung di lapangan. Dengan peninjauan tersebut maka Dinas Pertanian akan mengetahui tentang kebutuhan yang harus di salurkan dan di mana saja kebutuhan tersebut harus disalurkan. Berikut pernyataan dari Bapak SidikAgus Setiyono mengenai hal ini;

“dengan melakukan pemantauan perkembangan di tingkat lapangan maka, kita dapat mengetahui masalah yang ditemui di lapangan, pelaksanaan di lapangan bagaimana, kendala yang terjadi apa, koordinasi dan informasi timbal balik yang dari kabupaten ke kecamatan juga ke kelompok, kebutuhannya sumber dayanya seperti apa. Jadi strateginya ya selalu memantau perkembangan di tingkat lapang dengan melihat berbagai masalah yang ada, sehingga kita dapat menentukan mana saja yang benar –benar butuh sumber untuk melakukan implementasi program (Wawancara dengan Bpk. Sidik Agus Setiyono dilakukakan pada tanggal 3 April 2013)

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa kepentingan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan pada program SL-PTT adalah peningkatan hasil produksi pertanian. Dengan posisi sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan di tingkat kabupaten, Dinas Pertanian memiliki kekuasaan dalam memutuskan segala sesuatu mengenai pendistribusi dan

pengalokasian sumber-sumber yang dibutuhkan untuk implementasi program SL-PTT. Sementara untuk strategi yang digunakan agar kepentingannya terlaksana, Dinas Pertanian melakukan peninjauan langsung untuk mengetahui kondisi-kondisi di lapangan, sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Aktor berikutnya adalah UPT dan pemandu lapangan. UPT dan pemandu lapangan merupakan pelaksana teknis ditingkat kecamatan dan desa. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa ruang kewenangan atau kekuasaan UPT dan pemandu lapangan adalah memilih dan menentukan siapa saja dan dimana saja sumberdaya itu disalurkan. Seperti halnya apa yang diutarakan oleh Bapak Azri Azis sebagai berikut;

“jadi gini bu, UPT itu merupakan Unit Pelaksana Teknis yang ada di Kecamatan. Jadi segala kegiatan secara teknis Dinas Pertanian di kecamatan ya itu berkoordinasi dengan UPT untuk penyelenggaraan SL-PTT, kalau dalam pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang dibutuhkan SL-PTT, itu kewenangan Dinas untuk menentukan, Lah UPT ini digunakan oleh Dinas sebagai rujukan untuk ketentuan-ketentuan itu. Jadi Dinas akan memutuskan ketika UPT mengusulkan siapa-siapa yang mendapatkan bantuan.” (Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Azri Azis dilakukan pada tanggal 2 April 2013)
Sementara pernyataan Sri Wahyuni menyebutkan bahwa;

“ saya ini sebagai pemandu, pemandu itu tugasnya menyuluh, meninjau kondisi kelompok tani. Jadi kalau kewenangan pemandu lapangan untuk alokasi dan pendistribusian itu lebih pada teknis, misalnya kita memilih kelompok mana yang memang berhak untuk diajukan ke UPT dan Dinas Pertanian ya kan kita ini yang mengetahui kondisi lingkungannya jadi keputusan-keputusan dari UPT dan Dinas Pertanian itu didasarkan atas usulan-usulan dari kita. Garis besarnya seperti itu bu”(Wawancara dengan Sri Wahyuni dilakukan pada tanggal 3 April 2013)

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa UPT dan pemandu lapangan merupakan pelaksana teknis dari Dinas Pertanian, maka UPT dan Pemandu memiliki wewenang untuk memilih siapa dan dimana saja sumberdaya program SL-PTT dapat di alokasikan dan didistribusikan.

Kepentingan yang terdapat dalam UPT dan Pemandu secara umum adalah kemudahan untuk menjalankan tugas-tugas pendampingan. Di dalam program pendampingan SL-PTT, UPT dan Pemandu mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti halnya forum pertemuan, pelatihan, dan akses kepada perusahaan-perusahaan swasta. Untuk mencapai mewujudkan kepentingannya UPT dan Pemandu lapangan menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk mendekatkan secara langsung hubungannya dengan kelompok tani atau perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini seperti halnya yang telah disebutkan oleh Bapak Andhika sebagai berikut;

“.....kalau keuntungan kita itu ya, kita dapat mudah menjalankan tugas gitu bu. Jadi dengan adanya program SL-PTT ini kita diberikan fasilitas-fasilitas seperti pelatihan untuk pendampingan, pertemuan dengan petani, atau perusahaan-perusahaan pertanian, ya kita memanfaatkan semuanya itu untuk mempermudah tugas kita. Kalau strateginya ya kita gunakan fasilitas yang di berikan tersebut untuk melakukan pendekatan secara intens kepada kelompok tani atau perusahaan-perusahaan swasta agar mereka juga dapat membantu meringankan tugas kita bu” (Wawancara dengan Bapak Andhika dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

Sementara pernyataan Ibu Nunung Apriyani menyebutkan bahwa;

“agar program ini berjalan kan butuh kelompok tani yang memang benar-benar mampu bu, jadi kita pilih yang benar-benar mampu itu kelompok mana saja. Lah kelompok itu yang nantinya kita ajukan untuk mendapatkan sumber daya kegiatannya. Kalau misalnya kita mengalokasikan untuk semua kan juga gak cukup, sementara kalau kita mengalokasikan untuk kelompok yang masih kurang mampu

kita sendiri yang nanti repot, bisa-bisa programnya jadi gagal semua. (Wawancara dilakukan dengan Ibu Nunung Apriyani dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa secara umum strategi yang digunakan oleh pemandu dan UPT adalah memilih kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempermudah tugas-tugas mereka disisi pemandu, strateginya lebih pada pendekatan kepada kelompok tani dan perusahaan swasta dengan memanfaatkan fasilitas yang di berikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Sementara di sisi UPT lebih pada pemilihan kelompok tani yang memang benar-benar mampu untuk membantu tugasnya dalam hal teknis pelaksanaan program SL-PTT, sehingga program SL-PTT di lingkup wilayahnya dapat berjalan lancar.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa kepentingan yang terdapat pada aktor-aktor yang dapat terlihat dalam alokasi dan pendistribusian sumber daya program SL-PTT memiliki tujuan yang sama yaitu keberhasilan implementasi program SL-PTT. Untuk itu strategi yang digunakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, UPT dan Pemandu lapang dapat berjalan secara sinergis dan saling mendukung satu dengan yang lain. Ditinjau dari implementasi program SL-PTT, maka dapat di ketahui bahwa para implementor yang terlibat didalamnya antara lain ; kelompok tani, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UPT BP3K) tingkat kecamatan, pemandu lapangan dan perusahaan pertanian.

Secara umum dampak yang diberikan pada implementasi program SL-PTT adalah dampak yang memberikan keuntungan bagi lembaga-lembaga yang terlibat. Dengan keuntungan yang diberikan maka lembaga-lembaga tersebut akan memberikan dukungan terhadap implementasi program SL-PTT di Kabupaten Nunukan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh bapak Senong, beliau mengutarakan sebagai berikut ;

“positif, petani lebih efektif dan efisien terhadap pengeluaran. Karena tahu penyakitnya ini, jenis obatnya segini, dosisnya sekian. Kalo gak tau asal ada obat maka disemprot, kan biasanya petani karena ingin tanaman selamat dari hama kan...? Program SL-PTT juga dapat meningkatkan hasil panennya, meningkatkan produktivitas dan lebuah berkualitas.” (wawancara dilakukan dengan bapak Senong pada tanggal 29 Maret 2013)

Selain pernyataan tersebut, juga terdapat pernyataan serupa, yaitu pernyataan bapak Andi Nurung sebagai ketua Gabungan Kelompok Tani Cahaya Simangkadu, beliau menyebutkan sebagai berikut :

“karena sektor pertanian adalah sektor yang utama dalam ekonomi, maka kalau petani mengikuti SL-PTT, dengan sendirinya petani bisa merasakan keuntungannya yaitu peningkatan produksi. Jika dibandingkan dengan yang tidak mengikuti, perkembangan produksinya akan ada perbedaan.” (wawancara dilakukan dengan bapak Andi Nurung pada tanggal 2 April 2013)

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa, kepentingan petani, dan khususnya bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani unit SL-PTT yaitu peningkatan usaha pertaniannya. Dengan adanya program pendampingan SL-PTT ini maka petani yang terlibat langsung dan menerapkanya memperoleh keuntungan yaitu peningkatan produksi dan produkivitas lahan pertanian petani. Artinya bahwa pengaruh yang

diberikan Implementasi Program SL-PTT memberikan keuntungan terhadap kepentingan petani.

Sementara untuk kepentingan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang terpengaruh terhadap implementasi program SL-PTT, disebutkan oleh Bapak Sidik Agus Setiyono sebagai berikut ;

“yang pertama dari segi petugas itu lebih intensif dalam pembinaan kelompok karena adanya dana yang dialokasikan, yang kedua adanya pertemuan berkala, yang ketiga ini yang paling diharapkan adanya peningkatan produktivitas. Untuk itulah Program ini memang sangat bagus karena dapat memberikan hal yang positif bagi petani ataupun bagi petugas pertanian. Dari situlah kenapa program ini tetap menjadi program unggulan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 ini.” (wawancara dengan Bapak Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2013).

Berikut pernyataan yang dirumuskan oleh bapak Azri Azis ;

“kebanyakan cara bercocok tanam petani teknologi yang digunakan itu dari leluhurnya, jadi kalo disuruh gini gak mau. Nah dengan adanya program SL-PTT ini, kita dapat mendekatkan diri kepada petani karena pendekatan yang dilakukan sangat efektif dan berdampak pada peningkatan produksi di sektor tanaman pangan.” (wawancara dengan Bapak Azri Azis dilakukan pada tanggal 2 April 2013).

Dari pernyataan tersebut maka dapat dinilai bahwa, dengan adanya program SL-PTT ini, memberikan dampak kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan untuk mencapai target Dinas yaitu peningkatan produksi dan produktivitas, serta perubahan pengolahan tanaman yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan memperoleh keuntungan dari program SL-PTT ini. Dari keuntungan yang diperoleh tersebut maka program SL-PTT ini akan tetap

menjadi program yang diutamakan dan dilanjutkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.

Secara umum persepsi dari para kelompok tani SL-PTT, merasakan kepuasan terhadap kinerja para petugas pelaksana program pendampingan SL-PTT. Dengan kinerja dari para pelaksana terutama para pemandu, petani dapat menerima manfaat dari program pendampingan SL-PTT di Kabupaten Nunukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ruslan, beliau menyebutkan bahwa;

“selama ini kita merasa puas terhadap kinerja para pelaksana. Dengan upaya yang mereka lakukan terutama para pemandu kelompok tani, kita dapat mengerti tentang teknologi PPT ini. Dengan pengetahuan yang diberikan pelaksana, kita dapat menuai hasilnya yaitu peningkatan usaha kita.”(Wawancara dengan Bapak Ruslan dilakukan pada tanggal 4 April 2013)

Pernyataan lainnya adalah pernyataan dari Bapak Senong, beliau menyebutkan bahwa;

“saya merasa puas terhadap kinerja mereka. Saya rasa para petugas sangat membantu kita dalam segala kegiatan SL-PTT ini, sehingga kita kelompok tani dapat menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik. Selain itu para petugas pelaksana juga sangat ramah kepada kita. Cara pengajarannya itu menarik, mudah dimengerti, dan ketika ada permasalahan yang kita alami, para pemandu langsung memberikan jalan keluarnya.”(Wawancara dengan Bapak Senong dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Dari pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa sifat dan karakteristik para pelaksana terutama para pemandu sangat dirasakan oleh para kelompok tani pelaksana SL-PTT. Dengan melihat metode dan keseriusan para pelaksana untuk mendampingi kelompok tani, seperti cara penyampaian materi, keramahan dan penanganan

permasalahan, para kelompok tani merasakan kepuasan kinerja para pelaksana.

Uraian tersebut menggambarkan bahwa sifat dan karakteristik para pelaksana untuk mendorong kegiatan SL-PTT yang dilakukan kelompok tani cukup baik. Hal ini yang kemudian membentuk rasa kepuasan kelompok tani terhadap kinerja mereka. Dampak dari semua itu adalah kegiatan implementasi program SL-PTT yang dilakukan oleh kelompok tani dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan program SL-PTT di Kabupaten Nunukan.

d. Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak

Keputusan-keputusan yang dibuat pada saat perumusan kebijakan dapat pula menunjukkan siapa yang akan ditugasi untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan program, maka pelaksana memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor pelaksana ini meliputi pemahaman tugas dan peranannya di dalam implementasi kebijakan, dan yang kedua adalah kemauan yang dimiliki pelaksana harus sesuai dengan kebutuhan implementasi program.

Dalam implementasi program pendampingan SL-PTT, Keputusan mengenai siapa saja yang akan ditugasi untuk mengimplementasikan program yang telah memuat di dalam petunjuk teknis pelaksanaan. sesuai dengan apa yang telah digambarkan di atas, bahwa di dalam petunjuk teknis pelaksanaan telah memuat berbagai metode dan kegiatan implementasi termasuk penugasan terhadap pelaksana program pendampingan SL-PTT, didalam implementasi program pendampingan SL-PTT, pelaksan-pelaksana yang terlibat diantaranya adalah Sub Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nunukan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nunukan, dan Pemadu Lapangan.

Secara umum para pelaksana tersebut telah memahami dengan jelas tentang apa yang ditetapkan pada petunjuk teknis pelaksanaan. Dengan kejelasan atas posisi dan peranannya didalam implementasi, para pelaksana khususnya pelaksana teknis ditingkat desa atau unit SL-PTT melaksanakan tugasnya dengan berbagai inisiatif untuk mencapai tujuan dari tugas yang diberikannya. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Sidik Agus Setiyono, beliau menyebutkan bahwa ;

“ saya rasa, petunjuk teknis yang digunakan sebagai pedoman bagi teman-teman ini sudah cukup jelas kok untuk dipahami. Ya setidaknya kita sebagai pelaksana tahu tentang tugas dari masing-masing, seperti hanya pada saya sebagai staf dari Sub Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, saya berposisi sebagai penanggung jawab secara teknis di tingkat Kabupaten, Jadi yang saya lakukan hanyalah memberikan fasilitas, pemantauan, dan evaluasi bagi teman-teman di tingkat kecamatan atau desa.”(Wawancara dengan Bapak Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2010)

Pernyataan lain juga diutarakan oleh Bapak Joko Sutomo, beliau mengatakan bahwa;

“jadi, didalam petunjuk teknis pelaksanaan itu sangat jelas memberikan petunjuk pada kita sebagai pelaksana mengenai tugas pokok dan fungsi didalam implementasi program pendampingan SL-PTT ini, akan tetapi sering kali kondisi lapangan tidak sesuai dengan gambaran dari para perumus petunjuk teknis, jadinya ya..... setiap kegiatan yang dilakukan itu banyak variasinya. Yang terpenting adalah tujuan dari tugas yang diberikan kepada kita itu tercapai.” (Wawancara dilakukan dengan Bapak Joko Sutomo dilakukan pada tanggal 01 April 2013)

Berikutnya adalah pernyataan dari Bapak Subandi, Beliau menyebutkan bahwa;

“ sudah cukup jelas kok dan mudah untuk dipahami, akan tetapi permasalahan bukan dari pemahaman kita tentang tugas pokok dan peranan kita didalam implementasi, melainkan bagaimana kita harus melakukan tugas-tugas itu. Ya walaupun didalam petunjuk teknis sudah dirumuskan apa saja yang harus kita lakukan, tetapi kan tidak semudah itu, kita harus melihat kondisi-kondisi inilah butuh kreatifitas dari pelaksana. Seperti halnya pada kondisi yang tidak kita harapkan, contohnya itu keterlambatan bantuan, ini kan kasus yang sering terjadi dan di petunjuk teknis ini tidak dimuat, pada kondisi ini lah pemandu dan kelompok tani melakukan pinjaman dahulu kepada pengusaha saprodi yang menjadi mitra kita setelah bantuan tujuan makan akan dibayar.”(Wawancara dengan Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa, apa yang dijelaskan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan mengenai tugas pokok dan fungsi para pelaksana implementasi program pendampingan SL-PTT, dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana. Akan tetapi, sering kali para pelaksana dalam melakukan kegiatan-kegiatan implementasi tidak mengacu pada petunjuk teknis dalam kondisi tertentu. Hal ini disebabkan karena kondisi-kondisi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang terdapat pada petunjuk teknis pelaksanaan. Dari fenomena ini

dapat dilihat bahwa pemahaman para pelaksana lebih mengacu pada tujuan atau hasil dari tugasnya, bukan proses yang dilaluinya.

Berikut adalah kemampuan dari petugas, dalam hal ini adalah kemampuan para pemandu. Secara teknis, peran pemandu lapangan memiliki posisi yang sangat penting, di mana mereka yang bertugas sebagai penyampai informasi atau mengajar kelompok tani di tuntut untuk memiliki pengetahuan yang khusus. Untuk menciptakan hal tersebut, sebelum implementasi program SL-PTT, Pemandu lapangan terlebih dahulu mendapat bekal pelatihan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nunukan. Pelatihan yang dilakukan ini menyangkut dengan hal-hal yang dibutuhkan dari pemandu menguasai materi mengenai PPT organisme pengganggu tanaman dan kemampuan dalam penyampaian informasi kepada petani. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Ibu Sri Wahyuni, beliau menyebutkan bahwa;

“dalam pelatihan yang saya ikuti, saya diajarkan berbagai hal tentang SL-PTT khususnya, yaitu mengenai agrosistem. Materi yang diberikan mengenai agrosistem ini memberikan pemahaman pada kita tentang penyesuaian jenis tanaman yang akan ditanami dengan kondisi lingkungan. Yang fungsinya adalah, kemampuan kita untuk memilih jenis-jenis tanaman, jadi nantinya kita dapat memilih tanaman yang layak untuk di tanam di daerah sini itu apa, dan yang tidak layak itu apa, lalu yang perlu diutamakan itu tanaman apa. Dengan begitu maka produksi yang akan dihasilkan mencapai titik maksimal. Selain pemahaman mengenai agroekosistem pada pelatihan tersebut juga kita diberikan materi tentang pengendalian PTT organisme pengganggu tanaman. Pada materi ini kita mendapat pemahaman mengenai jenis-jenis penyakit yang ada di tanaman, yaitu penyakitnya apa dan pengendaliannya bagaimana. Pengendalian yang ditekankan pada tahap ini adalah pengendalian hama non kimia atau dengan menggunakan biogen hayati, serta cara memproduksi bioagen dengan cara-cara untuk menyampaikan materi tersebut kepada petani. Cara-cara atau metode yang digunakan adalah metode pembelajaran orang dewasa. Dalam hal ini sekolah lapangan yang dimaksud bukan

seperti sekolah-sekolah formal, pembelajaran di sekolah ini lebih menekankan pada pendekatan terhadap petani, jadi proses belajarnya itu lebih santai, dan tempatnya pun sesuai dengan keberadaan kelompok tani.”(Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni dilakukan pada tanggal 3 April 2013)

Dari pernyataan tersebut maka dapat dilihat bahwa, untuk mengimplementasikan program SL-PTT. Para pelaksana diberikan pembekalan kemampuan yang lebih khusus. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi pemahaman agrosistem, pengendalian organisme, pengganggu tanaman dan cara penyampaian yang dilakukan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, maka pada proses implementasi program petani telah mampu untuk menerapkannya pada lahan-lahan miliknya.

Suatu kebijakan pasti ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Akan tetapi bentuk dan jenis manfaat yang tidak sesuai dan tidak diharapkan akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Begitu pula bagi manfaat yang tidak dapat dibagi secara merata, akan memberikan dampak pada ketidakadilan sosial dan kemudian akan berujung pada penolakan atau benturan-benturan dengan kelompok sasaran.

Dalam hal ini manfaat yang diberikan pada implementasi program SL-PTT di kabupaten Nunukan adalah manfaat yang diharapkan oleh para petani, yaitu pengetahuan petani dalam hal pengelolaan tanaman secara terpadu. Dengan kemampuan tersebut petani akan dapat menerapkannya dan berdampak pada peningkatan produksi hasil pertanian. Sementara untuk jenis manfaatnya, adalah jenis manfaat-

manfaat yang takkan habis terbagi, yang dapat dinikmati oleh semua kalangan petani. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah di jelaskan oleh Bapak Tulus Arif Widodo, beliau mengutarakan sebagai berikut;

“Manfaat yang didapat oleh kelompok tani adalah pengetahuan tentang pengobatan atau tindakan preventif serangan hama. Kalau tidak ada SL-PTT petani yang awam tetap awam, tidak tahu jenis apa penyakitnya, hamanya apa dan pencegahannya, apa obatnya itu juga jadi tahu. Jadi manfaatnya jelas cukup banyak terhadap petani, sehingga program ini sangat efisien, sangat efektif terhadap pengembangan tanaman, produktivitas dan peningkatan hasil padi. Selain itu program ini sangat mudah untuk dicontoh atau disalurkan kepada petani lain agar petani lain yang daerahnya sama juga dapat memperoleh manfaatnya (Wawancara dengan Bapak Tulus Arif Widodo dilakukan pada tanggal 01 April 2013)

Selanjutnya adalah pendapat dari Bapak Paweruddin, beliau mengatakan sebagai berikut;

“dengan adanya program pendampingan SL-PTT ini, yang saya dapatkan adalah pengetahuan dalam bertani, dengan adanya peningkatan pengetahuan tersebut, saya jadi mampu untuk memutuskan langkah-langkah apa yang saya pilih jika ada permasalahan. (Wawancara dengan Bapak Paweruddin dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam implementasi program SL-PTT telah mampu untuk memberikan manfaat kepada petani seperti halnya yang dirumuskan pada proses perumusan program. Manfaat tersebut meliputi kemampuan petani mengenai pengelolaan tanaman secara terpadu (PTT) serta kemampuan tersebut dapat disalurkan kepada petani lain yang belum atau tidak terlibat dalam kegiatan program SL-PTT Di Kabupaten Nunukan. Dengan tercapainya manfaat tersebut maka Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT ini direspon oleh masyarakat petani dengan baik.

Jangkauan perubahan pada suatu program akan dapat mempengaruhi implementasinya. Hal ini karena jangkauan perubahan di setiap kebijakan tidak selalu dapat diterima oleh masyarakat. Ketika suatu perubahan yang telah dirumuskan mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran maka jangkauan perubahan ini akan mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.

Program pendampingan SL-PTT merupakan program yang dirancang untuk merubah perilaku petani dalam mengelola tanaman. Dalam hal ini, petani akan diajarkan metode-metode baru mengenai pengelolaan tanaman terpadu, yang dapat meningkatkan hasil produksi usaha taninya. Secara umum jangkauan perubahan yang diharapkan pada program SL-PTT ini, masih dapat diterima oleh petani. Berdasarkan pada gambaran dari Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT diatas, menekankan bahwa perubahan yang terdapat pada Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT ini sangat didukung oleh petani. Dari dukungan tersebut menciptakan sebuah antusias atau kemauan petani untuk melakukan perubahan yang diharapkan. Dengan tindakan tersebut maka Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT dapat dikatakan berhasil. Gambaran ini juga ditekankan lagi oleh Bapak Andi Jumadil sebagai berikut;

“Sebelum adanya program pendampingan SL-PTT ini, cara bertanam saya ya cara yang tradisional, ya pokoknya sawah ditanami, dikasih pupuk, jika ada hama ya di semprot, tapi ketika saya berperan aktif dalam program SL-PTT ini saya jadi mengerti kalau semuanya itu ada aturannya untuk mendapatkan hasil yang baik. Sekarang peralatan yang saya gunakan sesuai dengan petunjuk dari petugas lapangan” (Wawancara dengan Bapak Andi Jumadil dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa perubahan yang dirumuskan pada Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT yaitu pengelolaan tanaman terpadu, dapat diterima oleh petani. Penerimaan tersebut diwujudkan dalam tindakan-tindakan petani dalam melakukan pengelolaan tanaman. Dengan adanya tindakan tersebut maka Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT dapat dikatakan berhasil. Matriks hubungan antara faktor yang berpengaruh dan implementasi dapat dilihat pada Tabel 17 berikut :

Tabel 17. Matrik Hubungan antara Faktor yang berpengaruh dan Implementasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi	Fenomena	Kinerja/Implementasi
1. Komunikasi ; Implementasi akan berjalan efektif jika tujuan kebijakan dikomunikasikan dengan para pelaksana	Komunikasi para implementor dengan stake holder terjalin dari berbagai kegiatan antara lain proses sosialisasi dan proses pelaksanaan meliputi pertemuan-pertemuan.	Terdapat hubungan yang erat antara komunikasi dengan implementasi SL-PTT
2. Sumberdaya ; Sumberdaya merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk implementasi kebijakan.	permasalahan yang terjadi adalah keterlambatan pendistribusian dana bantuan, meskipun demikian pelaksanaan SL-PTT tetap berjalan dengan kerjasama dengan pengusaha saprodi.	1. Kurang ada hubungan yang erat antara sumberdaya pendanaan (penyaluran bantuan) dengan implementasi SL-PTT 2. Terdapat hubungan yang erat antara sumber daya manusia dengan implementasi SL-PTT
3. Disposisi ; adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor	sifat dan karakteristik para pelaksana sangat dirasakan oleh kelompok tani pelaksana SL-PTT, dengan melihat upaya dan keseriusan para pelaksana untuk mendampingi kelompok tani	Terdapat hubungan yang erat antara Disposisi dengan implementasi SL-PTT
4. Birokrasi	Petunjuk teknis dapat dipahami secara jelas oleh pelaksana	Terdapat hubungan yang erat antara birokrasi dengan implementasi SL-PTT

Dari tabel matrik hubungan antara faktor yang berpengaruh dan implementasi dapat dijelaskan bahwa, faktor komunikasi memperlihatkan terdapat hubungan yang erat antara komunikasi dengan implementasi SL-

PTT. Komunikasi para implementor dengan stakeholder dari berbagai

kegiatan antara lain proses sosialisasi SL-PTT dan proses pelaksanaan meliputi pertemuan-pertemuan. Implementasi akan berjalan efektif jika tujuan kebijakan dikomunikasikan dengan para pelaksana.

Faktor Sumberdaya memperlihatkan kurang adanya hubungan yang erat antara sumberdaya pendanaan (penyaluran bantuan) dengan implementasi SL-PTT. Sumberdaya merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk implementasi kebijakan. Permasalahan yang terjadi adalah keterlambatan pendistribusian dana bantuan, meskipun demikian pelaksanaan SL-PTT tetap berjalan bekerjasama dengan pengusaha sapirodi. Terdapat hubungan yang erat antara sumberdaya manusia dengan implementasi SL-PTT.

Faktor Disposisi menunjukkan terdapat hubungan yang erat antara disposisi dengan implementasi SL-PTT. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Sifat dan karakteristik para implementor sangat dirasakan oleh kelompok tani pelaksana SL-PTT, dengan melihat upaya dan keseriusan para pelaksana untuk mendampingi kelompok tani.

Faktor Birokrasi memperlihatkan terdapat hubungan yang erat antara birokrasi dengan implementasi SL-PTT, dapat dilihat dengan adanya petunjuk teknis yang dapat dipahami secara jelas oleh pelaksana.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah di sajikan, dinalisis dan diinterpretasikan sebelumnya, maka pada bab ini dibuat sebuah simpulan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian yang telah di tetapkan sebelumnya. Selain itu penulis juga akan merekomendasikan saran-saran dari hasil penelitian.

A. Simpulan

1. Implementasi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan berjalan dengan lancar sesuai petunjuk teknis, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam petunjuk teknis, seperti keterlambatan turunnya bantuan. Dari fenomena ini dapat dilihat bahwa pemahaman para pelaksana lebih mengacu pada tujuan atau hasil dari tugasnya, bukan proses yang dilaluinya.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SL-PTT di Kabupaten Nunukan yaitu terdapat hubungan yang erat antara faktor komunikasi, disposisi, sumberdaya manusia dan birokrasi dengan implementasi. Kurang ada hubungan yang erat antara sumberdaya pendanaan (penyaluran bantuan) dengan implementasi.

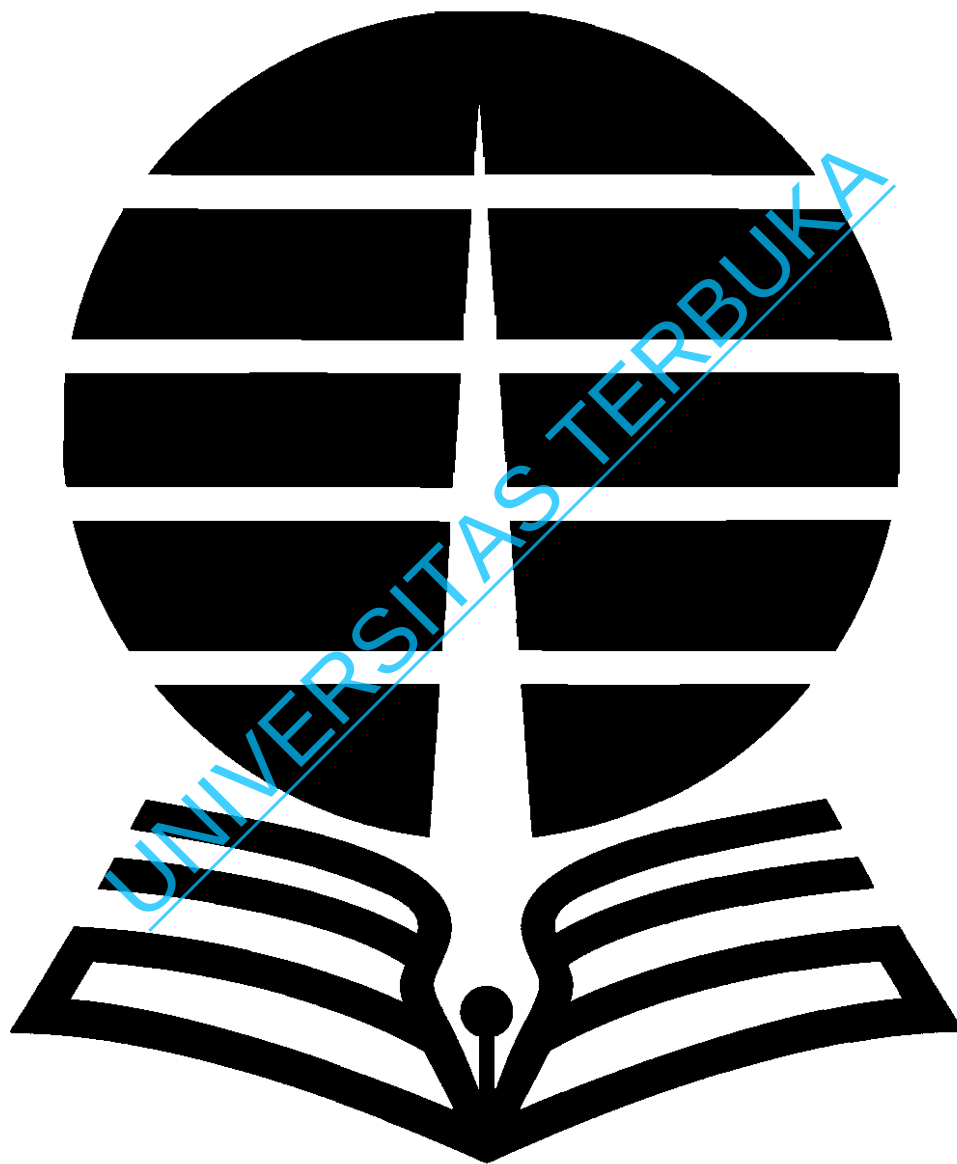
B. Saran

1. Sebaiknya kebijakan penyaluran bantuan dilaksanakan segera setelah proses seleksi CP/CL diajukan di tingkat Kabupaten ke Propinsi pada awal

tahun, sehingga proses penyelenggaraan SL-PTT di tingkat desa dapat dilaksanakan sesuai dengan jadual musim tanam petani.

2. Perlu menghidupkan petani penangkar benih unggul di daerah untuk mengantisipasi lambatnya distribusi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dari pusat.
3. Sebaiknya ada penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas bantuan sosial, perbandingan antara Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU).

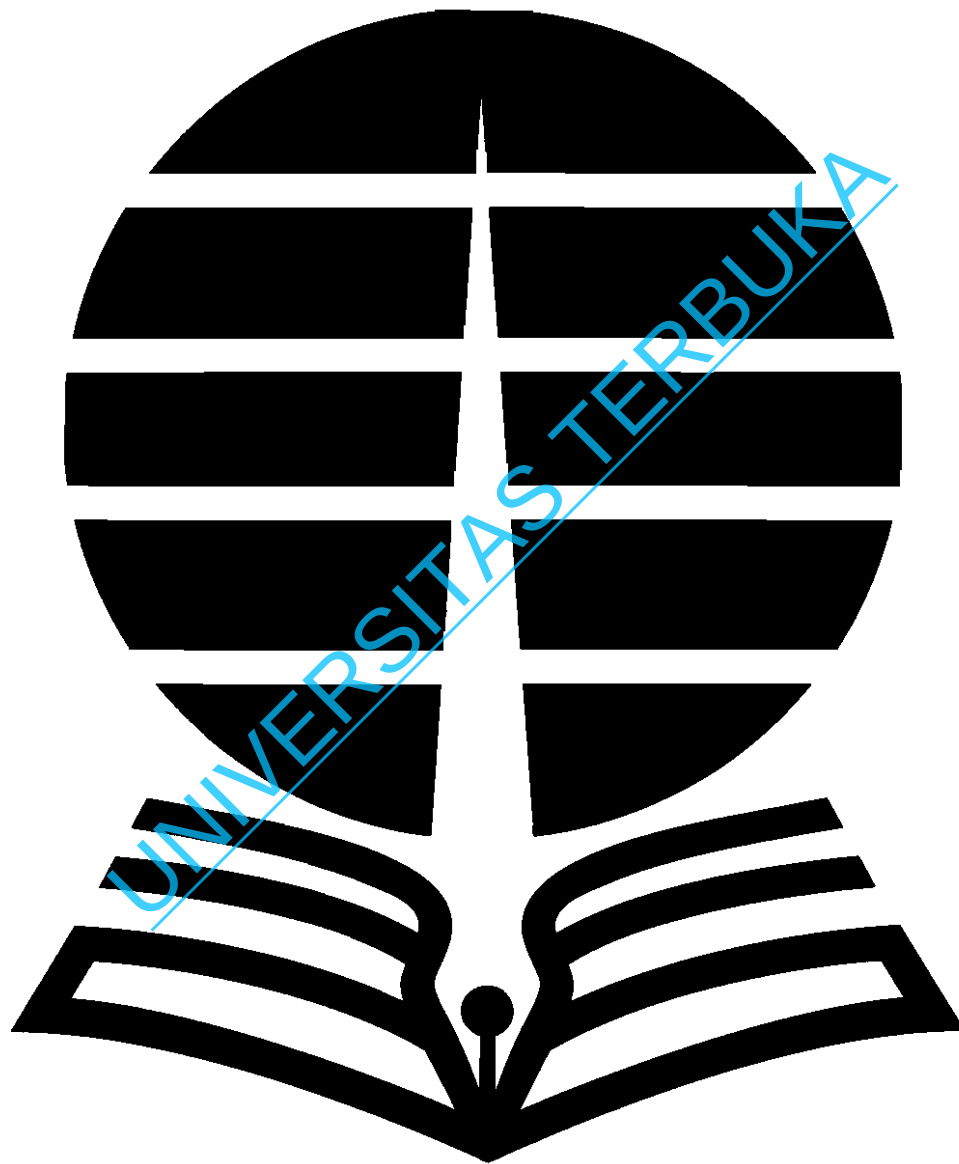
UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Abdullah, Syukur, 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang.
- Abdul Wahab, Solihin, 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Adjid D A, 2001. Penyuluhan Pertanian. Yayasan Sinar Tani. Jakarta.
- Departemen Pertanian, 2009. Inovasi Teknologi Padi. <http://www.deptan.go.id>.
- Dunn, William N, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik ed.2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William, 1999. Pengantar Analisa Kebijakan Publik (Edisi II). UGM Press: Yogyakarta.
- Edward III, 1980. Implementation Public Policy. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World, new jersey: Princetown University Press.
- Hasyim, H. 2003. Analisis Hubungan Faktor Sosial, Ekonomi Petani terhadap Program Penyuluhan Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Irawan P (2011). Metodologi Penelitian Administrasi. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kartaatmadja, S. dan A. Fagi, 2000. Pengelolaan Tanaman Terpadu: Konsep dan Penerapan. Dalam. Makarim et al. (Eds). Tonggak Kemajuan Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Konsep dan Stategi Peningkatan Produksi Pangan. Simposium Penelitian Tanaman Pangan IV. Bogor 22-24 November 1999.
- Kartasapoetra, A.G., 1991. Hama Hasil Tanaman Dalam Gudang, Rineka Cipta Jakarta.
- Mardikanto Totok, 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press – Surakarta.

- Mardikanto Totok, 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Universitas Sebelas Maret Press. Surakarta.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.
- Mosher A T, 1981. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Yasaguna Jakarta
- Sa'id. G. E. dkk., 2001. Manajemen Teknologi Agrobisnis. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Soekartawi, 2002, Analisis Usaha Tani. UI – Press, Jakarta.
- Suryana A. dkk. 2008. Panduan Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Tilaar dan Nugroho, 2008. Kebijakan Pendidikan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Van Den Ban. A.W. dan H.S Hawkins, 1999. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta
- Weimer, David L and Aidan R. Vining, 1999. Policy Analysis: Concepts and Practice, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.



Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

**Informan : Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Peternakan Kabupaten Nunukan**

A. Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan :

1. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan program SL-PTT?
2. Apa maksud dan tujuan diselenggarakannya program SL-PTT?
3. Bagaimana proses penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan?
4. Apakah implementasi SL-PTT di Kabupaten Nunukan dilaksanakan sesuai *standard operating procedures* (SOP)?
5. Apakah penyelenggaraan SL-PTT berdampak pada peningkatan produktivitas?
6. Apa saja hambatan dalam penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan ?
7. Apakah implementasi SL-PTT memberi dampak pada aspek lain?
8. Apa tanggapan dan saran saudara mengenai implementasi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan?

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan

1. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan?

2. Bagaimana hubungan koordinasi dengan implementor di tingkat kecamatan dan kelompok tani pelaksana SL-PTT?
3. Bagaimana implementasi SL-PTT hubungannya dengan ketersediaan sumber daya manusia, sumberdaya peralatan dan sumberdaya pendanaan?
4. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang timbul jika salah satu sumberdaya tidak maksimal?
5. Bagaimana watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor?
6. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Unit Pelaksana Teknis (UPT)/BPP dan Penyuluh Lapangan

A. Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan :

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang program SL-PTT?
2. Apa maksud dan tujuan diselenggarakannya program SL-PTT?
3. Bagaimana proses penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan?
4. Apakah implementasi SL-PTT di Kabupaten Nunukan dilaksanakan sesuai *standard operating procedures* (SOP)?
5. Apakah penyelenggaraan SL-PTT berdampak pada peningkatan produktivitas?
6. Apa saja hambatan dalam penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan ?
7. Apakah implementasi SL-PTT memberi dampak pada aspek lain?
8. Apa tanggapan dan saran saudara mengenai implementasi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan?

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan

1. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan?
2. Bagaimana hubungan koordinasi dengan implementor di tingkat kecamatan

3. Bagaimana implementasi SL-PTT hubungannya dengan ketersediaan sumber daya manusia, sumberdaya peralatan dan sumberdaya pendanaan?
4. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang timbul jika salah satu sumberdaya tidak maksimal?
5. Menurut bapak/ibu apakah program SL-PTT memberi dampak pada petugas lapangan dan kelompok tani?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Petani / Kelompok Tani

A. Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan :

1. Dari mana Bapak /Ibu memperoleh informasi awal SL-PTT?
2. Apakah pernah disosialisasikan/diinformasikan oleh petugas/Dinas terkait mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan SL-PTT?
3. Apakah selama penyelenggaraan SL-PTT berlangsung dilakukan pendampingan dari petugas lapangan?
4. Apakah penyelenggaraan SL-PTT berjalan lancar dilapangan sesuai dengan SOP yang disosialisasikan oleh petugas/Dinas?
5. Apakah penyelenggaraan SL-PTT merata untuk seluruh anggota Kelompok Tani di wilayah saudara?

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan.

1. Apakah penyelenggaraan SL-PTT ini memberi manfaat kepada Kelompok Tani ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SL-PTT?
3. Apa tanggapan dan saran saudara mengenai implementasi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan?

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Pengusaha/swasta

A. Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan :

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang program SL-PTT?
2. Bagaimana keterkaitan bapak/ibu dengan aparat pemerintah, seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, penyuluh atau bahkan mungkin kelompok tani?
3. Sebagai pengusaha di bidang pertanian, peluang apa yang bapak/ibu lihat dari penyelenggaraan SL-PTT ini?

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan.

1. Apa tanggapan dan saran saudara mengenai implementasi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan ?

Lampiran 2. Matrik Hasil Wawancara

No	Indikator/Dimensi	Hasil Wawancara	Analisis
1.	Implementasi SL-PTT : 1. Sosialisasi 2. Aktifitas Pengorganisasian a. Penyaluran Bantuan	a. Dinas Pertanian “Setelah diinformasikan dari pemerintah pusat, kita menyampaikannya kepada masing-masing kecamatan yang mempunyai potensi tanaman pangan untuk program SL-PTT padi. Jadi ditingkat kecamatan juga akan memiliki kelompok-kelompok tani sebagai pelaksana, seperti itu” (Subandi). “Ya.. pertama kita harus meninjau terlebih dahulu, dimana saja yang sesuai persyaratan dengan program SL-PTT. Setelah itu kita menginformasikan mengenai program SL-PTT melalui pendekatan kepada kelompok tani, setelah diberikan sosialisasi kemudian ditawarkan kepada kelompok tani tentang kesediaan mereka untuk melaksanakan program SL-PTT. Dengan adanya pendekatan terlebih dahulu, maka kebanyakan respon kelompok tani kebanyakan bersedia untuk dijadikan unit SL-PTT.” (Herman) a. Dinas Pertanian “Secara umum program ini merupakan pengenalan dan pembelajaran kepada para petani tentang PTT (pengelolaan tanaman terpadu), jadi kebutuhannya itu adalah peralatan pertanian seperti lahan yang akan digunakan untuk menanam, bibit yang akan ditanam, pupuk, pestisida dan peralatan lainnya” (Joko Sutomo) “dalam menentukan saprodi yang akan digunakan untuk program SL-PTT ini, harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari pusat. Disana sudah ditentukan spesifikasi padi yang layak digunakan dalam program SL-PTT itu harus memiliki kualitas yang seperti apa...” (wawancara dilakukan dengan bapak sidik agus setiyono dilakukan pada tanggal 03 April 2013) “untuk melaksanakan segala kegiatan yang akan dilakukan, kita selalu mengacu pada petunjuk pelaksanaan dari pusat, termasuk dalam pengadaan	a. Dinas Pertanian/PPTK Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan melakukan sosialisasi program SL-PTT di Kabupaten Nunukan untuk memberikan informasi tentang program SL-PTT kepada petugas pelaksana dan kelompok tani yang akan dilibatkan dalam program SL-PTT di Kabupaten Nunukan. Proses sosialisasi dapat memberikan pemahaman baik pada petugas ataupun kelompok tani sasaran. Penyaluran bantuan untuk kegiatan SL-PTT disesuaikan dengan persyaratan yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan dari pusat. Penyalur bantuan bibit unggul dalam program SL-PTT adalah PT PERTANI dan SHS. Untuk menentukan kelompok tani yang mendapatkan bantuan, Dinas Pertanian menetapkan atas dasar rekapitulasi kebutuhan benih di tiap kecamatan dari BPP/UPT.

	peralatan. Didalam prosedur telah ditetapkan peralatan seperti apa saja yang digunakan dalam SL-PTT (wawancara dengan bapak Marthen dilakukan pada tanggal 03 April 2013) “sarana penunjang untuk benih unggul itu sudah ditangani oleh pemegang tender rekanan diantaranya itu PT PERTANI dan SHS. Kita hanya menetapkan kelompok tani yang berhak untuk mendapatkan bantuan benih dari rekapitulasi yang diajukan oleh tim teknis di kecamatan.” (wawancara dengan Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2013) “kalau di Kalimantan Timur pendistriusian ini dilakukan oleh PT SHS. Dalam tahap ini kita hanya mediator, kita menyalurkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh PT SHS yaitu tentang data-data kelompok tani yang berhak memperoleh BLBU. Data tersebut berbentuk rekapitulasi CPCL itu bu. Lah... CPCL tersebut diserahkan ke Dinas Pertanian Propinsi. Dari Dinas Pertanian Propinsi inilah kemudian CPCL diserahkan ke cabang PT SHS Kalimantan Timur. Dan kemudian PT SHS Kalimantan Timur tersebut menyalurkan bantuan kepada kelompok tani.” (wawancara dengan bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013) “setelah proses persetujuan bantuan selesai, dana BLM di kirim melalui rekening Bank BRI milik kelompok tani. Dana yang telah dikirim digunakan untuk membeli kebutuhan petani sesuai dengan apa yang ada di Rencana Usaha Kelompok (RUK).” (wawancara dilakukan dengan Bapak Joko Sutomo pada tanggal 01 April 2013) “permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi program SL-PTT di Kabupaten Nunukan ini adalah permasalahan tentang keterlambatan bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada para petani. Padahal segala sesuatunya termasuk persyaratan sudah dipersiapkan sedini mungkin, tapi biasanya memang selalu terlambat turunnya.” (wawancara dengan Bapak subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)	
--	---	--

b. BPP / PPL Pendamping

“Peralatan yang dibutuhkan itu yaa untuk kebutuhan bertani seperti benih, pupuk, obat tanaman dan lain sebagainya. Kalau SL-PTT itu benihnya harus bersertifikat, pupuk yang digunakan harus berkualitas, lahan pertaniannya harus berpotensi untuk meningkatkan produktifitas.” (wawancara dengan ibu herni dilakukan pada tanggal 1 April 2013)

“sebenarnya kebutuhannya itu sama dengan penanaman biasa, hanya saja SL-PTT ini membutuhkan kualitas yang baik dari penanaman biasa. Jadi bibitnya harus baik, pupuknya juga harus bagus, pokoknya semuanya harus berkualitas baik.” (wawancara dilakukan dengan ibu nunung apriyani pada tanggal 2 april 2013)

“Yang beda itu caranya bu, jadi kalau kebutuhannya SL-PTT itu ya sama kayak menanam biasanya, hanya saja lebih menekankan kepada kualitasnya, bibit yang bermutu dan terdaftar. Kalau bentuknya ya sama seperti bibit, pupuk dan sebagainya itulah..” (wawancara dilakukan dengan bapak Ramli pada tanggal 02 April 2013)

“sebenarnya yaa bukan kita yang menentukan kelompok mana yang mendapatkan bantuan benih tapi yaa dari Kelompok Taninya sendiri. Jadi Kelompok Tani itu mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan benih. Melalui pertimbangan dari pendampingnya, BPP/UPT menentukan Kelompok yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Setelah diketahui siapa saja yang layak untuk menerima dan berapa kebutuhannya, baru UPT mereka merekap keseluruhan kebutuhan di Kecamatan dan diserahkan kepada Dinas, agar petani tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan benih padi” (Wawancara dilakukan dengan Bapak Larahuna, tanggal 01 April 2013)

“Pertama itu ya petani mengusulkan kepada petugas untuk bantuan benih, beserta jumlahnya. Setelah itu mendapatkan persetujuan dengan petugas di Kecamatan, kemudian ditetapkan oleh Dinas sebagai kelompok yang berhak

Dalam menentukan kebutuhan benih di tingkat kecamatan, UPT melakukan rekapitulasi dari pengajuan yang dilakukan oleh kelompok tani dengan menyebutkan berapa benih yang dibutuhkan.

	b. Penentuan calon lokasi	mendapatkan bantuan. Setelah bantuan itu turun kepada kelompok tani mengambil bantuan tersebut dengan menandatangani pernyataan kalau bantuan sudah disalurkan.” (Wawancara dengan asri azis dilakukan pada tanggal 2 April 2013) c. Kelompok Tani “Atas kesepakatan dari anggota kelompok kita, dalam pertemuan kelompok baru kita mengajukan bantuan benih kepada UPT, Kalau UPT meng-acc ya kita dapat, tapi kalau tidak ya tidak dapat bu...” (wawancara dengan bapak Andi Nurung dilakukan pada tanggal 2 April 2013) “setelah kelompok kita diputuskan sebagai unit SL-PTT, kita didaftarkan di rekening Bank BRI atas nama kelompok. Dari rekening inilah bantuan yang kita dapatkan dikirim. Saat bantuan itu turun kita selalu diberi tahu oleh para penyuluh, setelah itu kita membelanjakannya sesuai dengan apa yang kita catat di RUK.” (wawancara dilakukan dengan Bapak senong, pada tanggal 29 Maret 2013) a. BPP / PPL Pendamping “Verifikasi kelompok tani itu ya kita meninjau kelompok-kelompok tani dengan menjalin hubungan secara intens untuk menilai kemampuannya, kemampuan yang artinya adalah memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, yaitu kelompok tani yang ada pengurusnya dan organisasinya berjalan, memiliki area sawah yang sesuai dengan ketentuan, dan memiliki kemauan untuk mengikuti setiap kegiatan SL-PTT.” (wawancara dilakukan dengan Bapak Abdul Wahid pada tanggal 04 April 2013) “pertama kali hal yang kita lakukan untuk memilih kelompok tani, kita tinjau dulu kelompok tani yang ada di daerah kita, disana kita menilai kelompok tani mana yang benar-benar layak untuk dijadikan unit SL-PTT. Melihat layak atau	Kelompok tani yang berminat mengikuti program SL-PTT, berembuk untuk membuat Rencana Usaha Kelompok dengan menyebutkan berapa luas lahan dan jumlah benih yang dibutuhkan. Proposal pengajuan bantuan diserahkan kepada BPP/UPT. Dalam menentukan calon lokasi Petugas Lapangan meninjau lokasi poktan, lalu melakukan penilaian untuk menentukan poktan mana yang sesuai dan layak untuk dijadikan unit SL-PTT
--	---	--	---

	tidaknya itu dilihat dari lahan pertaniannya, keorganisasiannya dan kesediaannya dalam melaksanakan kegiatan SL-PTT.” (wawancara dilakukan dengan Bapak Heru wihartopo pada tanggal 04 April 2013) “rencana usaha kelompok itu kan, catatan kebutuhan-kebutuhan petani dan pencapaian perkembangan usahanya, jadi untuk menentukan rencana usaha tani itu kita lihat apa yang ingin dicapai, terus cara-caranya bagaimana, kebutuhannya apa. Dari situ kita bisa melihat apakah rencana usaha kelompok tersebut telah sesuai atau tidak dengan kebutuhan SL-PTT ini.” (wawancara dilakukan dengan Bapak Ramli tanggal 2 April 2013) “verifikasi rencana usaha kelompok tani adalah pengecekan apa saja yang telah dirumuskan oleh kelompok tani mengenai jangka panjang usahanya, dalam hal ini kita sebagai pemandu lapangan, kita hanya sebagai fasilitatornya. Dengan adanya forum-forum kelompok tani, kita diskusi dengan mereka untuk merumuskan secara bersama rencana usaha kelompok tani tersebut.” (wawancara dilakukan dengan Bapak Heru Wihartopo pada tanggal 4 April 2013) b. Dinas Pertanian “untuk merumuskan RUK itu dibantu sama pemandu lapangan, setelah RUK itu jadi, diajukan oleh petugas lapangan ke kepala UPT. Jika UPT meng-acc maka RUK itu disetujui dan bantuan akan turun.” (wawancara dilakukan dengan Bapak Marthen pada tanggal 3 April 2013) “yang mengusulkan kelompok tani itu ya UPT, karena yang mengetahui kelompok tani di daerah kan UPT, jadi UPT memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi yang telah dilakukan petugas lapangan, baru kita akan mempertimbangkan kelayakan kelompok tani. Jika memang kelompok tani tersebut telah memenuhi syarat maka akan diputuskan sebagai unit SL-PTT yang disahkan dengan surat keputusan kepala dinas.” (wawancara dengan	Dari hasil perumusan RUK kelompok tani kemudian digunakan untuk pengajuan kelompok tani inti SL-PTT. Agar RUK yang telah disusun ini diakui maka diperlukan pengesahan dari UPT di daerah kelompok tani tersebut. langkah selanjutnya adalah UPT mengajukan usulan kelompok tani ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Untuk memutuskan kelompok tani sebagai unit SL-PTT, Dinas pertanian menggunakan usulan dari UPT tentang kelompok-kelompok tani yang
--	--	---

	c. Perumusan Petunjuk Teknis	Bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013) “setelah sudah diperiksa dan koreksi baru akan ditetapkan sebagai calon pelaksana dengan SK kepala dinas. Dalam pelaksanaan SL-PTT itu ada dana yang dialokasikan ke kelompok tani dan sarana produksi penunjang kegiatan, maka petani yang ditetapkan secara otomatis mendapatkan bantuan dari program SL-PTT.” (wawancara dengan Bapak Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2013) a. Dinas Pertanian “Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan sebagai penanggung jawab ditingkat kabupaten, memiliki kewajiban untuk merumuskan petunjuk teknis bagi teman-teman yang ada di kecamatan. Dalam perumusannya kita juga melibatkan mereka dalam tim penyusun petunjuk teknis. Agar petunjuk teknis yang ditetapkan nanti sesuai dengankondisi dilapangan, kan yang tau lapangan mereka, jadi mereka ya harus dilibatkan.” (wawancara dengan Bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013) “petunjuk teknis pelaksanaan itu yang bikin ya tim perumus. Lah tim perumus itu terdiri dari perwakilan dinas dan UPT. Setelah dirumuskan dan ditetapkan baru disosialisasikan kepada UPT-UPT. Gitu gambarannya bu.” (wawancara dengan Bapak Joko Sutomo dilakukan pada tanggal 1 April 2013) “proses pembuatan petunjuk teknis yaitu dari propinsi menurunkan ke kita sebagai pelaksana di tingkat kabupaten, dari situ lalu kita olah saja, sehingga juknis yang turun ke kecamatan itu tidak jauh berbeda dan tidak menyimpang.” (wawancara dengan Bapak Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2013) a. BPP/UPT dan Penyuluh Pendamping “kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah kegiatan	memang memenuhi syarat. Dari rekomendasi UPT kemudian ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan sebagai kelompok tani pelaksana SL-PTT perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program SL-PTT di Kabupaten Nunukan dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. petunjuk teknis pelaksanaan yang dihasilkan adalah interpretasi dan pedoman pelaksanaan pemerintah pusat yang sesuai dengan kondisi lingkungan sehingga petunjuk teknis dapat lebih mudah dipahami oleh pelaksana teknis di tingkat kecamatan atau desa/unit SL-PTT. pelaksanaan kegiatan program SL-PTT adalah
	3. Pelaksanaan Kegiatan		

	pendampingan, jadi pemandu lapangan disana memberikan pemahaman kepada petani tentang cara-cara bertani yang terbaik, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Metode yang digunakan adalah melalui pertemuan-pertemuan dan praktek lapangan.” (wawancara dengan Bapak Ismail dilakukan ada tanggal 30 Maret 2013) “untuk program pemerintah yang jenisnya SI-PTT ini memang cukup relevan terhadap petani tentang pengetahuan perkembangan masalahnya, dengan sekolah lapangan ini petani menjadi lebih dekat dengan Pembina/PPLnya, dan petani dapat lebih tau detail jenis apa, macam apa hama yang akan menyerang tanaman sehingga dengan system SL-PTT ini akan mendekatkan petani dengan pemandu lapangan selanjutnya petani lebih mudah bertanya, lebih mudah paham dengan petunjuk-petunjuk yang dipaparkan oleh petugas lapangan.” (wawancara dengan Bapak Heru Wihartopo dilakukan pada tanggal 4 April 2013) “dalam kegiatan SL-PTT, bahwa kita sebagai pemandu bertugas untuk menyampaikan kepada petani mengenai apa saja yang terdapat dalam SL-PTT, jadi kita mengajarkan dan mengenalkan kepada mereka tentang teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT).” (wawancara dengan Bapak Tulus dilakukan pada tanggal 1 April 2013) “pada program SL-PTT itu kita sebagai pemandu lapangan memberikan pemahaman kepada petani mengenai agroekosistem, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan juga manajemen usaha melalui temu lapangan ataupun pertemuan kursus tani.” (wawancara dengan Bapak Azri Azis dilakukan pada tanggal 2 April 2013) “yang pertama kelompok tani dan pemandu lapang mengadakan pertemuan, dalam pertemuan ini dilakukan penggalan masalah, apa permasalahan yang ada di kelompok itu yang paling utama. Didalam pertemuan tersebut ada kesepakatan mengenai permasalahan dan metode yang digunakan untuk	kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai teknologi PTT. Metode yang digunakan adalah pendampingan, dalam hal ini pemandu lapangan memberikan pendampingan kepada petani untuk melakukan pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Materi yang diberikan kepada petani, sesuai dengan apa yang yang dibutuhkan oleh petani. Dalam kegiatan ini petani dibentuk agar lebih terampil dan memiliki pengetahuan teknologi tanam yang sesuai dengan kondisi lingkungan dalam hal ini adalah agroekosistem sehingga petani akan dapat menentukan langkah-langkah yang tepat bagi lahannya sendiri. Cara penyampaian yang dilakukan oleh pemandu dengan pengajaran orang dewasa yaitu pengajaran dilakukan dengan bahasa daerah, waktu dan tempatnya dilakukan oleh petani, melakukan diskusi dua arah dan langsung melakukan praktek langsung di lapangan.
--	---	--

	peningkatan produktivitas, misalnya penggunaan pupuk organik, itu nanti yang tertuang dalam Rencana Usaha Kelompok.” (wawancara dengan Bapak Larahuna dilakukan pada tanggal 1 April 2013) “langkah pertama itu melakukan pertemuan dengan petani, dalam pertemuan tersebut kita dan petani menyusun RUK. Setelah itu kita merumuskan langkah-langkah dan membuat jadwal kegiatan. Setelah tersusun jadwal-jadualnya baru kita melakukan kegiatan yang telah disusun tadi. Jadi kegiatan antar kelompok ya tidak sama, kan setiap masalah dikelompok juga berbeda. Yang jelas ada kegiatan pokoknya yang harus dijadualkan yaitu pemberian materi penyuluhan dan kegiatan lapangan. Kurang lebih seperti itu.” (wawancara dengan Ibu Herni dilakukan pada tanggal 1 April 2013) “pertama pertemuan dilakukan untuk membahas permasalahan utama petani dan penyusunan RUK, untuk pertemuan berikutnya adalah pertemuan rutin. Pertemuan rutin ini dilakukan untuk memberikan materi kepada petani, materi-materinya sudah dijadualkan sebelumnya. Sementara praktek lapangan dilakukan secara bersama yaitu pemandu lapangan dan kelompok tani melakukan cara bertani sesuai dengan materi-materi yang diajarkan.” (wawancara dengan Ibu Herni dilakukan pada tanggal 1 April 2013) “pertama kali itu kita mengadakan pertemuan antar kelompok dan juga diikuti oleh pemandu lapang, dalam pertemuan itu kita membahas masalah-masalah dalam usaha pertanian kita, setelah itu kita merumuskan jangka panjang usaha kita dan merencanakan untuk meningkatkan produktivitas. Dari pertemuan itu baru menghasilkan jadwal kegiatan. Kalau bentuk kegiatannya kayak belajar bersama.” (wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni dilakukan pada tanggal 3 April 2013) “setelah kita ditetapkan sebagai unit SL-PTT, yang dilakukan pertama kali itu pertemuan antar anggota kelompok tani dengan pemandu lapangan yang mendampingi di kelompok. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai	
--	---	--

masalah-masalah dalam usaha tani kita, terutama padi sawah, setelah dibahas kemudian dicari jalan keluar dari masalah tersebut, sekaligus merancang usaha ke depan.” (wawancara dengan Bapak Arif dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

“ untuk memberikan pengetahuan mengenai agroekosistem, yang kita lakukan adalah memberikan materi dengan mengadakan pertemuan. Untuk tempat pertemuan ini disesuaikan dengan kegiatan petani, ya biasanya di saung sawah atau rumah petani. Dari pertemuan tersebut petani akan diajak untuk langsung untuk mempraktekkan di Laboratorium Lapangan (LL) yang telah ditetapkan bersama. Dalam laboratorium itulah petani melakukan pengamatan mengenai kondisi air, pertumbuhan tanaman, gangguan-gangguan tanaman, dan banyak yang lain bu. Pengamatan tersebut lalu dicatat oleh petani dan kemudian digunakan sebagai diskusi antar petani.” (wawancara dilakukan dengan Bapak ramli pada tanggal 2 April tahun 2013)

“pada dasarnya kegiatan SL-PTT ini kan kegiatan penyampaian kepada kelompok tani mengenai agroekosistem. Yang pertama ya kita melakukan pengajaran kepada petani dengan metode pembelajaran orang dewasa dan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah. Selain materi penyuluhan juga dilakukan praktek lapangan di sawah di lahan Laboratorium Lapangan (LL). Dalam praktek lapangan itulah petani akan mempraktekkan apa yang telah di dapat melalui pemberian materi oleh petugas lapangan.” (wawancara dilakukan oleh Bapak Andhika Dwi Purwanto dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

“pertama kita dikenalkan dengan teknologi agroekosistem. Teknologi agroekosistem itu teknologi yang digunakan untuk melakukan penanaman yang sesuai dan lebih efektif. Materi tentang agroekosistem ini meliputi ; kondisi cuaca, keadaan air, populasi hama dan musuh alaminya, tingkat kerusakan tanaman, tingkat kesuburan padi dengan pengukuran menggunakan Bagan Warna Daun (BWD), jumlah anakan dan tinggi tanaman, pemupukan,

		cara pembenihan dan lain-lain. Dari situ kita bisa memahami metode penanaman yang lebih efektif. Setelah kita diberikan pemahaman tersebut, kita bersama dengan pemandu lapangan melakukan praktek lapangan. Dalam praktek lapangan ini kita melakukan kegiatan pertanian mulai dari pengolahan, penanaman, pengamatan hama sampai pemanenan, bahkan cara menyimpan hasil panen. Dalam prakteklapang ini secara rutin kita mencatat perkembangannya dan kita diskusikan dengan anggota kelompok. Kalau ada masalah misalnya ada hama ya kita catat seperti apa serangan hama itu, apa jenis hamanya dan indikasinya apa saja. Dari situ kita diskusikan dengan kelompok untuk membahas teknik pemberantasan hama yang paling baik.” (wawancara dilakukan dengan bapak Ruslan pada tanggal 4 April tahun 2013)	
II	Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi SL-PTT : 1. Faktor Komunikasi	a. Dinas Pertanian “dukungan-dukungan dari para pemerintah itu sangat penting dalam implementasi program SL-PTT, dengan adanya dukungan itu maka program pendampingan SL-PTT ini masih tetap terselenggara masalahnya kan program ini berasal dari mereka juga. Selama ini yang kita lakukan adalah menunjukkan kepada mereka bahwa sanya di Kabupaten Nunukan ini memang memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi kita menunjukkan hasil dari kinerja kita kepada mereka mengenai keberhasilan yang kita capai seperti peningkatan produksi dan produktifitas saat ini, dan mengenai hal ini kita selalu mengkomunikasikan dengan pelaksana ditingkat kecamatan dan desa maupun pemerintahan provinsi.” (Wawancara dengan Bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013) “ya kita tunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait baik itu pemerintah atau kelompok tani bahwa program ini memang sangat bermanfaat dan apa yang kita lakukan menuai hasil yang sangat memuaskan. Jadi yang kita lakukan menginformasikan kepada mereka tentang perkembangan implementasi program SL-PTT yang kita lakukan, melalui evaluasi, penyerahan laporan dan	Dinas Pertanian selaku penanggung jawab Pelaksana program SL-PTT senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam hal ini kegiatan-kegiatannya meliputi pertemuan-pertemuan, rapat evaluasi dan penyerahan laporan-laporan tertulis. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengontrol proses implementasi program SL-PTT, pihak Dinas Pertanian melakukan pemantauan langsung, pertemuan dan komunikasi mengenai implementasi program SL-PTT di unit-unit SL-PTT.

	2.Sumberdaya	pertemuan-pertemuan. Kalau sampai sekarang dukungan baik dari pemerintah atau dari kelompok tani tetap besar bu, kalau gak ada dukungan dari mereka-mereka ya program ini gak bisa dilanjutkan.”(Wawancara dilakukan dengan Bapak Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2013) “sebagai penanggung jawab pelaksana, jelas tugas utama kita itu ya pengawasan. Untuk melakukan pengawasan ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu kita langsung turun kepada unit-unit SL-PTT. Dengan begitu kita bisa melihat apa kendala disana, bagaimana pelaksananya disana. Selain itu kita juga melakukan berkomunikasi melalui pertemuan-pertemuan kepada pelaksana dan kelompok tani.”(Wawancara dengan Bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013) “yang pasti kita melakukan pemantauan, dari hasil pemantauan itu kita catat lalu kita lihat apa saja masalahnya, kendalanya apa saja dan perkembangannya bagaimana. Dari catatan-catatan tersebut kita bisa melihat dan merumuskan strategi kedepan.(Wawancara dilakukan dengan Bapak Sidik Agus Setiyono pada tanggal 3 April 2013) a. Kelompok Tani “alasan saya untuk tetap mengikuti program ini ya... karena ada manfaatnya bu, dengan mengikuti program ini saya memperoleh pengetahuan yang menurut saya itu sangat penting. Ya dengan pengetahuan itu banyak hal yang bisa saya peroleh, seperti peningkatan produksi, efisiensi usaha pertanian, dan banyak yang lain.” (wawancara dengan bapak paweruddin dilakukan pada tanggal 2 April 2013) “ya pertama memang saya mengikuti ini karena diajak oleh petugas PPL, tetapi setelah saya menjalaninya, ternyata banyak keuntungan yang saya peroleh. Dengan mengikuti ini saya jadi mengetahui tentang agroekosistem dan banyak lagi, lagian saya juga tidak ada ruginya mengikuti kegiatan ini, ya kan bu..”	komitmen yang timbul dari kelompok tani diperoleh oleh manfaat dan hasil yang mereka dapatkan. Dengan adanya komitmen dari kelompok tani pelaksana SL-PTT, maka sumber daya lahan kelompok tani yang dibutuhkan dalam implementasi program SL-PTT akan tetap terpenuhi.
--	--------------	---	--

	(Wawancara dengan bpk andi jumadil dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013) b. BPP/UPT dan PPL Pendamping “secara teknis pelaksanaan program SL-PTT ini bagus bu, tetapi ada tapinya, seringkali waktu yang kita jadwalkan itu dalam pelaksanaannya tidak pas. Tidak pasnya itu, semisal pada bulan april yang sudah dijadwalkan untuk menanam, karena memang pada saat itu adalah musim tanam, tetapi bantuan dari pemerintah pusat datangnya setelah musim tanam, jadi ya kita agak kesulitan. Untung saja dalam hal ini petani dapat mengerti jadi kita bersama petani berusaha mencari jalan keluarnya yaitu melakukan pinjaman kepada perusahaan saprodi agar tetap bisa menanam pada bulan April.”(Wawancara dengan Ibu Hemi dilakukan pada tanggal 1 April 2013) “dengan adanya program SL-PTT ini, tugas UPT sebagai tim teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yang tugasnya lebih banyak dibidang penyuluhan sangat dibantu dengan adanya program SL-PTT ini, saat dilaksanakannya program SL-PTT ini, kita lebih mudah untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok tani.” (wawancara dengan Bapak Ismail dilakukan pada tanggal 30 Maret 2013) “dengan adanya program SL-PTT ini kita diberikan fasilitas untuk pendekatan kepada petani, sehingga kita mudah untuk menjalankan tugas sebagai penyuluh.” (wawancara dengan Bapak Heru Wihartopo dilakukan pada tanggal 4 April 2013) c. Pihak Swasta “bagi para pengusaha, program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah peluang. Setiap program pasti kan membutuhkan peralatan-peralatan, lah kalau kita dapat tender atau bagian dari pengadaannya kan keuntungan bisnis bu. Termasuk pada program SL-PTT ini, ketika ada jalinan kerjasama antara	program SL-PTT ini memberi kemudahan bagi sumberdaya manusia pendamping SL-PTT dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh. Dengan adanya sumber daya dana dan sumber daya peralatan, ketersediannya dipenuhi oleh pemerintah pusat. maka UPT dan PPL Pendamping dapat melakukan pendekatan dengan mudah kepada kelompok-kelompok tani. Selama implementasi dilakukan, permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan keterlambatan pendistribusian dana bantuan, akan tetapi permasalahan tersebut dapat teratasi dengan adanya usaha dari penyuluh dan kelompok tani untuk tetap memenuhinya dengan melakukan pinjaman ke tokoh saprodi. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen dan rasa tanggung jawab dari sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan program SL-PTT. Keterlambatan sumberdaya dana menjadi peluang bagi sector swasta/pengusaha untuk kepentingan bisnis dengan menjalin kerjasama memberikan saprodi yang dibutuhkan kelompok tani.
--	---	--

	3.Disposisi	saya sebagai pengusaha saprodi dengan kelompok tani dan pelaksana, maka saya mendapat keuntungan karena penjualan saya meningkat juga bu.” (wawancara dengan Ibu Reski dilakukan pada tanggal 4 April 2013) d. Dispartanak “segala kegiatan mengenai implementasi program SL-PTT ini dilakukan di tingkat wilayah, begitu pula dalam memutuskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Jadi kelompok tani sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu untuk bermusyawarah dengan pemandu lapangannya untuk menentukan kegiatan-kegiatannya apa”(Wawancara dengan Bapak Sidik dilakukan pada tanggal 3 April 2013) “keputusan-keputusan dalam kegiatan SL-PTT itu semuanya tergantung pada kesepakatan kelompok tani. Misalnya saja ketika ada masalah seperti keterlambatan bantuan itu, ya langkah yang diambil itu berdasarkan keputusan dari kelompok tani dan pemadu. Disitu kita saling bertukar pikiran dan kita mengambil langkah untuk meminta pinjaman terlebih dahulu kepada perusahaan saprodi.” (Wawancara dengan Bapak Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013) a. Dinas Pertanian “....peningkatan produksi itu yang paling utama, dengan adanya peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Nunukan, maka pembangunan-pembangunan yang kita lakukan selama ini ada hasilnya dan dapat dinilai bahwa pembangunan yang kita lakukan dinilai baik (Wawancara dengan bapak subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013) “dengan melakukan pemantauan perkembangan di tingkat lapangan maka, kita dapat mengetahui masalah yang ditemui di lapangan, pelaksanaan di lapangan bagaimana, kendala yang terjadi apa, koordinasi dan informasi timbal balik	Pelaksanaan kegiatan implementasi program SL-PTT memberikan pengaruh pada ketanggapan pelaksana. Ketika terjadi permasalahan baik permasalahan tersebut berasal dari lingkungan sekitar atau dari kelemahan pemerintah pusat, melalui metode ini permasalahan dapat teratasi. Hal ini ditunjukkan dengan keputusan mengenai cara mengatasi permasalahan dalam keterlambatan bantuan dana. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, dimana para implementor SL-PTT ini menginginkan adanya peningkatan produksi hasil pertanian, sehingga program pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian telah dinilai berhasil. Salah satu upaya strategi yang digunakan agar kepentingannya terlaksana, Dinas Pertanian melakukan peninjauan langsung untuk
--	-------------	--	--

	yang dari kabupaten ke kecamatan juga ke kelompok, kebutuhannya sumber dayanya seperti apa. Jadi strateginya ya selalu memantau perkembangan di tingkat lapang dengan melihat berbagai masalah yang ada, sehingga kita dapat menentukan mana saja yang benar – benar butuh sumber untuk melakukan implementasi program (Wawancara dengan Bpk. Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2013) “yang pertama dari segi petugas itu lebih intensif dalam pembinaan kelompok karena adanya dana yang dialokasikan, yang kedua adanya pertemuan berkala, yang ketiga ini yang paling diharapkan adanya peningkatan produktivitas. Untuk itulah Program ini memang sangat bagus karena dapat memberikan hal yang positif bagi petani ataupun bagi petugas pertanian. Dari situ lah kenapa program ini tetap menjadi program unggulan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 ini.” (wawancara dengan Bapak Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2013). b. BPP/UPT dan Penyuluh Pendamping “jadi gini bu, UPT itu merupakan Unit Pelaksana Teknis yang ada di Kecamatan. Jadi segala kegiatan secara teknis Dinas Pertanian di kecamatan ya itu berkoordinasi dengan UPT untuk penyelenggaraan SL-PTT, kalau dalam pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang dibutuhkan SL-PTT, itu kewenangan Dinas untuk menentukan. Lah UPT ini digunakan oleh Dinas sebagai rujukan untuk ketentuan-ketentuan itu. Jadi Dinas akan memutuskan ketika UPT mengusulkan siapa-siapa yang mendapatkan bantuan.” (Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Azri Azis dilakukan pada tanggal 2 April 2013) “ saya ini sebagai pemandu, pemandu itu tugasnya menyuluh, meninjau kondisi kelompok tani. Jadi kalau kewenangan pemandu lapangan untuk alokasi dan pendistribusian itu lebih pada teknis, misalnya kita memilih kelompok mana yang memang berhak untuk diajukan ke UPT dan Dinas Pertanian ya kan kita ini yang mengetahui kondisi lingkungannya jadi keputusan-keputusan dari UPT	mengetahui kondisi-kondisi di lapangan, sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Secara umum strategi yang digunakan oleh pendamping dan UPT adalah memilih kelompok yang memiliki sumberdaya. kepentingan yang terdapat pada aktor-aktor yang dapat terlihat dalam alokasi dan pendistribusian sumber daya program SL-PTT memiliki tujuan yang sama yaitu keberhasilan implementasi program SL-PTT. Untuk itu strategi yang digunakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, UPT dan Pemandu lapang dapat berjalan secara sinergis dan saling mendukung satu dengan yang lain.
--	--	--

dan Dinas Pertanian itu didasarkan atas usulan-usulan dari kita. Garis besarnya seperti itu bu” (Wawancara dengan Sri Wahyuni dilakukan pada tanggal 3 April 2013)

“.....kalau keuntungan kita itu ya, kita dapat mudah menjalankan tugas gitu bu. Jadi dengan adanya program SL-PTT ini kita diberikan fasilitas-fasilitas seperti pelatihan untuk pendampingan, pertemuan dengan petani, atau perusahaan-perusahaan pertanian, ya kita memanfaatkan semuanya itu untuk mempermudah tugas kita. Kalau strateginya ya kita gunakan fasilitas yang di berikan tersebut untuk melakukan pendekatan secara intens kepada kelompok tani atau perusahaan-perusahaan swasta agar mereka juga dapat membantu meringankan tugas kita bu” (Wawancara dengan Bapak Andhika dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

“agar program ini berjalan kan butuh kelompok tani yang memang benar-benar mampu bu, jadi kita pilih yang benar-benar mampu itu kelompok mana saja. Lah kelompok itu yang nantinya kita ajukan untuk mendapatkan sumber daya kegiatannya. Kalau misalnya kita mengalokasikan untuk semua kan juga gak cukup, sementara kalau kita mengalokasikan untuk kelompok yang masih kurang mampu kita sendiri yang nanti repot, bisa-bisa programnya jadi gagal semua. (Wawancara dilakukan dengan Ibu Nunung Apriyani dilakukan pada tanggal 2 April 2013)

“kebanyakan cara bercocok tanam petani teknologi yang digunakan itu dari leluhurnya, jadi kalo disuruh gini gak mau. Nah dengan adanya program SL-PTT ini, kita dapat mendekatkan diri kepada petani karena pendekatan yang dilakukan sangat efektif dan berdampak pada peningkatan produksi di sektor tanaman pangan.” (wawancara dengan Bapak Azri Azis dilakukan pada tanggal 2 April 2013).

	c. Petani “positif, petani lebih efektif dan efisien terhadap pengeluaran. Karena tahu penyakitnya ini, jenis obatnya segini, dosisnya sekian. Kalo gak tau asal ada obat maka disemprot, kan biasanya petani karena ingin tanaman selamat dari hama kan...? Program SL-PTT juga dapat meningkatkan hasil panennya, meningkatkan produktivitas dan lebuah berkualitas.” (wawancara dilakukan dengan bapak Senong pada tanggal 29 Maret 2013) “karena sektor pertanian adalah sektor yang utama dalam ekonomi, maka kalau petani mengikuti SL-PTT, dengan sendirinya petani bisa merasakan keuntungannya yaitu peningkatan produksi. Jika dibandingkan dengan yang tidak mengikuti, perkembangan produksinya akan ada perbedaan.” (wawancara dilakukan dengan bapak Andi Nurung pada tanggal 2 April 2013) “selama ini kita merasa puas terhadap kinerja para pelaksana. Dengan upaya yang mereka lakukan terutama para pemandu kelompok tani, kita dapat mengerti tentang teknologi PPT ini. Dengan pengetahuan yang diberikan pelaksana, kita dapat menuai hasilnya yaitu peningkatan usaha kita.” (Wawancara dengan Bapak Ruslan dilakukan pada tanggal 4 April 2013) “saya merasa puas terhadap kinerja mereka. Saya rasa para petugas sangat membantu kita dalam segala kegiatan SL-PTT ini, sehingga kita kelompok tani dapat menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik. Selain itu para petugas pelaksana juga sangat ramah kepada kita. Cara pengajarannya itu menarik, mudah dimengerti, dan ketika ada permasalahan yang kita alami, para pemandu langsung memberikan jalan keluarnya.” (Wawancara dengan Bapak Senong dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)	Dengan adanya program pendampingan SL-PTT ini maka petani yang terlibat langsung dan menerapkannya memperoleh keuntungan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas lahan pertanian petani. sifat dan karakteristik para pelaksana terutama para pemandu sangat dirasakan oleh para kelompok tani pelaksana SL-PTT. Dengan melihat metode dan keseriusan para pelaksana untuk mendampingi kelompok tani, seperti cara penyampaian materi, keramahan dan penanganan permasalahan, para kelompok tani merasakan kepuasan kinerja para pelaksana.
4. Birokrasi	a. Dinas Pertanian “saya rasa, petunjuk teknis yang digunakan sebagai pedoman bagi teman-	Di dalam petunjuk teknis pelaksanaan dijelaskan

	teman ini sudah cukup jelas kok untuk dipahami. Ya setidaknya kita sebagai pelaksana tahu tentang tugas dari masing-masing, seperti hanya pada saya sebagai staf dari Sub Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, saya berposisi sebagai penanggung jawab secara teknis di tingkat Kabupaten, Jadi yang saya lakukan hanyalah memberikan fasilitas, pemantauan, dan evaluasi bagi teman-teman di tingkat kecamatan atau desa.” (Wawancara dengan Bapak Sidik Agus Setiyono dilakukan pada tanggal 3 April 2010) “jadi, didalam petunjuk teknis pelaksanaan itu sangat jelas memberikan petunjuk pada kita sebagai pelaksana mengenai tugas pokok dan fungsi didalam implementasi program pendampingan SL-PTT ini, akan tetapi sering kali kondisi lapangan tidak sesuai dengan gambaran dari para perumus petunjuk teknis, jadinya ya..... setiap kegiatan yang dilakukan itu banyak variasinya. Yang terpenting adalah tujuan dari tugas yang diberikan kepada kita itu tercapai.” (Wawancara dilakukan dengan Bapak Joko Sutomo dilakukan pada tanggal 01 April 2013) “ sudah cukup jelas kok dan mudah untuk dipahami, akan tetapi permasalahan bukan dari pemahaman kita tentang tugas pokok dan peranan kita didalam implementasi, melainkan bagaimana kita harus melakukan tugas-tugas itu. Ya walaupun didalam petunjuk teknis sudah dirumuskan apa saja yang harus kita lakukan, tetapi kan tidak semudah itu, kita harus melihat kondisi-kondisi inilah butuh kreatifitas dari pelaksana. Seperti halnya pada kondisi yang tidak kita harapkan, contohnya itu keterlambatan bantuan, ini kan kasus yang sering terjadi dan di petunjuk teknis ini tidak dimuat, pada kondisi ini lah pemandu dan kelompok tani melakukan pinjaman dahulu kepada pengusaha sapi prodi yang menjadi mitra kita setelah bantuan tujuan makan akan dibayar.” (Wawancara dengan Subandi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013) b. BPP/UPT dan Penyuluh Pendamping “dalam pelatihan yang saya ikuti, saya diajarkan berbagai hal tentang SL-PTT	mengenai tugas pokok dan fungsi para pelaksana implementasi program pendampingan SL-PTT, dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana. Akan tetapi, sering kali para pelaksana dalam melakukan kegiatan-kegiatan implementasi tidak mengacu pada petunjuk teknis dalam kondisi tertentu. Hal ini disebabkan karena kondisi-kondisi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang terdapat pada petunjuk teknis pelaksanaan. Dari fenomena ini dapat dilihat bahwa pemahaman para pelaksana lebih mengacu pada tujuan atau hasil dari tugasnya, bukan proses yang dilaluinya. untuk mengimplementasikan program SL-PTT.
--	--	--

	hususnya, yaitu mengenai agrosistem. Materi yang diberikan mengenai agrosistem ini memberikan pemahaman pada kita tentang penyesuaian jenis tanaman yang akan ditanami dengan kondisi lingkungan. Yang fungsinya adalah, kemampuan kita untuk memilih jenis-jenis tanaman, jadi nantinya kita dapat memilih tanaman yang layak untuk di tanam di daerah sini itu apa, dan yang tidak layak itu apa, lalu yang perlu diutamakan itu tanaman apa. Dengan begitu maka produksi yang akan dihasilkan mencapai titik maksimal. Selain pemahaman mengenai agroekosistem pada pelatihan tersebut juga kita diberikan materi tentang pengendalian PTT organisme pengganggu tanaman. Pada materi ini kita mendapat pemahaman mengenai jenis-jenis penyakit yang ada di tanaman, yaitu penyakitnya apa dan pengendaliannya bagaimana. Pengendalian yang ditekankan pada tahap ini adalah pengendalian hama non kimia atau dengan menggunakan biogen hayati, serta cara memproduksi bioagen dengan cara-cara untuk menyampaikan materi tersebut kepada petani. Cara-cara atau metode yang digunakan adalah metode pembelajaran orang dewasa. Dalam hal ini sekolah lapangan yang dimaksud bukan seperti sekolah-sekolah formal, pembelajaran di sekolah ini lebih menekankan pada pendekatan terhadap petani, jadi proses belajarnya itu lebih santai, dan tempatnya pun sesuai dengan keberadaan kelompok tani.” (Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni dilakukan pada tanggal 3 April 2013) “Manfaat yang didapat oleh kelompok tani adalah pengetahuan tentang pengobatan atau tindakan preventif serangan hama. Kalau tidak ada SL-PTT petani yang awam tetap awam, tidak tahu jenis apa penyakitnya, hamanya apa dan pencegahannya, apa obatnya itu juga jadi tahu. Jadi manfaatnya jelas cukup banyak terhadap petani, sehingga program ini sangat efisien, sangat efektif terhadap pengembangan tanaman, produktivitas dan peningkatan hasil padi. Selain itu program ini sangat mudah untuk dicontoh atau disalurkan kepada petani lain agar petani lain yang daerahnya sama juga dapat memperoleh manfaatnya (Wawancara dengan Bapak Tulus Arif Widodo dilakukan pada tanggal 01 April 2013)	Para pelaksana diberikan pembekalan kemampuan yang lebih khusus. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi pemahaman agrosistem, pengendalian organisme. pengganggu tanaman dan cara penyampaian yang dilakukan.
--	--	---

		c. Kelompok Tani “dengan adanya program pendampingan SL-PTT ini, yang saya dapatkan adalah pengetahuan dalam bertani, dengan adanya peningkatan pengetahuan tersebut, saya jadi mampu untuk memutuskan langkah-langkah apa yang saya pilih jika ada permasalahan. (Wawancara dengan Bapak Paweruddin dilakukan pada tanggal 2 April 2013) “Sebelum adanya program pendampingan SL-PTT ini, cara bertanam saya ya cara yang tradisional, ya pokoknya sawah ditanami, dikasih pupuk, jika ada hama ya di semprot, tapi ketika saya berperan aktif dalam program SL-PTT ini saya jadi mengerti kalau semuanya itu ada aturannya untuk mendapatkan hasil yang baik. Sekarang peralatan yang saya gunakan sesuai dengan petunjuk dari petugas lapangan” (Wawancara dengan Bapak Andi Jumadi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013)	perubahan yang dirumuskan pada program SL-PTT yaitu pengelolaan tanaman terpadu, dapat diterima oleh petani. Penerimaan tersebut diwujudkan dalam tindakan-tindakan petani dalam melakukan pengelolaan tanaman. Dengan adanya tindakan tersebut maka implementasi program SL-PTT dapat dikatakan berhasil
--	--	---	--

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Salah satu lokasi lahan kelompok tani pelaksana SL-PTT di Kecamatan Sebatik Barat



Menggali informasi dari para petani peserta program SL-PTT di Kecamatan Nunukan Selatan



Melakukan wawancara dengan penyuluh pendamping program SL-PTT di Kabupaten Nunukan, di kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan



Mengikuti kegiatan pertemuan tanaman pangan, sekaligus wawancara informan dari pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, sekaligus dengan pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Kabupaten Nunukan.